



**STATUS SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR SUMBA
BARAT DAYA
2021**



Status Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumba Barat Daya

© 2021 Yayasan PADMI Mandiri dan William & Lily Foundation

Penulis

Ni Kadek Sri Pusparini

Muhammad Irfan

Anselmus Danga Ate Kondo

Sri Yana Rambu Kaka

Desita Anggraeni

Amkieltiela

Estradivari

Sitasi yang disarankan:

Pusparini, N. K. S., M. Irfan, A. D. A. Kondo, S. Y. R, Kaka, D. Anggraeni, Amkieltiela dan Estradivari. 2021. Status Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sumba Barat Daya. Yayasan PADMI Mandiri dan William & Lily Foundation, Jakarta, Indonesia. 104 hal.

Foto dalam laporan: Yayasan PADMI Mandiri (fotografer: Ni Kadek Sri Pusparini, Muhammad Irfan, Anselmus Danga Ate Kondo, Sri Yana Rambu Kaka, Yosef Heri Wee, Ignasius)

Peta: Desita Anggraeni

Desain Tata letak: Estradivari

Prakata

Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki garis pantai sepanjang 96,7 km dan area perairan laut (<4 mil) seluas 716.798,080 m². Pesisir ini menjadi arena sosial dan sumber penghidupan masyarakat di 33 desa pesisir sekitarnya. Meski kaya akan sumber daya pesisir dan laut, pertanian adalah sektor yang paling besar menggerakkan roda ekonomi kabupaten, dengan memperkerjakan hingga 90% tenaga kerja yang tersedia. Sementara, potensi perikanan dan pariwisata bahari yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Perencanaan yang optimal dan berbasis ilmiah dibutuhkan untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata pesisir berbasis desa yang efektif di Sumba Barat Daya. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah, Yayasan Padmi Mandiri dan William & Lily Foundation melakukan studi awal sosial ekonomi pada bulan Februari - Maret 2021 di lima kabupaten di Sumba Barat Daya. Studi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya, penguasaan aset penghidupan, ancaman-kerentanan-konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, serta pemetaan pemangku kepentingan. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi terkini yang berguna untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Sumba Barat Daya.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kegiatan ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pembangunan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat pesisir di desa studi. Kami sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan demi kesempurnaan kajian ini.

Jakarta, Mei 2021

Penulis

Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki garis pantai sepanjang 96,7 km dan area perairan laut (<4 mil) seluas 716.798,080 m². Pesisir ini menjadi arena sosial dan sumber penghidupan masyarakat di 33 desa pesisir sekitarnya. Namun potensi perikanan dan pariwisata bahari yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Perencanaan yang optimal dan berbasis ilmiah dibutuhkan untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata pesisir berbasis desa yang efektif di Sumba Barat Daya. Untuk mendukung program pembangunan pemerintah, Yayasan Padmi Mandiri dan William & Lily Foundation melakukan studi awal sosial ekonomi untuk memperoleh gambaran terkini tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya, penguasaan aset penghidupan, ancaman-kerentanan-konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, serta pemetaan pemangku kepentingan. Studi ini dilakukan di 5 (lima) pesisir di wilayah Sumba Barat Daya, meliputi Desa Pero Konda dan Pero Batang yang berada di Kecamatan Kodi, Desa Wainyapu dan Tana Mete yang berada di Kecamatan Kodi Balaghar, dan Desa Lete Konda yang berada di Kecamatan Loura pada Bulan Februari-Maret 2021.

Penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya pada umumnya adalah penduduk asli yang berasal dari tiga suku yaitu Suku Wewewa, Suku Kodi dan Suku Loura. Sebagian kecil pendatang yang telah menetap di Sumba Barat Daya telah berbaur dengan penduduk asli. Di Desa Pero Konda, Pero Batang, Wainyapu dan Tana Mete suku mayoritas penduduknya adalah Kodi. Sementara itu, di Desa Lete Konda suku mayoritas penduduk adalah Loura. Mata pencaharian penduduk di pesisir desa studi pada umumnya adalah berkebun/bertani/berladang, menangkap ikan, budidaya laut, berdagang, PNS, dan beberapa di antaranya bekerja di luar desa (Bali, Bima, Lombok). Masyarakat di Desa Pero Konda dan Lete Konda memiliki ketergantungan ekonomi yang cenderung besar terhadap pemanfaatan pesisir dan laut. Sementara tiga desa lainnya, yaitu Pero Batang, Wainyapu, dan Tana Mete masih menjadikan pesisir dan laut sebagai mata pencaharian sekunder atau tersier dan cenderung subsisten (hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga).

Hasil kajian penguasaan aset penghidupan menunjukkan bahwa pesisir desa studi memiliki aset alam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya. Aset alam tersebut berupa ekosistem pesisir dan biota laut meliputi ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, biota laut, dan panorama pantai yang indah. Seluruh aset alam tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, baik secara sosial (sumber pangan dan arena sosial), ekonomi (sumber pendapatan ekonomi), dan budaya (arena atraksi budaya/tradisi lokal). Keberadaan aset alam ini relatif merata di seluruh desa studi, hanya saja memiliki perbedaan dari konsentrasi pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Selain aset alam, masyarakat di pesisir desa studi juga memiliki modal sosial yang cukup kuat yang ditunjukkan oleh nilai kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah dibudayakan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang terbilang cukup dapat membantu masyarakat dalam persoalan finansial adalah tradisi kumpul tangan dan arisan adat, sementara tradisi gotong royong telah diterapkan untuk berbagai hal misalnya keadaan duka maupun pesta, pembangunan rumah, maupun kegiatan panen di ladang/kebun/sawah.

Ketokohan masyarakat memegang peran penting dalam struktur masyarakat pesisir. Hanya saja, masyarakat belum memiliki wadah/organisasi/kelompok profesi yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan laut. Penguasaan aset yang memadai juga tampak pada akses masyarakat terhadap kebutuhan fisik/infrastruktur, meliputi kesehatan, pendidikan, listrik, jalan, informasi, pasar, dan sarana olah raga relatif mudah. Aset fisik terutama akses komunikasi jarak jauh dan akses air

bersih pada saat musim kemarau masih terbatas. Sarana fisik yang secara khusus terkait dengan sarana produksi perikanan belum tersedia di seluruh desa studi. Berbeda halnya dengan penguasaan aset manusia dan finansial, yang cenderung menunjukkan kondisi yang kurang memadai. Terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pemberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan aset alam yang ada. Aset finansial secara umum belum dapat mendukung kegiatan pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut secara optimal. Belum tersedianya lembaga keuangan, serta minimnya kemampuan manajemen keuangan dasar yang dimiliki masyarakat akan menjadi tantangan mendasar dalam pengelolaan pesisir dan laut sebagai usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa berbasis sumber daya lokal.

Selain tantangan terkait dengan SDM dan finansial, tantangan lain yang juga akan dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut adalah tantangan terkait dengan ancaman pesisir dan laut, kerentanan sosial, serta konflik sosial yang sedang terjadi maupun yang potensial terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih melakukan beberapa kegiatan ekonomi yang cenderung dapat merusak dan mengancam keberlanjutan pesisir dan laut meliputi kegiatan penambangan yang dapat meningkatkan abrasi pantai (penambangan pasir laut, karang, dan batu kubur), penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya dan lingkungan (pemanfaatan teknik tradisional yang cenderung menginjak terumbu karang, mencongkel karang, penangkapan dengan bom oleh nelayan luar, maupun penangkapan biota laut yang dilindungi), maupun potensial tekanan penangkapan ikan di area pesisir. Potensial tekanan ini dapat disebabkan oleh konsentrasi kegiatan penangkapan di area pesisir dan terumbu karang yang cenderung disebabkan oleh keterbatasan aset produksi dan teknik penangkapan yang dikuasai. Salah satu alasan masyarakat masih melakukan kegiatan penambangan adalah kebutuhan ekonomi, yang tidak terdukung oleh mata pencaharian alternatif yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain ancaman, isu kerentanan sosial juga akan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian khusus dalam rencana pengembangan pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan. Kerentanan yang teridentifikasi di desa studi meliputi kerentanan kesehatan (balita & ibu hamil), ekonomi (nelayan tanpa alternatif lain), keselamatan (nelayan saat musim angin besar), keamanan (terkait dengan kriminalitas), dan gender (kekerasan terhadap perempuan). Demikian juga dengan konflik sosial terkait dengan lahan pesisir yang ada di pesisir desa studi, potensial akan menjadi tantangan pelik dalam pengelolaan.

Modal alam berupa pesisir yang sangat kaya dan indah yang didukung oleh modal sosial dengan berbagai tradisi khas dan telah dikenal sebagai objek wisata hingga manca negara menghadirkan peluang yang sangat tinggi untuk pengembangan perikanan sekaligus pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya alam lokal. Pengembangan ini akan mampu menjadi alternatif perekonomian dan strategi nafkah ganda untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Kehadiran ekonomi alternatif (strategi nafkah ganda) akan dapat membantu masyarakat mengatasi isu kerentanan yang ada sekaligus menurunkan ancaman melalui pengurangan kegiatan yang bersifat merusak yang selama ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Potensi besar yang dimiliki Sumba Barat Daya sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari masyarakat, namun tidak dipungkiri bahwa rencana pengembangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, dan beberapa diantaranya bersifat mendasar yang membutuhkan intervensi melalui pemberdayaan masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Daftar Isi

Prakata	3
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	6
Daftar Istilah dan Singkatan Penting	7
Pendahuluan.....	8
Profil Masyarakat Pesisir Desa Studi	13
Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut	22
Penguasaan Aset Penghidupan.....	35
Ancaman, Kerentanan, dan Konflik Sosial	53
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	60
Pemetaan Pemangku Kepentingan	70
Kesimpulan dan Rekomendasi	82
Daftar Pustaka	86
Lampiran	87

Daftar Istilah dan Singkatan Penting

Abalone	Abalone adalah suatu spesies kerang kerangan (Moluska) dari famili Haliotidae dan Genus Haliostik. Terkenal sebagai kerang mata tujuh atau siput balik batu.
ABK	Anak Buah Kapal
Abrasi	Suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak terkadang juga disebut dengan erosi pantai.
Pentagon Aset	Lima aset/modal yang dimiliki untuk mendukung penghidupan lestari masyarakat, meliputi: aset/modal alam (modal yang terkait dengan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat pesisir); aset/modal manusia (modal terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat pesisir); aset/modal finansial (modal terkait dengan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir); aset/modal sosial (modal terkait dengan kondisi sosial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir yang dapat membantu masyarakat dalam kehidupan); dan aset/modal fisik (modal terkait dengan akses fisik/infrastruktur yang diperlukan masyarakat untuk kehidupan).
BUMN	Badan Usaha Milik Desa
BPS	Badan Pusat Statistik
BBM	Bahan Bakar Minyak
BPJS (KIS)	Kartu yang menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu, tanpa membayar iuran, dan dapat digunakan di mana saja tanpa batasan seperti BPJS. Kartu Indonesia Sehat juga dikenal sebagai BPJS PBI.
COVID-19	Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh <i>severe acute respiratory syndrome virus corona 2</i> (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona.
DFID	Department for International Development, UK
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> /diskusi kelompok terfokus
DPI	Daerah penangkapan ikan
<i>Homestay</i>	Rumah warga lokal yang disewakan untuk tempat menginap para turis/wisatawan.
KK	Kepala Keluarga
Pasif	Bersifat menerima saja; tidak giat; tidak aktif
Penguasaan Aset	Kepemilikan/kemampuan/akses atas aset/modal penghidupan oleh suatu masyarakat
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Retribusi	Pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
Satgas	Satuan Tugas
Stunting	Masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Pendahuluan

Kajian ini dilakukan di lima desa pesisir yaitu Desa Pero Konda, Pero Batang, Wainyapu, Tana Mete, dan Desa Lete Konda, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), pada tanggal 26 Februari – 21 Maret 2021. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, diskusi kelompok terarah, wawancara tokoh kunci dan pemetaan partisipatif. Validasi data dilakukan melalui triangulasi data dan workshop dengan menghadirkan perwakilan informan dari seluruh desa studi serta pemerintah Kabupaten SBD yang diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus analisis pada profil sosial ekonomi budaya, penguasaan aset penghidupan, ancaman-kerentanan-konflik, pemberdayaan dan kebutuhan masyarakat, serta pemetaan pemangku kepentingan.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki garis pantai sepanjang 96,7 km dan area perairan laut (< 4 mil) seluas 716.798,080 m². Pesisir ini menjadi arena sosial dan sumber penghidupan masyarakat di 33 desa pesisir sekitarnya.

Untuk mendukung program pembangunan nasional, khususnya program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir di Sumba Barat Daya pada masa yang akan datang, maka dibutuhkan data dan informasi terbaru terkait kondisi sosial dan mata pencaharian masyarakat pesisir, termasuk kondisi sosial secara umum, penguasaan aset masyarakat pesisir, tantangan dan ancaman yang ada, kebutuhan masyarakat, serta peta tokoh penting masyarakat.

Tujuan dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait dengan karakter dan kondisi masyarakat pesisir serta penguasaan aset, tantangan, kebutuhan, dan tokoh penting masyarakat di pesisir Sumba Barat Daya. Data dan informasi ini ditujukan untuk mendukung perencanaan program secara spesifik, sesuai dengan kebutuhan dan mampu mengatasi tantangan yang ada.

LOKASI STUDI

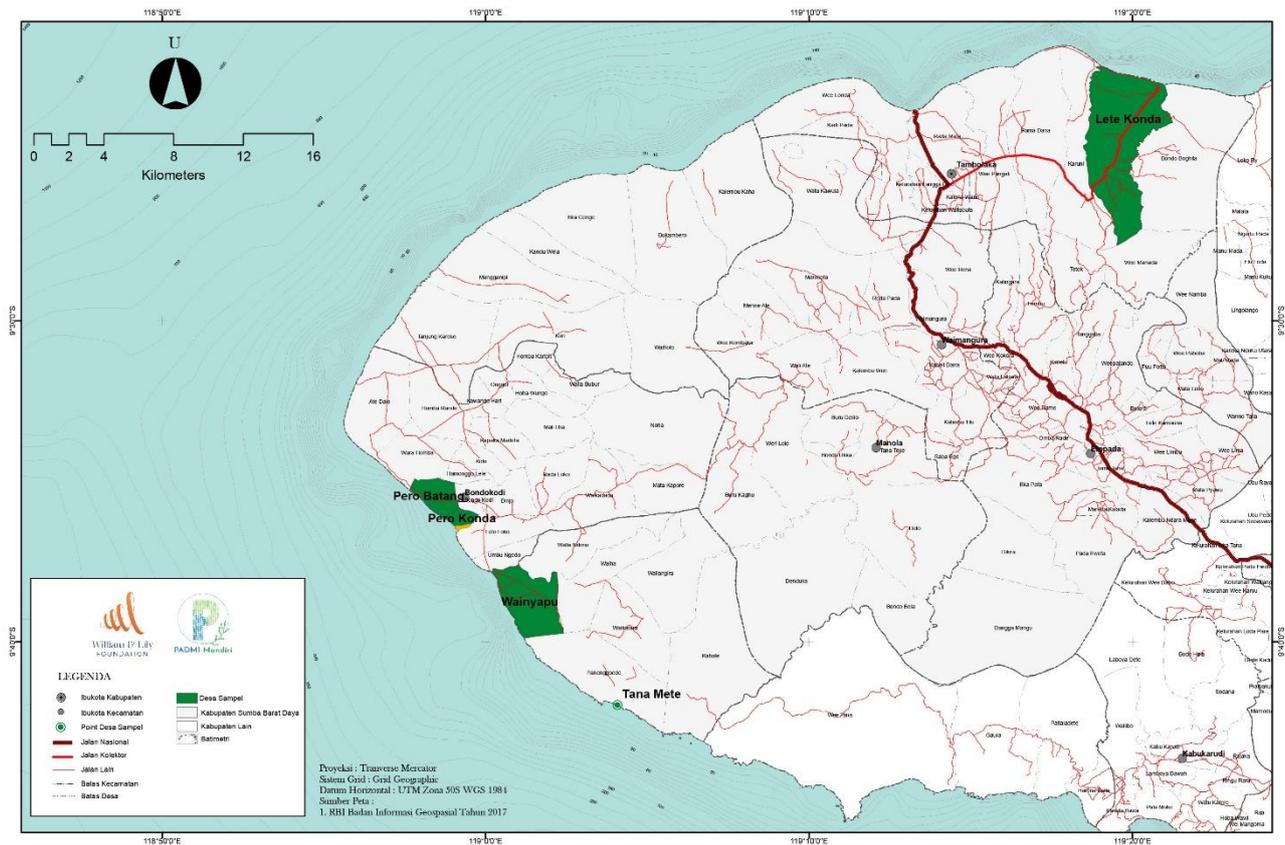
Pengkajian ini dibatasi hanya di lima desa pesisir di Kabupaten Sumba Barat Daya (**Gambar 1**). Pembatasan dilakukan terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kajian baik sumber daya manusia, waktu, maupun finansial. Pemilihan desa sampel ini didasarkan pada hasil diskusi antara William & Lily Foundation dan Yayasan Padmi Mandiri dengan melihat beberapa parameter sosial.

Parameter sosial tersebut meliputi (1) batas administrasi untuk memastikan setiap desa memiliki intervensi kebijakan yang sama, (2) parameter ragam mata pencaharian penduduk untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan pesisir, (3) keberagaman suku bangsa di setiap desa untuk memastikan desa sampel memiliki struktur sosial yang dapat merepresentasikan masyarakat Sumba Barat Daya secara umum, dan (4) pasar untuk memastikan bahwa masyarakat di desa sampel dapat merepresentasikan akses perekonomian utama masyarakat pesisir.

Desa yang terpilih sebagai desa sampel adalah Desa Pero Konda dan Pero Batang yang berada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Kodi; Desa Wainyapu dan Tana Mete yang berada di Kecamatan Kodi Balaghar, dan Desa Letekonda di Kecamatan Loura. Secara umum, diharapkan kelima desa sampel ini dapat mewakili 33 desa pesisir yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

METODE STUDI

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi studi literatur, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), wawancara informan kunci, dan pemetaan partisipatif. Studi literatur digunakan untuk menemukan informasi dan data terkait dengan masyarakat dan potensi pesisir desa studi, serta untuk memperoleh data terkini dari profil desa studi. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat lokasi kegiatan masyarakat pesisir meliputi lokasi fishing base, budidaya rumput laut, kemah/rumah garam, serta area mangrove di desa studi. Diskusi kelompok terfokus dilakukan di masing-masing desa untuk melihat pandangan umum masyarakat tentang



Gambar 1. Lokasi lima desa studi di Sumba Barat Daya

penguasaan 5 aset/modal penghidupan masyarakat pesisir, tantangan ancaman dan konflik sosial, program pemberdayaan yang pernah diterima oleh masyarakat, serta kebutuhan masyarakat.

FGD dilakukan dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat meliputi kepala desa, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengolah garam, pelaku kegiatan pariwisata, pengepul hasil laut, tokoh perempuan, kader kesehatan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Selain menggali data dalam pandangan kolektif masyarakat desa, FGD juga ditujukan untuk mendorong pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kondisi yang dimiliki. Dari proses ini masyarakat turut melakukan penilaian secara partisipatif terhadap potensi sumber daya dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memetakan kegiatan pemanfaatan pesisir dan laut di desanya. Jumlah peserta FGD rata-rata adalah berkisar antara 14-25 orang. Sementara itu, wawancara informan kunci dilakukan untuk mendalami informasi terkait dengan objek penelitian. Selain informan dari masing-masing desa studi, wawancara juga dilakukan dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian jumlah total informan yaitu 91 orang peserta FGD, dan 89 orang narasumber yaitu 87 orang perwakilan masyarakat, serta 2 orang perwakilan instansi pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemetaan partisipatif dilakukan bersamaan dengan FGD dan dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan fasilitator.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 26 Februari - 21 Maret 2021. Karena situasi pandemi Covid-19, survei dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan meliputi pelaporan kegiatan kepada pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tambolaka, dan penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci/membersihkan tangan setiap kali usai kegiatan

wawancara dan FGD). Pelaksanaan survei juga mengakomodir tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti sirih pinang.

ANALISA DATA

Data yang telah dikumpulkan dari literatur meliputi penelusuran data dari instansi BPS berupa Data Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka tahun 2020, profil desa studi, data statistik perikanan laut, dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya; hasil observasi lapangan; hasil diskusi kelompok terfokus; dan data hasil wawancara informan kunci selanjutnya divalidasi melalui proses triangulasi dan workshop secara khusus yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 bertempat di Aula Rapat Hotel Ella Tambolaka.

Data dan informasi yang telah divalidasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan objek studi serta untuk menafsirkan data sesuai dengan tujuan kajian. Parameter yang dikaji meliputi profil sosial ekonomi budaya, penguasaan aset, ancaman-kerentanan-konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan tingkat desa.

Pada indikator penguasaan aset masyarakat pesisir dilakukan analisis deskriptif semi kuantitatif dengan memberi skor 0-5 untuk menunjukkan kondisi aset yang semakin memadai untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut. Aset penghidupan masyarakat pesisir meliputi aset/modal alam, manusia, finansial, fisik, dan sosial. Kelima aset penting ini digambarkan dalam bentuk segilima dan garis yang saling menghubungkan dengan titik pusat di tengah bidang pentagon mengindikasikan variasi kondisi modal yang ada (DFID, 2001).

Aset alam merupakan persediaan alam yang menghasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia. Modal alam dapat berupa sumber daya alam yang tersedia di laut dan pesisir yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. *Aset manusia* merupakan modal manusia yang mengindikasikan kemampuan manusia dalam mengelola aset alam yang tersedia, ukuran yang digunakan adalah pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan pengalaman pemberdayaan yang pernah dimiliki. *Aset finansial* merupakan berbagai sumber keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupan masyarakat itu sendiri, meliputi kelembagaan keuangan, sumber penghasilan,

pengeluaran, tabungan, hutang piutang, dan kebiasaan pengaturan keuangan dasar yang dilakukan oleh masyarakat. *Aset fisik* merupakan modal fisik yang berupa ketersediaan infrastruktur yang dapat digunakan untuk pencapaian penghidupan. *Aset sosial* menggambarkan modal sosial berupa nilai-nilai sosial, tradisi, adat istiadat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan dari penghidupan serta dapat meringankan kehidupan masyarakat.

Analisis deskriptif kuantitatif juga dilakukan pada pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan melalui analisis dan identifikasi pemangku kepentingan yang diukur dari peran, tingkat kepentingan, dan kekuatan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan matrik pengukuran, yang meliputi pengukuran kekuatan manusia (cakupan skala manusia yang dapat dipengaruhi/digerakkan), kekuatan politik (keterlibatan tokoh dalam peran politik serta cakupan area politik), dan kekuatan finansial (kekuatan keuangan tokoh termasuk luasan jaringan finansial yang dimiliki) mengacu pada World Bank, 1998. Tingkat kepentingan diukur dengan pemberian nilai identifikasi pada setiap tokoh yang mengindikasikan kepentingan murni (untuk mendukung program pemberdayaan dan

pembangunan masyarakat pesisir), atau kepentingan yang disertai dengan faktor kepentingan pribadi (adanya kepentingan lain secara pribadi yang ingin diperoleh/dicapai dari dukungan yang diberikan terhadap program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir, atau tanpa kepentingan apapun. Hasil penilaian ini kemudian dimasukkan ke dalam kuadran peta tokoh penting untuk melihat posisi masing-masing tokoh sekaligus juga untuk menentukan bentuk langkah pelibatan (komunikasi, koordinasi) yang diperlukan untuk setiap tokoh tersebut. Metode studi secara rinci disampaikan pada **Lampiran 1**. Parameter kunci yang disurvei tersedia pada **Lampiran 2**.

Profil Masyarakat Pesisir Desa Studi

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki garis pantai sepanjang 96,7 km dan area perairan laut (< 4 mil) seluas 716.798 m². Pesisir ini menjadi arena sosial dan sumber penghidupan masyarakat khususnya di 33 desa pesisir sekitarnya. Masyarakat memanfaatkan pesisir dan laut sebagai arena sosial, sumber pangan, pendapatan rumah tangga, dan area budaya/tradisi. Pemanfaatan pesisir dan laut secara ekonomi telah dilakukan dalam bentuk penangkapan ikan dan biota laut lainnya, budidaya rumput laut, pengolahan garam, dan wisata pantai.

PROFIL WILAYAH

Desa studi merupakan desa-desa pesisir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan data pada Tabel 1, diketahui bahwa luas Desa Pero Konda kurang dari 1 km². Rata rata jumlah dusun dan dusun pesisir di wilayah studi adalah 4 dusun. Hal yang berbeda di Desa Lete Konda dimana jumlah dusun sebanyak 3 dan dusun pesisir hanya 1 dusun yaitu Dusun III Katewel. Namun di Desa Lete Konda pemanfaatan pesisir pantai dan laut dimanfaatkan oleh semua dusun terutama untuk kegiatan budidaya rumput laut.

Di antara desa studi, Desa Pero Konda dan Desa Lete Konda memiliki muara sungai, sedangkan desa-desa studi lainnya tidak memiliki akses muara. Muara sungai tersebut digunakan sebagai area tambat perahu oleh nelayan. Sedangkan masyarakat di desa yang tidak memiliki akses muara, pada umumnya menambatkan perahu di pesisir pantai. Desa Wainyapu memiliki muara sungai namun tidak dapat digunakan sebagai tempat tambat perahu, sehingga nelayan di Desa Wainyapu yang memiliki perahu menambatkan perahunya di Desa Pero Konda. Kondisi tempat sandar perahu nelayan Desa Pero Konda terkesan seadanya. Terdapat dermaga kecil di muara sungai dan nelayan mengikat perahu di batang-batang pohon maupun di dinding dermaga.

Di Desa Lete Konda, nelayan memanfaatkan area muara sebagai tempat tambat perahu hanya pada saat musim gelombang besar untuk menghindari hantaman ombak ke perahu. Sedangkan pada musim teduh, nelayan lebih memilih menambatkan perahu di pantai. Keberadaan buaya di muara sungai Lete Konda menjadi salah satu alasan nelayan enggan untuk menambatkan perahu mereka di muara. Menurut masyarakat, keberadaan buaya di muara ini cukup banyak dan terbilang ganas menyerang penduduk yang melintas di muara saat akan menambat/mengambil perahu.

Desa-desa studi juga memiliki panorama pantai yang cukup indah, dan potensial untuk dikembangkan sebagai pantai wisata. Diantara wilayah studi pantai wisata yang sudah dikelola adalah Pantai Pero di Desa Pero Konda. Pantai pero mulai dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pero Konda pada Bulan Februari 2021. Sudah ada redistribusi bagi wisatawan yang berkunjung. Sementara itu, di desa studi lainnya pantai wisata belum dikelola.

Beberapa pantai di lokasi studi yaitu Pantai Bondo Kawango dan Pantai Pero Batang di Desa Pero Batang, Pantai Karaba di Desa Wainyapu, Pantai Mbawanna dan Pantai Watu Malando dekat Desa Tana Mete dan Pantai Katewel di Desa Lete Konda. Potensi pantai di beberapa desa terancam rusak karena adanya penambangan pasir laut dan penambangan batu kubur seperti di Desa Wainyapu dan Desa Pero Batang. Selain itu, kondisi pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia pada musim barat (Desember-Maret) menyebabkan pantai tersebut tergerus abrasi pantai. Hutan (mangrove) terdapat di Desa Pero Konda, Wainyapu, dan Lete Konda. Masyarakat telah memahami bahwa ada larangan dari pemerintah untuk masyarakat mengambil kayu bakau. Kedepannya di mangrove Desa Pero Konda akan dikembangkan sebagai objek wisata. Peta potensi pesisir Sumba Barat Daya disampaikan pada Gambar 2.

PROFIL KEPENDUDUKAN

Profil kependudukan di desa studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif berimbang. Kepadatan penduduk di setiap desa tampak sangat bervariasi. Data kependudukan di desa studi per tahun 2019 disampaikan pada **Tabel 2**.

Tabel 1. Luas wilayah dan jumlah dusun desa studi tahun 2020

Desa Studi	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Wilayah Jumlah Dusun	Jumlah Dusun Pesisir
Pero Konda	Kodi	0,99	4	4
Pero Batang	Kodi	3,30	4	4
Wainyapu	Kodi Balaghar	5,22	4	4
Tana Mete	Kodi Balaghar	12	4	4
Lete Konda	Loura	16,42	3	1

Tabel 2. Jumlah penduduk di desa studi pada tahun 2019

Desa Studi	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Jumlah Penduduk Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Total	
Pero Konda	771	701	1.472	1.487
Pero Batang	793	872	1.665	505
Wainyapu	1.083	1.010	2.093	401
Tana Mete	1.141	1.098	2.239	187
Lete Konda	931	921	1.851	101

PROFIL SOSIAL BUDAYA PESISIR

Agama dan Kepercayaan

Berdasarkan data BPS tahun 2020, agama di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 48,23 persen beragama Kristen Katolik dari seluruh umat beragama, lalu diikuti 47,94 persen pemeluk agama Kristen Protestan, sisanya adalah pemeluk agama Islam, Hindu, Budha dan Lainnya.

Di wilayah studi, Desa Pero Konda merupakan penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Di Desa Lete Konda, Dusun Katewel (Dusun III) mayoritas penduduk yang beragama Islam, di samping dusun lainnya yang memeluk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Sementara itu di Desa Pero Batang, Wainyapu dan Desa Tana Mete dominan penduduk beragama Kristen Protestan di samping beragama Katolik dan lainnya (Marapu).

Agama/kepercayaan lainnya yang dianut oleh penduduk di wilayah studi adalah Marapu. Marapu merupakan agama tradisional masyarakat asli Sumba. Marapu adalah suatu kepercayaan yang pada hakekatnya adalah proses pemujaan terhadap arwah-arwah leluhur (nenek moyang) sebagai perantara terhadap yang maha kuasa. Kepercayaan Marapu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, kematian/penarikan batu kubur, pembangunan rumah adat, syukuran, permohonan untuk panen berlimpah dan lain-lainnya.

Suku

Penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya pada umumnya adalah penduduk asli yang berasal dari tiga suku yaitu Suku Wewewa, Suku Kodi dan Suku Loura. Sebagian kecil pendatang yang telah menetap di Sumba Barat Daya telah berbaur dengan penduduk asli.

Di Desa Pero Konda, Pero Batang, Wainyapu dan Tana Mete suku mayoritas penduduknya adalah Kodi. Sementara itu, di Desa Letekonda suku mayoritas penduduk adalah Loura. Berdasarkan

sejarahinya, leluhur di Desa Pero Konda berasal dari Ende (Flores), seiring berjalannya waktu telah berbaur dengan penduduk asli yang bersuku Kodi.

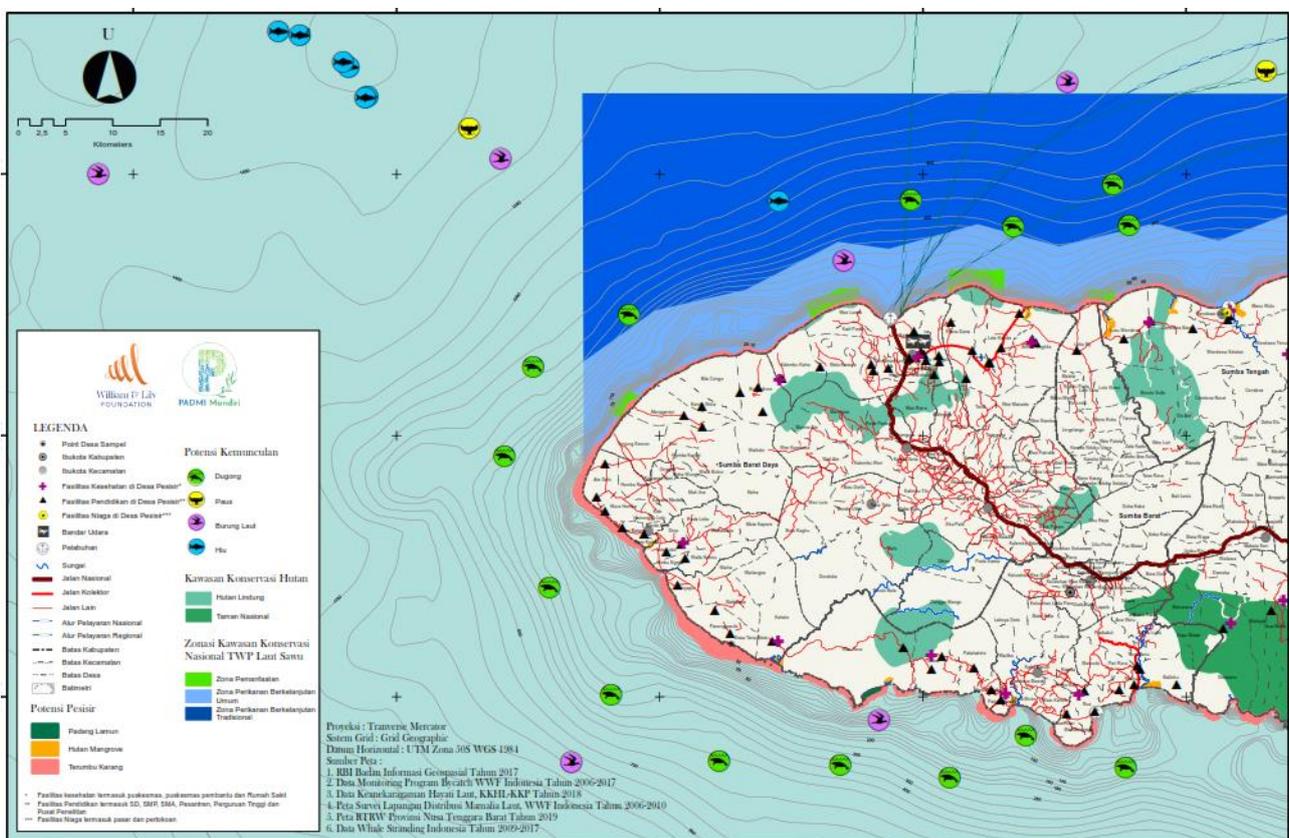
Budaya dan Tradisi

Pasola

Pesona atraksi budaya dan tradisi yang terkenal di wilayah studi salah satunya adalah Pasola. Pasola merupakan upacara ritual berkuda menyambut tahun baru sekaligus masa bercocok tanam yang melibatkan dua kelompok besar pasukan berkuda dan saling menyerang menggunakan senjata lembing kayu. Tradisi ini adalah tradisi perang persahabatan, tidak ada dendam meskipun lembing kayu mengenai penunggang kuda sampai terjatuh. Darah dari luka yang dialami oleh penunggang kuda pasola diyakini sebagai lambang kesuburan dan panen yang berlimpah.

Pasola dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dan Maret (awal musim tanam). Tanggal pelaksanaannya tidak bisa dipastikan tergantung doa dan komunikasi antara *Rato Adat* (tetua adat) dengan leluhur melalui ritual adat.

Di wilayah studi Desa Pero Batang dan Desa Wainyapu terdapat tempat pelaksanaan Pasola, yaitu lapangan pasola Bondo Kawango dan Lapangan Pasola Wainyapu. Selain ajang untuk menyambut pesta panen dan pergantian tahun, tradisi pasola merupakan sebagai acara silaturahmi dengan sanak saudara dan keluarga besar baik yang di kampung maupun yang datang dari luar kampung. Penuturan dari informan di Desa Pero Batang, selesai acara pasola jika ada orang yang singgah (meskipun tidak saling kenal) wajib dijamu makanan dan minuman oleh tuan rumah.



Gambar 2. Peta Potensi Pesisir Sumba Barat Daya

Tradisi "Pili Nyale"

Pili Nyale merupakan tradisi yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan Pasola. Tradisi ini ditandai dengan munculnya nyale (cacing laut) di pantai yang bertepatan dengan waktu Pasola, yaitu satu tahun sekali pada bulan Februari-Maret. Cacing nyale yang gemuk, sehat dan berwarna warni merupakan pertanda Dewa merestui acara pasola yang akan dilakukan serta pertanda hasil panen akan baik pada tahun tersebut. Di Kodi cacing nyale menjadi berkah bagi masyarakat yang mencarinya karena dalam 1 box nyale dapat dijual seharga dua juta rupiah, atau satu batok kelapa seharga Rp 5.000. Cacing nyale dapat diolah menjadi makanan lezat dan bergizi.

Pesta Woleka

Pesta Woleka adalah pesta adat yang merupakan wujud rasa syukur atas hasil panen atau capaian keberhasilan anggota keluarga. Secara sosial seseorang yang pernah melakukan pesta Woleka memiliki status sosial yang tinggi di mata masyarakat karena dapat menjamu banyak anggota masyarakat. Pesta woleka ini merupakan lambang kemakmuran atau kesuksesan.

Pesta adat Woleka di Kodi dilakukan bersama anggota masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan pesta, keluarga maupun tamu undangan yang hadir turut serta membawa hewan ternak berupa kerbau, sapi dan babi untuk diberikan kepada tuan pesta sebagai timbal balik menggantikan hewan yang pernah dibawa oleh penyelenggara pesta kepada para undangan. Begitu pula sebaliknya kelak pesta serupa, penyelenggara pesta kali ini akan membawa hewan persembahan untuk keluarga atau undangan. Hewan ternak yang dipersembahkan dalam jumlah banyak, bahkan sampai ratusan ekor jumlahnya. Hasil potongan potongan daging hewan yang disembelih ini dibagikan kepada semua tamu undangan pesta dan masyarakat lainnya.

Arisan Adat

Arisan adat adalah modal sosial yang dipertahankan masyarakat sampai saat ini. Arisan adat adalah solusi masyarakat dalam menghadapi masalah keuangan. Arisan adat biasanya dilakukan oleh seseorang yang sedang membutuhkan bantuan baik secara keuangan maupun barang.

Tuan rumah arisan adat akan mengundang kolega/kerabat/kenalannya untuk melakukan arisan adat. Besaran nominal atau jumlah barang yang diarisankan akan dicatat dan dikembalikan saat anggota arisan juga mengundang melakukan arisan adat. Biasanya arisan adat ini dilakukan pada saat kebutuhan besar rumah tangga misalnya membangun rumah maupun pembelian (mas kawin) anak.

Kumpul Tangan

Kumpul tangan juga merupakan modal sosial untuk mengatasi masalah ekonomi. Bila ada seseorang sedang membutuhkan bantuan, maka biasanya tuan rumah akan mengundang keluarga atau kerabat untuk melakukan kumpul tangan. Tuan rumah menyampaikan maksud, tujuan dan kebutuhan yang akan dibantu. Setelah menyampaikan maksud maka anggota keluarga akan berupaya membantu seiklasnya.

Penarikan Batu Kubur

Upacara penarikan batu kubur merupakan tradisi yang masih dipertahankan di Kodi sampai saat ini. Upacara penarikan batu alami untuk bangunan batu kubur ini disebut upacara Tarik batu kubur "Gheru Watu".

Prosesi penarikan batu kubur dilakukan secara tradisional (dengan tenaga manusia). Lamanya penarikan batu kubur bisa sehari-hari dan dilakukan sampai ratusan orang tergantung jarak dan besarnya batu kubur. Di wilayah studi tradisi penarikan batu kubur ini masih dilakukan di Desa Wainyapu.

Batu yang digunakan adalah batu alam yang diambil dari dekat pantai. Batu ini lalu dipotong berbentuk persegi. Dalam upacara penarikan batu kubur ini juga ada penyembelihan hewan, yang utama disembelih adalah kerbau dan babi. Setiap anggota keluarga yang sudah menikah akan menyumbang hewan untuk disembelih. Semakin banyak orang yg bergotong royong untuk melakukan upacara penarikan batu kubur, maka pihak keluarga akan merasa bangga dan meningkatkan status sosialnya.

Weri

Weri adalah semacam tanda bentuk larangan (pamali) yang memberikan tanda kepada orang yang melihat tanda ini agar tidak mengganggu atau memetik buah tanaman (tidak melakukan sesuatu) yang sedang di Weri. Weri sifatnya individual bukan kelompok maupun komunitas tertentu. Biasanya pemilik lahan memintakan Weri ke tokoh adat yang memang ahli dalam Weri. Weri pada umumnya dipasang pada tanaman yang bernilai ekonomi. Misalnya ada tanda Weri di pohon jambu mete atau pohon mangga, maka bagi yang melihat tanda tersebut dilarang untuk memanen atau mengambil buah jambu mete atau buah mangga tanpa ijin ke pemiliknya. Apabila ada yang melanggar Weri maka akan terjadi sesuatu kepada pelanggar ini, misalnya perutnya menjadi sakit (bengkak). Untuk menghilangkan sakit perut ini maka si pelanggar harus mengakui perbuatannya dan baru bisa dilepas mantra Werinya. Pada umumnya tanda Weri berupa anyaman alang alang atau daun kelapa atau air yang digantung pada tempat yang mudah terlihat.

Tata Kelola Adat Terkait Sumber Daya Pesisir dan Laut

Di desa-desa studi tidak teridentifikasi tata kelola adat/norma/aturan khusus dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Bentuk kearifan lokal terkait yang berlaku umumnya hanya berupa upacara adat (seperti pasola, tradisi pili nyale) yang berlangsung dalam jangka waktu pendek (1x per tahun) dan bersifat sosial untuk silaturahmi dan berdoa akan kesuksesan panen. Tidak ada pembatasan wilayah penangkapan dan klaim terhadap wilayah laut. Sumber daya laut dan pesisir bersifat *open access* sehingga semua orang dapat memanfaatkannya, termasuk nelayan dari desa atau wilayah lain. Aturan yang berlaku umumnya tidak tertulis, namun diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara umum, masyarakat di wilayah studi mengikuti peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah.

Minimnya tata kelola sumber daya laut secara adat merupakan hal yang umum terjadi di Nusa Tenggara Timur (Setyawan et al., 2017) dan di Indonesia secara umum, terutama di lokasi yang banyak mendapat pengaruh globalisasi/modernisasi, memiliki masyarakat yang majemuk (terutama masyarakat dari luar daerah) dan sangat bergantung dari sejarah tata kelola yang berlaku

sebelumnya. Tata kelola sumber daya laut secara adat masih banyak dipraktekkan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di antaranya di Maluku, Aceh, Bali, Lombok, dan Papua.

PROFIL SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Meski Sumba Barat Daya merupakan wilayah kepulauan dan memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi, hanya sebagian kecil masyarakat pesisir yang memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian utama. Umumnya, nelayan di Sumba Barat Daya adalah masyarakat yang bermukim di pesisir dan memiliki latar belakang keluarga melaut secara turun-temurun. Nelayan disini mencakup nelayan tangkap, pembudidaya rumput laut, dan garam, serta pengepul. Masyarakat lainnya memanfaatkan pesisir dan laut hanya untuk tujuan subsisten. Selain nelayan, terdapat beberapa jenis mata pencaharian lain yang terkait pesisir dan laut, meski proporsinya sangat rendah, yaitu pelaku pariwisata dan pemilik warung sembako.

Masyarakat Sumba Barat Daya, ataupun Nusa Tenggara Timur secara umum (Pusparini et al., 2020) menggantungkan perekonomian pada sektor agraris, karena memiliki sarana-prasarana pendukung dan akses pasar yang lebih baik, serta kuatnya dukungan dari pemerintah. Pemerintah memberikan stimulasi besar-besaran terhadap perkembangan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur melalui program swasembada pangan Upsus Pajale (Upaya Khusus: Padi, Jagung, Kedelai) dari tahun 2014-2017. Program ini makin didorong oleh Badan Pertanian (2016-2017) melalui intensifikasi perluasan ladang padi, jagung, dan kedelai serta pengenalan teknologi pertanian untuk efektivitas peningkatan produksi. Program ini berhasil meningkatkan luasan tanam dan produksi tanaman padi, jagung dan kedelai di wilayah Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan intensifikasi pertanian di wilayah ini berimplikasi pada peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan proporsi rumah tangga yang bekerja sebagai petani. Di Kabupaten Alor, tercatat terjadi penurunan proporsi buruh upahan, pengumpul hasil hutan, nelayan dan peningkatan proporsi petani, dan penurunan jumlah kapal semenjak program Upsus Pajale digenjut (Pusparini et al., 2020). Tidak diketahui apakah intensifikasi pertanian ini menimbulkan dampak negatif atau tidak karena ketiadaan data dan informasi. Namun, peralihan fokus ekonomi yang berorientasi pada pertanian mengisyaratkan sumber daya laut belum dimanfaatkan secara optimal.

Meski terjadi peningkatan ketahanan pangan dan akses pangan di provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum (Pusparini et al., 2020), masih ditemukan kasus gizi buruk dan stunting di beberapa desa studi, meski proporsinya tidak besar. Kasus ini terjadi umumnya disebabkan karena pola asuh dan terbatasnya pengetahuan orang tua mengenai kebutuhan gizi anak. Kasus gizi buruk dan stunting ini mengindikasikan persoalan kesejahteraan mendasar belum terpenuhi dengan baik.

PROFIL MATA PENCAHARIAN PESISIR

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa mata pencaharian masyarakat pesisir desa studi yang terkait erat dengan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk di antaranya adalah nelayan (nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolah garam dan pengepul hasil laut), pelaku pariwisata dan pemilik warung.

Nelayan

Pada survei ini tidak berhasil diperoleh data pasti jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Dari hasil wawancara hanya diperoleh data estimasi dalam bentuk persentase, yaitu sekitar 20%-100% dari rumah tangga yang bermukim di pesisir adalah nelayan. Data ini pun relatif kurang kuat, mengingat sangat mengandalkan ingatan dari narasumber, tanpa ada catatan tertulis.

Persentase paling banyak adalah di Desa Lete Konda yaitu sekitar 100% rumah tangga, atau seluruh rumah tangga pesisir di desa ini bekerja sebagai nelayan. Persentase terbanyak berikutnya adalah di Desa Pero Konda, yang diperkirakan sebanyak 70%-80% rumah tangga pesisir. Desa Wainyapu dan Tana Mete memiliki kisaran persentase yang mirip, yaitu sekitar 30%-50% rumah tangga pesisir, dan persentase paling sedikit adalah di Desa Pero Batang yaitu sekitar 20%. Estimasi persentase ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pesisir dan laut paling tinggi adalah di Desa Pro Konda dan Desa Lete Konda.

Selain jumlah nelayan yang relatif banyak di Desa Lete Konda dan Pero Konda, tingginya ketergantungan rumah tangga terhadap pesisir dan laut juga ditunjukkan oleh terbatasnya alternatif kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh rumah tangga di pesisir ini. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang memiliki pekerjaan sampingan berupa budidaya rumput laut, pengolah garam dan pengepul hasil laut. Sementara nelayan yang tidak memiliki sampingan, hanya mengandalkan pendapatan rumah tangga dari kegiatan penangkapan ikan.

Ketergantungan rumah tangga yang tinggi terhadap pesisir dan laut juga ditemukan di Desa Pero Konda. Alternatif mata pencaharian selain menangkap ikan memang relatif beragam namun masih terkesan tidak stabil dan hanya dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk menyelamatkan perekonomian pada saat gelombang besar. Pada umumnya nelayan memiliki pekerjaan sambilan berupa usaha dagang (hasil tenun, pakaian, perabotan rumah tangga), dan sebagian kecil nelayan memiliki sampingan bertani/berladang. Sementara itu masyarakat pesisir di Desa Wainyapu, Tana Mete, dan Pero Batang pada umumnya memiliki area kebun/ladang yang juga dikelola untuk menghasilkan pendapatan rumah tangga.

Pelaku Pariwisata

Beberapa penduduk desa, khususnya pemuda Desa Pero Konda, terlibat sebagai pelaku pariwisata berupa *guide*/pemandu wisata untuk menemani tamu-tamu berkunjung ke desa adat, pantai, atau tempat wisata lain.

Pemilik Warung Sembako

Di wilayah studi terdapat warung sembako. Keberadaan warung sembako ini mudah ditemui di setiap desa. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk memenuhi kebutuhan di warung sembako yang tersedia di setiap desa.

AKSES MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Di wilayah studi terdapat akses pasar mingguan. Desa-desa studi di wilayah Kodi mempunyai akses pasar untuk kebutuhan sehari-hari ke Pasar Dimukaka (Senin & Kamis), Pasar Waiha (Rabu & Sabtu),

Pasar Bondokodi (Rabu & Sabtu) dan Pasar Kori (Rabu & Sabtu). Sementara itu, penduduk Desa Lete Konda akses pasar terdekat adalah pasar di Desa Totok dan Desa Pogo Gena. Menurut informasi yang diperoleh, penduduk Desa Lete Konda lebih senang berbelanja kebutuhan pokok ke Pasar di Tambolaka.

Penduduk Desa Pero Konda dan Pero Batang lebih dekat ke pasar Bondokodi dengan hari pasaran Rabu dan Sabtu. Sementara itu penduduk Desa Wainyapu dan Desa Tana Mete lebih dekat ke Pasar Waiha dengan hari pasaran Rabu dan Sabtu. Selain pasar, akses kebutuhan sehari-hari juga dapat diakses melalui warung dan pedagang keliling yang ada di desa studi.

Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Masyarakat memiliki ketergantungan secara ekologi (perlindungan alam), sosial (sumber pangan dan arena sosial), ekonomi (sumber pendapatan rumah tangga), dan budaya (area pelaksanaan tradisi/budaya lokal) terhadap pemanfaatan sumber daya laut di pesisir setempat. Bentuk pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir meliputi penangkapan ikan dan biota lainnya, budidaya rumput laut, pengolahan garam, dan wisata pantai. Meski terbatas, masyarakat masih menerapkan tradisi adat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, misalnya tradisi “Pili Nyale” (penangkapan cacing laut) yang dilaksanakan hanya sekali setiap tahun pada Bulan Februari-Maret, tepatnya sehari sebelum pelaksanaan tradisi Pasola. Pemanfaatan sumber daya laut oleh masyarakat lokal di pesisir desa studi secara umum belum optimal karena adanya keterbatasan aset produksi dan keterampilan teknis yang dimiliki oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pemanfaatan terkonsentrasi di pesisir dan area terumbu karang.

KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Meski Sumba Barat Daya memiliki potensi laut yang tinggi, pengembangan sektor pesisir dan laut nyatanya masih sangat minim. Kegiatan penangkapan ikan yang berlangsung di pesisir desa studi umumnya merupakan kegiatan penangkapan dekat pantai, skala kecil dan tradisional. Keterbatasan keterampilan teknik penangkapan ikan, sarana prasarana, pasar, kelembagaan dan permodalan yang dilibatkan dalam kegiatan menyebabkan kegiatan penangkapan ikan di desa ini relatif belum optimal dan cenderung bersifat subsisten.

Kepemilikan aset produksi penangkapan di desa studi secara umum masih sangat terbatas. Pada umumnya nelayan di desa studi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan armada penangkapan. Misalnya nelayan di Desa Wainyapu dan Tana Mete, sebagian besar nelayan tidak menggunakan perahu. Jika pun ada nelayan yang telah menggunakan perahu, umumnya adalah jenis sampan (tanpa mesin). Berbeda pula dengan nelayan di Desa Pero Batang, dimana seluruh nelayan tidak memiliki aset perahu. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di desa ini seluruhnya adalah nelayan yang menumpang pada perahu nelayan lain sebagai anak buah kapal. Nelayan yang menjadi induk/tempat menumpang adalah nelayan dari Pero Konda. Hanya sebagian kecil nelayan yang memiliki armada dan alat penangkapan ikan, yaitu nelayan di Desa Pero Konda dan Lete Konda yang memang menjadikan kegiatan penangkapan ikan sebagai kegiatan ekonomi utama sumber pendapatan rumah tangga. Di kedua desa ini armada penangkapan ikan yang digunakan sudah dilengkapi dengan mesin motor tempel dengan kekuatan mesin rata-rata 5 PK (perahu di Pero Konda), dan rata-rata 15-24 PK (perahu di Lete Konda). Ukuran perahu yang digunakan rata-rata adalah kurang dari 1GT.

Sebagian besar masyarakat desa studi mengungkapkan bahwa mereka banyak mendapatkan keterampilan dalam menangkap ikan dari nelayan luar yang berkunjung dan mengajarkan teknik dasar. Untuk penangkapan cumi, masyarakat Desa Pero Konda mempelajari teknik penangkapan dari nelayan Bima yang berkunjung pada tahun 2000-an. Saat itu perahu nelayan Bima yang berisi muatan cumi sering singgah untuk bongkar muatan cumi dan membeli perbekalan. Kondisi ini menjadi awal interaksi sosial yang lebih intens antara nelayan Bima dengan nelayan Pero Konda yang berujung pada ketertarikan nelayan Pero Konda untuk turut memiliki keterampilan menangkap cumi. Ketertarikan ini ditindaklanjuti dengan cara belajar teknik penangkapan cumi secara langsung di perahu milik nelayan Bima. Setelah teknik penangkapan cumi dikuasai, beberapa masyarakat yang memiliki modal muncul sebagai pengepul yang kemudian membuka jaringan pasar cumi dengan pengepul besar di Sape-Bima, serta menjadi pemodal untuk nelayan Pero Konda. Relasi bisnis ini menciptakan permintaan cumi yang berkelanjutan hingga saat ini. Menurut masyarakat, usaha cumi ini menjadi penggerak perekonomian masyarakat nelayan yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Pero Konda. Kondisi ini yang menyebabkan nelayan Pero Konda menjadikan usaha penangkapan cumi sebagai sentra usaha penangkapan ikan. Nelayan juga melakukan penangkapan ikan dan biota lainnya, namun tidak begitu dikembangkan selayaknya penangkapan cumi yang telah memiliki pengepul sebagai pasar tetap.

Lain halnya dengan masyarakat pesisir di Lete Konda yang menjadikan pukot cincin sebagai sentra penangkapan utama. Keahlian ini pun dikuasai oleh masyarakat secara otodidak melalui hubungan sosial dengan nelayan dari Sape-Bima.

Beberapa masyarakat pesisir yang menggantungkan perekonomian rumah tangga pada sektor perikanan telah mencoba mengembangkan kegiatan pemanfaatan melalui inisiatif mandiri, seperti

halnya yang dilakukan oleh nelayan Pero Konda dan Lete Konda. Selain penangkapan ikan, beberapa masyarakat Lete Konda juga mengembangkan kegiatan budidaya rumput laut dan pengolahan garam. Walau masih sangat terbatas, namun kehadiran kegiatan ini mampu menjadi mata pencaharian alternatif penduduk yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian maupun wiraswasta (perdagangan). Kondisi ini juga berimplikasi pada kemampuan masyarakat nelayan dalam menerapkan strategi nafkah ganda.

Keterbatasan dalam pengembangan perikanan yang terjadi di Sumba Barat Daya merupakan hal yang juga terjadi di beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur, termasuk di Alor, Flores Timur dan Lembata (Pusparini et al., 2020). Keterbatasan pengembangan perikanan secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya termasuk minimnya pengetahuan dan keahlian nelayan untuk menangkap ikan, keterbatasan alat penangkap ikan, dan terbatasnya sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan (modal, sarana produksi, kelembagaan, dll). Di Sumba Barat Daya sendiri, keterbatasan ini dapat dipandang sebagai nilai positif karena perikanan yang berlangsung masih bersifat tradisional, belum intensif dan masif, dan dilakukan dalam skala kecil, sehingga tekanan perikanan di wilayah ini masih relatif rendah. Namun, situasi ini perlu di waspadai karena sudah terlihat adanya pemanfaatan sumber daya laut yang dilakukan oleh nelayan dari luar kabupaten, karena ketidakmampuan masyarakat Sumba Barat Daya dalam memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, karakteristik masyarakat yang mudah mempelajari dan mempraktekkan keahlian baru dari pihak lain (seperti contohnya dari nelayan lain) juga perlu dipandang implikasinya dari dua sisi. Hal ini bisa memberikan efek positif karena masyarakat pesisir memiliki daya serap yang tinggi, kemampuan inovasi dan keinginan kuat, sepanjang situasi memungkinkan dan mendukung, sehingga mereka memiliki resiliensi yang baik dalam menghadapi perubahan. Namun, hal ini juga bisa menjadi ancaman apabila keahlian, keterampilan dan pengetahuan yang diperkenalkan tidak sesuai dengan prinsip pemanfaatan keberlanjutan, misalnya pengenalan alat tangkap merusak lingkungan, sistem pemanfaatan yang merusak tanaman sosial setempat, dll.

ALAT PENANGKAP IKAN

Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan relatif bervariasi, dengan teknik operasional yang masih manual dan sangat tradisional. Jenis alat penangkapan yang umum digunakan oleh nelayan di desa studi adalah jenis pancing tangan, jaring cumi, jaring ikan, panah ikan, tombak ikan, serta pencapit dan pencungkil. Jenis alat ini disesuaikan dengan jenis target tangkapan yang ingin diperoleh. Secara umum, jenis alat tersebut ada di semua desa studi hanya saja konsentrasi jumlah penggunaan berbeda-beda.

Pancing

Pancing merupakan jenis alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan di seluruh desa studi. Jenis pancing yang digunakan adalah pancing dasar (bottom long line) yang dioperasikan dengan tangan (teknik ulur). Jenis alat pancing umumnya dioperasikan pada pagi-siang hari. Pada umumnya jenis pancing dioperasikan oleh nelayan secara individu. Rata-rata durasi penangkapan ikan dengan pancing dilakukan dalam waktu yang relatif singkat yaitu sekitar 2-4 jam (termasuk waktu perjalanan ke area *fishing ground*). *Fishing ground* jenis pancing umumnya adalah di perairan sekitar karang, dengan kedalaman <20 m pada jarak tempuh <4 mil.

Beberapa nelayan juga mengoperasikan alat pancing tanpa perahu, umumnya nelayan yang memancing ikan di pinggir pantai hanya dengan berdiri di pasir pantai maupun di batu karang. Jenis ikan yang umum diperoleh dengan alat pancing adalah jenis ikan karang meliputi kerapu, kakap, dan kuwe.

Dari hasil observasi dan wawancara, diperoleh informasi bahwa jumlah tangkapan per trip yang diperoleh dari operasional alat ini adalah berkisar antara 2 ekor – 10 ekor ikan berbagai jenis dan ukuran. Pendapatan rata-rata dapat mencapai 20 ribu-200 ribu rupiah per trip. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh nelayan adalah sekitar 20 ribu rupiah yaitu hanya untuk biaya pembelian bahan bakar (untuk nelayan yang menggunakan perahu bermesin), dan tanpa biaya untuk nelayan yang memancing tanpa perahu atau dengan perahu tanpa mesin. Dapat dikatakan bahwa produktivitas ini relatif stabil sepanjang tahun kecuali pada saat musim angin besar, dimana nelayan kerap menghentikan aktivitas menangkap ikan di laut untuk menghindari kecelakaan.

Jaring Insang

Selain dengan pancing, penangkapan ikan di desa studi juga dilakukan dengan jaring. Jenis jaring yang digunakan adalah jaring insang (*gill net*) pasif. Jenis jaring insang ini digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan di area pasang surut termasuk terumbu karang. Jaring ini umumnya digunakan oleh nelayan tanpa perahu di area Kodi. Jaring insang dioperasikan dengan cara dipasang pada saat surut, biasanya pada pukul 4 sore lalu diambil pada saat malam hari. Pengoperasian jaring dilakukan secara individu (hanya 1 orang).

Jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh adalah jenis ikan karang meliputi kakap, kerapu, julung-julung (ayam), dan ikan karang kecil lainnya. Umumnya, penjualan hasil tangkapan akan dilakukan jika hasilnya bagus (ikan ukuran besar atau jumlah tangkapan banyak). Jika hasil yang diperoleh hanya sedikit maka hasil tangkapan umumnya hanya untuk konsumsi keluarga. Selain ikan, terdapat pula jenis jaring insang yang digunakan untuk menangkap udang.

Pukat Cincin

Jenis pukat cincin umumnya digunakan oleh nelayan di Lete Konda dan hanya 1 unit perahu di Desa Pero Konda. Penangkapan ikan dengan alat jenis pukat cincin dilakukan dengan menggunakan perahu, umumnya dengan kekuatan mesin 15-24 PK. Pada umumnya dalam 1 unit armada pukat cincin terdiri atas 6 orang ABK. Area penangkapan ikan dengan pukat cincin adalah di perairan kedalaman 7-40 meter. Pada umumnya nelayan melakukan penangkapan ikan dengan 2 pilihan waktu, yaitu pada pagi-siang hari, atau pada siang-sore hari. Hasil tangkapan utama dari alat ini adalah ikan cendro (*Tylosurus sp.*) atau dalam bahasa lokal disebut ikan ayam, dan ikan julung-julung (Hemiramphidae) atau dalam bahasa lokal disebut ikan nimbe. Menurut informasi dari nelayan, jumlah ikan yang diperoleh tergantung pada musim, sekitar 100 ekor-2 ribu ekor ikan.

Hasil tangkapan tersebut dijual dalam satuan ekor, dengan harga per ekor berkisar antara 1.000-2.000 rupiah. Biaya operasional penangkapan ikan dengan pukat adalah sekitar 150-200 ribu rupiah yaitu hanya untuk kebutuhan bahan bakar sebanyak 10-20 liter per trip. Pada umumnya nelayan akan pulang dengan pendapatan bersih berkisar antara 50-100 ribu rupiah per trip.

Dapat dikatakan, operasional pukat cincin di daerah ini berlangsung sepanjang tahun, artinya ikan target tangkapan tersedia di perairan setiap saat hanya saja pada bulan angin besar (Desember-

Maret) hasil tangkapan cenderung sedikit dan terkadang nelayan memilih untuk tidak menangkap ikan ke laut untuk menghindari kecelakaan laut.

Jaring Cumi

Di desa-desa studi, jenis jaring cumi hanya dioperasikan oleh nelayan di Desa Pero Konda. Jaring ini dioperasikan oleh 3-4 orang ABK dalam 1 unit armada penangkapan. Penangkapan cumi dilakukan di area perairan kedalaman 10-40 meter pada jarak yang relatif dekat dengan pesisir (<4 mil). Pada umumnya nelayan menangkap cumi di pesisir Pero Konda, pesisir Pero Batang, pesisir Wainyapu, pesisir Tana Mete, pesisir Kahale, area Batu Gawang, Ghaura, dan Tanjung Karoso. Jenis alat ini dioperasikan dengan menggunakan 2 unit perahu berbeda ukuran.

Perahu ukuran besar (perahu utama) digunakan sebagai perahu induk yang mengangkut nelayan, alat tangkap, dan perahu kecil menuju *fishing ground*, menarik dan menampung hasil tangkapan serta mengangkut semua ABK, alat, dan hasil tangkapan ke darat. Perahu ini dilengkapi dengan 2 unit mesin motor tempel berkekuatan masing-masing 5,5 PK. Sementara itu, sampan kecil sebanyak 1 unit digunakan sebagai sampan pemikat cumi saat di *fishing ground*. Sampan ini digerakkan dengan dayung. Sampan kecil tersebut dilengkapi dengan beberapa unit lampu (umumnya 8-18 unit lampu dengan daya 19-40 watt per unit) sebagai alat bantu penangkapan. Penangkapan cumi hanya dilakukan pada malam hari, dan pada durasi bulan gelap bulan. Nelayan cumi mulai bersiap pada sore hari dan berangkat menuju *fishing ground* sekitar pukul 5 atau 6 sore, sehingga nelayan dapat tiba di *fishing ground* pada saat mulai gelap. Setelah tiba di *fishing ground*, nelayan menyalakan lampu untuk memikat cumi mendekati perahu kurang lebih selama 30 menit. Setelah cumi mendekat, sampan dengan lampu lalu diturunkan untuk menggiring ikan menjauhi perahu induk disertai dengan pergerakan jaring dengan melingkari gerombolan cumi tersebut, setelah jaring melingkar selanjutnya ditarik dan dinaikkan ke perahu besar untuk diturunkan hasilnya.

Jika hasil tangkapan kurang memadai di *fishing ground* pertama, nelayan akan berpindah mencari *fishing ground* lainnya, dan mengulangi proses penangkapan dengan cara yang sama. Pada musim cumi, yaitu kisaran Bulan Mei hingga awal Desember, jumlah tarik jaring (*hauling*) yang dilakukan mencapai 15 kali per trip dengan hasil tangkapan dapat mencapai 500 kg per trip, sedangkan pada bulan tidak musim (saat survei ini dilakukan), rata-rata hasil tangkapan per trip adalah 10-20 kg. Harga jual cumi per kg berkisar antara 17 ribu-20 ribu rupiah per kg di tingkat nelayan. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh nelayan cumi rata-rata adalah sekitar 250-300 ribu rupiah. Biaya ini terdiri atas biaya BBM sekitar 200 ribu yaitu untuk kebutuhan 20 liter bensin seharga 10 ribu per liter, sisanya adalah biaya ransum (beras, sayur, rokok, lauk). Pada umumnya pendapatan yang dibawa pulang oleh ABK nelayan cumi adalah sekitar 3 juta per orang untuk satu musim. Satu musim adalah 1 periode bulan gelap yang merupakan periode penangkapan cumi, berkisar antara 10-12 hari gelap bulan.

Alat Tangkap Lainnya (Panah, Tombak, Pencapit)

Jenis penangkapan ikan dengan panah masih banyak dilakukan oleh nelayan di desa studi. Penangkapan dengan jenis panah mengharuskan nelayan untuk menyelam ke bawah laut dan berjalan di atas dasar laut termasuk terumbu karang. Secara umum, teknik yang digunakan oleh nelayan masih sangat tradisional dan tanpa alat bantu pernafasan. Nelayan hanya menggunakan alat bantu berupa kaca mata yang dibuat sendiri dari bahan alam yang tersedia. Demikian pula

dengan panah (alat penangkapan) yang dirakit sendiri dengan alat seadanya. Penguasaan teknik ini diperoleh secara otodidak dan turun-temurun. Keterbatasan modal kegiatan dan aset utama penangkapan menyebabkan nelayan masih banyak yang menggunakan teknik penangkapan dengan panah.

Area penangkapan ikan yang dituju adalah area pesisir, terumbu karang, hingga perairan yang berada agak ke tengah dan relatif dalam (mencapai 30-40 meter). Nelayan menangkap ikan dengan panah pada pagi-siang hari, atau siang-sore hari. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh adalah berbagai jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, bobara, maupun ikan dasar lainnya termasuk ikan pari.

Terdapat pula alat penangkap ikan jenis tombak. Jenis tombak dioperasikan di perairan pesisir dan karang yang tidak terlalu dalam (kisaran 1 meter). Alat digunakan dengan cara berjalan di perairan, lalu menombak ikan target. Hasil tangkapan yang diperoleh meliputi gurita, kepiting, dan ikan karang. Jika hasil tangkapan memadai (banyak), maka hasil tangkapan tersebut dijual, dan jika yang diperoleh hanya sedikit maka hasil tangkapan hanya akan dikonsumsi untuk keluarga.

Jenis alat tangkap lainnya adalah jenis pencapit dan pencongkel yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap biota laut yang menempel di batu karang, seperti jenis siput, kerang, abalone (mata 7) dan gurita. Jenis alat ini dioperasikan dengan tangan, dan dengan cara berjalan di atas dasar perairan termasuk di area terumbu karang dan karang. Sama dengan jenis alat tradisional lainnya, teknik ini dikuasai secara otodidak dan turun-temurun. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan, menyebabkan teknik ini masih digemari oleh nelayan. Hanya saja, pada operasionalnya teknik ini kerap menggunakan alat bantu pencongkel karang berupa linggis maupun alat lainnya. Kondisi ini semakin meningkatkan potensi kerusakan terumbu karang akibat terinjak oleh nelayan maupun tercongkel saat penangkapan mengingat kondisi ini berlangsung secara rutin dan dalam frekuensi sering. Hasil tangkapan yang diperoleh umumnya dijual (jika banyak), dan dikonsumsi keluarga jika sedikit. Khusus untuk abalone, sudah terdapat pengepul tetap yang siap membeli hasil tangkapan abalone yang diperoleh nelayan. Harga abalone terbilang sangat tinggi, yaitu sekitar 50 ribu rupiah per kg di tingkat nelayan.

PEMASARAN HASIL TANGKAPAN

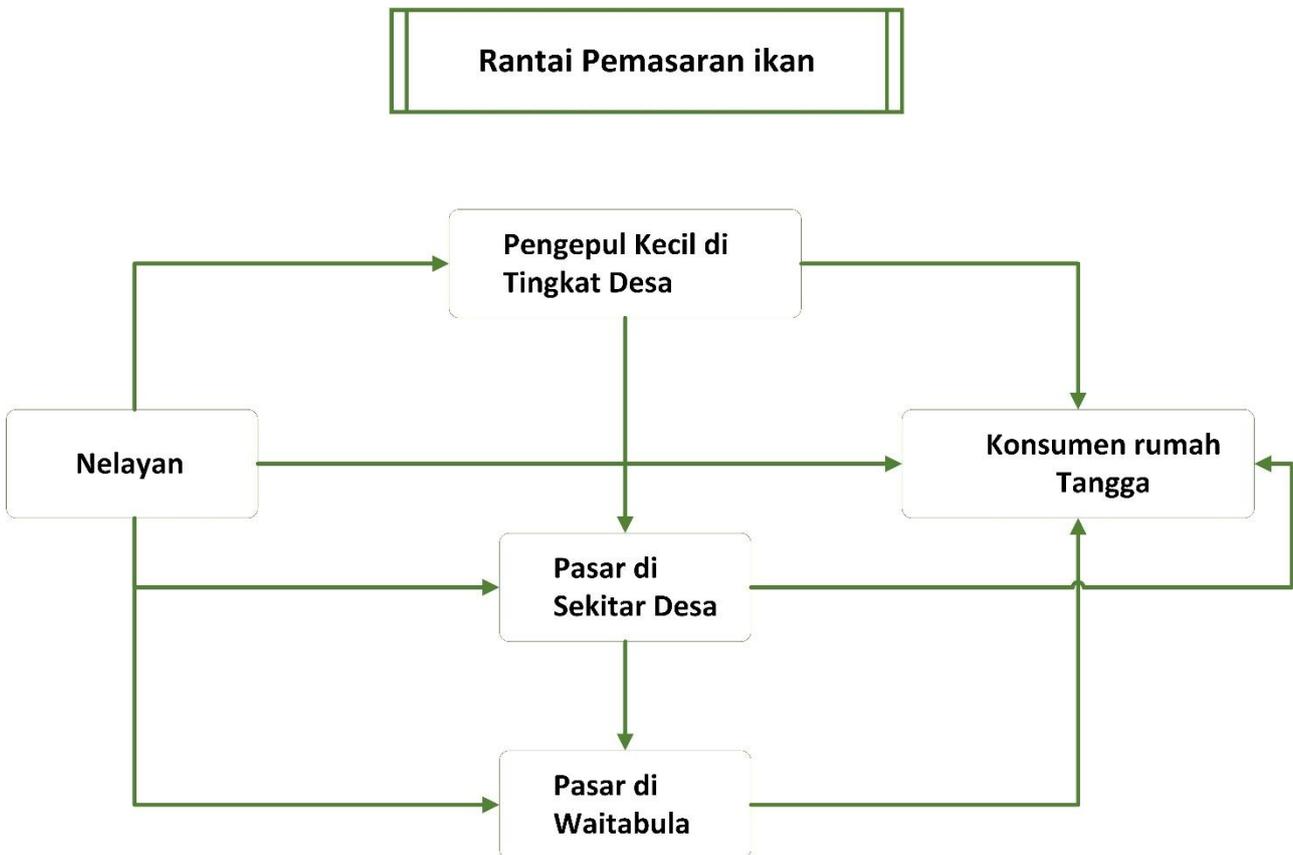
Pemasaran Ikan

Pemasaran hasil tangkapan ikan di desa studi relatif terbatas (**Gambar 3**). Secara umum di desa studi belum tersedia pasar khusus untuk menampung hasil tangkapan berupa ikan dari jenis pancing, jaring, panah, maupun tombak. Sehingga penjualan ikan hasil tangkapan umumnya dilakukan dengan cara menjual ke rumah-rumah penduduk di kampung setempat, atau menjual di pasar umum yang diselenggarakan hanya setiap hari Rabu dan Sabtu.

Hanya nelayan yang memiliki kulkas penyimpanan yang dapat melakukan penjualan ikan di pasar umum tersebut. Menurut nelayan, penjualan ikan di pasar cenderung memberikan harga yang lebih mahal karena banyak pembeli dibandingkan dengan menjual keliling (rumah penduduk). Terlebih untuk ikan dalam ukuran besar, nelayan yang memiliki penyimpanan beku akan lebih memilih menunggu hari pasaran tiba demi mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Sementara itu, ikan hasil tangkapan dari alat pukat cincin di Lete Konda umumnya dijual kepada penyambang/penyambar/pengepul yang datang ke nelayan. Penyambang ini umumnya adalah orang lokal atau orang luar desa yang berprofesi sebagai pembeli ikan dalam jumlah besar.

Penyambang akan membeli ikan yang diperoleh nelayan dengan cara menjemput ikan tersebut ke pendaratan lalu menjualnya keliling kampung dengan kendaraan roda dua yang dilengkapi dengan boks ikan. Jika ikan yang diperoleh dalam jumlah banyak, pengepul akan menjual ikan ini hingga ke kampung tetangga, maupun ke pasar yang ada di kota.

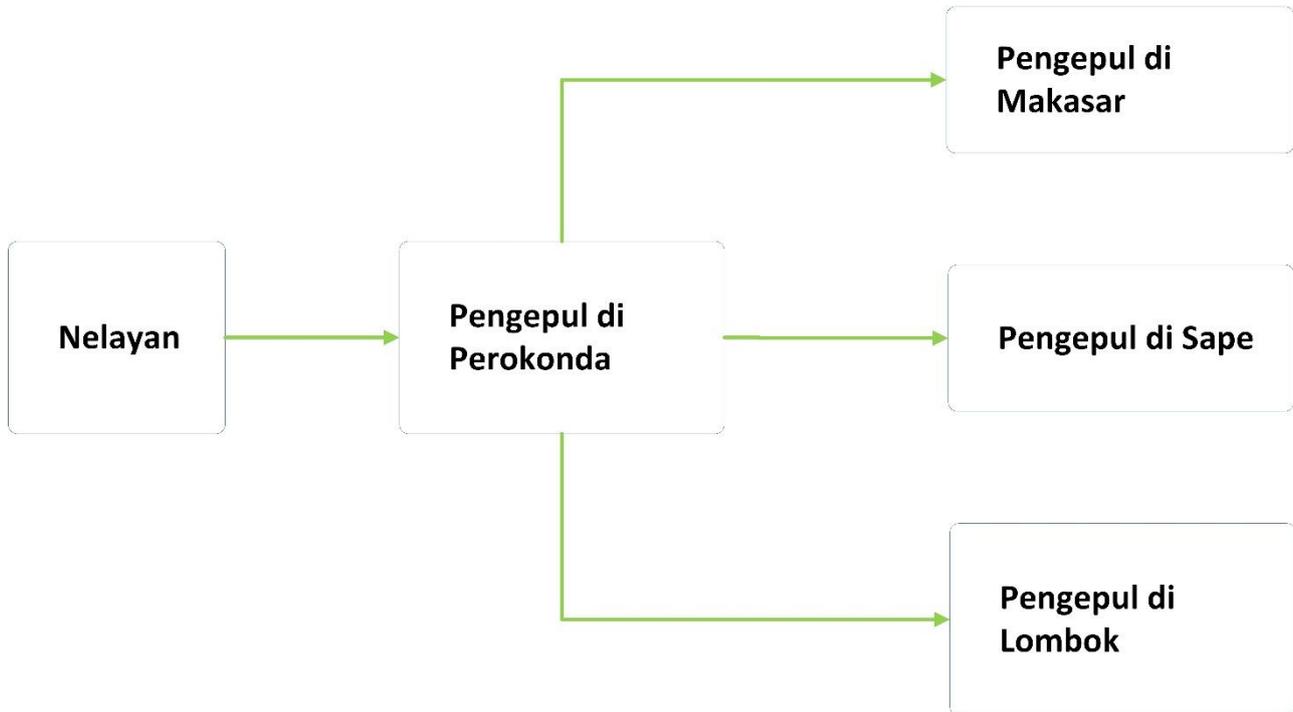


Gambar 3. Rantai pemasaran ikan hasil tangkapan

Pemasaran Abalone

Abalone merupakan jenis siput laut dengan nilai ekonomi yang relatif tinggi, kurang lebih 50 ribu rupiah per kg di tingkat nelayan. Pemasaran abalone relatif berbeda dibandingkan dengan jenis ikan maupun biota laut lainnya (**Gambar 4**). Pada abalone, pengepul diharuskan untuk melakukan perlakuan khusus pasca abalone diterima dari nelayan. Perlakuan tersebut berupa pemisahan dan pembersihan daging abalone dari cangkangnya. Menurut salah satu pengepul abalone di Desa Pero Konda (Bapak Eldim), penanganan pasca tangkap yang relatif rumit menyebabkan tidak banyak pihak yang mau menjadi pengepul abalone. Usaha ini menuntut kepemilikan modal yang tinggi mengingat harga beli abalone di tingkat nelayan relatif tinggi. Bapak Eldim membeli abalone dari nelayan di area Kodi, terutama Pero Konda. Abalone tersebut selanjutnya dibersihkan dan dijual ke luar daerah (Bima, Lombok, Makassar).

Rantai Pemasaran Abalone (Mata 7)



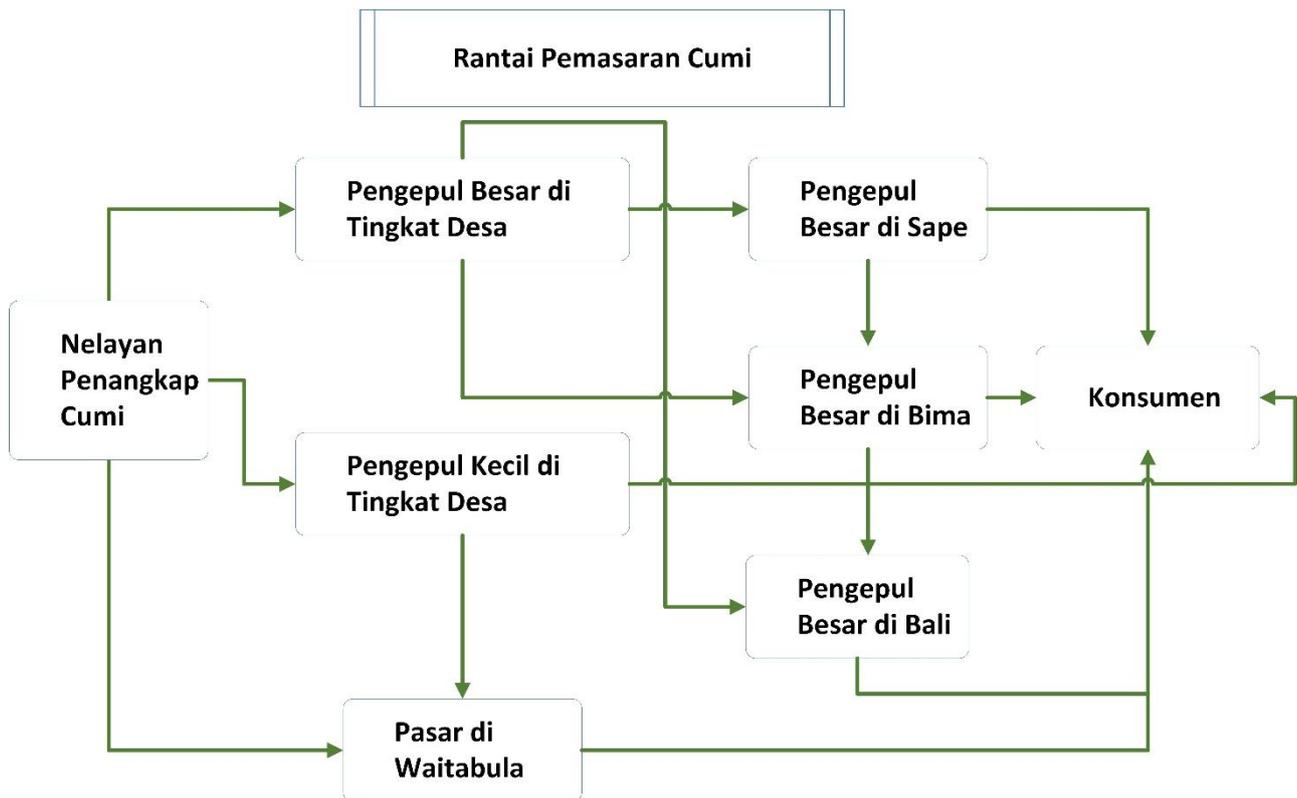
Gambar 4. Rantai pemasaran abalone (mata 7) di Desa Pero Konda

Pemasaran Cumi

Cumi merupakan hasil tangkap andalan nelayan di Desa Pero Konda. Pasar hasil tangkapan berupa cumi relatif lebih baik dibandingkan dengan jenis tangkapan lainnya. Komoditas ini telah memiliki pengepul khusus yang akan membeli cumi terutama pada saat musim cumi telah tiba. Di Desa Pero Konda terdapat beberapa pengepul tingkat desa dengan jaringan bisnis yang cukup luas. Selain sebagai pengepul, beberapa pengepul ini juga berperan sebagai pemodal dari beberapa nelayan cumi di Desa Pero Konda. Bahkan ada juga pengepul yang memiliki armada penangkapan cumi yang dioperasikan oleh nelayan setempat.

Terdapat 3 jalur perdagangan cumi, yaitu dari nelayan pengepul kecil maupun pengepul besar di tingkat desa, atau dari nelayan langsung ke pasar di Waitabula (**Gambar 5**). Beberapa pengepul juga merupakan istri nelayan cumi. Dari seluruh jalur tersebut, jalur yang umum ditempuh oleh nelayan adalah menjual hasil tangkapan cumi kepada pengepul besar di tingkat desa untuk kemudian diteruskan pada rantai penjualan dari pengepul besar ke pengepul kedua di Sape, Bima, dan Bali. Dari pengepul ini cumi kemudian didistribusikan kepada pihak konsumen baik rumah tangga maupun perusahaan.

Sementara itu, nelayan yang istrinya juga berprofesi sebagai pengepul akan menggunakan jalur pemasaran langsung ke pasar Waitabula. Pengepul ini juga membeli cumi dari pihak lain untuk kemudian dikirim sekaligus dengan hasil tangkapan yang diperoleh oleh suami. Pada saat musim puncak cumi tiba, kerap terjadi banjir cumi yang belum tertampung secara optimal oleh para pengepul yang ada di tingkat desa. Kondisi ini berdampak pada penurunan harga cumi secara drastis. Ketiadaan sarana penyimpanan beku ataupun pengolahan dalam bentuk lain relatif menyulitkan nelayan ketika musim puncak cumi tiba.



Gambar 5. Rantai pemasaran cumi

Kendala kegiatan penangkapan ikan dan biota lainnya

Nelayan menyebutkan beberapa faktor kendala yang dihadapi dari kegiatan penangkapan ini, yaitu kendala sarana prasarana (baik dari aset perahu, alat tangkap, penyimpanan beku, dan pelabuhan/darmaga untuk tambat perahu), kendala terkait dengan perolehan BBM, kendala perolehan es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, kendala terkait dengan penguasaan teknik penangkapan, serta keterbatasan pasar hasil tangkapan.

Sarana-prasarana utama dan pendukung kegiatan penangkapan ikan di desa studi masih sangat terbatas. Nelayan pada umumnya menggunakan alat penangkapan yang dibuat sendiri dengan materi seadanya dan sebagian besar nelayan tidak memiliki perahu maupun sampan. Keterbatasan modal merupakan alasan utama dari kondisi ini. Selain itu, nelayan juga tidak memiliki lembaga keuangan yang dapat dijadikan sumber modal kegiatan, sehingga saat ini kegiatan nelayan masih sangat terbatas. Hanya nelayan yang memiliki pengepul yang dapat mengakses permodalan, namun permodalan inipun lebih pada bentuk pemberian alat dan perahu untuk kemudian dioperasikan, dimana hasilnya dijual kepada pengepul tersebut.

Sarana produksi yang juga sangat dibutuhkan tetapi belum tersedia adalah terkait dengan penyimpanan sekaligus pembeku. Pada kasus hasil tangkapan berupa cumi, umumnya pengepul membawa cumi ke kota dengan menggunakan tong ikan kapasitas 7 kg per tong. Untuk menjaga kualitas cumi, umumnya nelayan menggunakan batu es rumahan yang berukuran kecil. Kondisi ini tentu kurang optimal untuk menjaga kualitas cumi hingga tiba ke tujuan pemasaran. Proses transportasi cumi umumnya menggunakan transportasi umum berupa minibus.

Selain aset utama, nelayan juga tidak memiliki darmaga tambat perahu. Darmaga hanya dimiliki oleh Desa Pero Konda. Sementara keempat desa studi lainnya pada umumnya menambatkan

perahu di pasir pantai sekitar mangrove. Pada kasus di Desa Lete Konda, nelayan harus berjalan pada jarak yang sangat jauh dari posisi sandar perahu ke pantai dengan membawa hasil tangkapan ikan.

KEGIATAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Kegiatan budidaya laut yang dikembangkan oleh masyarakat di desa studi adalah budidaya rumput laut. Budidaya ini dikembangkan oleh masyarakat di Desa Lete Konda (Katewel), Kecamatan Loura. Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah *Eucheuma cottonii*. Budidaya rumput laut di desa ini dikembangkan secara individu, dengan sumber modal pribadi.

Budidaya rumput laut dikembangkan di perairan pesisir di area pasang surut. Teknik budidaya yang digunakan adalah teknik rawai tali, dengan rata-rata panjang tali per unit rawai berkisar antara 30-50 meter. Rawai tali dibentangkan dengan patok di setiap ujung tali, patok tersebut ditancapkan di dasar perairan. Rata-rata 1 pemilik hamparan budidaya memasang 20-40 bentang tali. Petani budidaya rumput laut telah memiliki kesepakatan bersama bahwa hamparan yang telah ditanami rumput laut, tidak dapat lagi digunakan/ditanami oleh pihak lain.

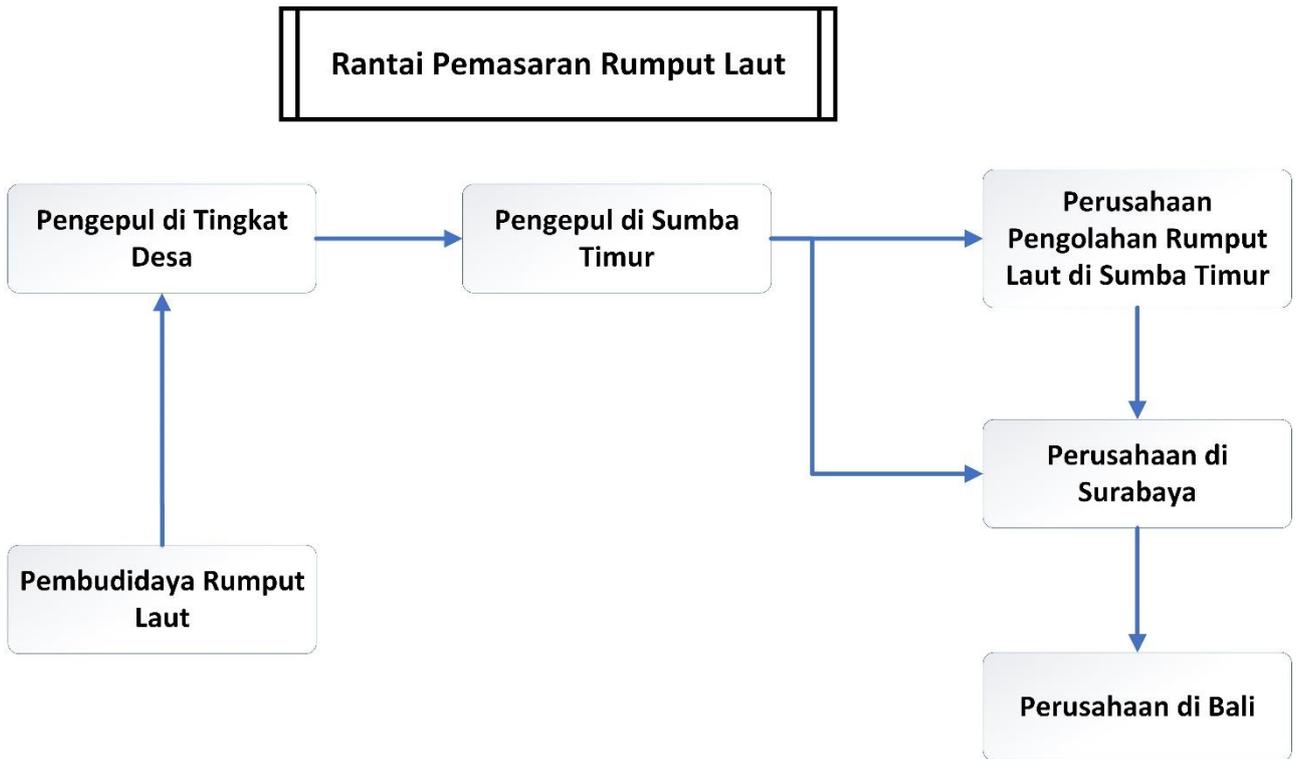
Menurut hasil wawancara, produktivitas rumput laut yang dikembangkan di desa ini relatif cukup baik. Pada umumnya, untuk panjang tali 30 m, petani rumput laut akan menanam sebanyak 1 karung bibit rumput laut. Bibit tersebut diikat pada tali dengan jeda jarak 1 jengkal. Bibit sebanyak 1 karung yang sudah dipasang pada tali ditanam selama 3-4 minggu, dengan hasil panen rata-rata mencapai 6-8 karung rumput laut. Rumput laut dijual dalam bentuk kering dengan harga 14 ribu rupiah per kg, dengan perbandingan kering dan basah adalah 1 kg: 10 kg. Penjualan rumput laut kering (**Gambar 6**) dilakukan kepada pengepul yang ada di Desa Lete Konda. Dari pengepul di tingkat desa, rumput laut ini kemudian dijual ke pengepul yang ada di Sumba Timur lalu pengepul besar di Sumba Timur dan Surabaya. Informasi lebih lanjut, dari pengepul di Sumba Timur dan Surabaya, rumput laut tersebut dijual ke pihak perusahaan pengolahan rumput laut yang ada di Sumba Timur, Surabaya, dan Bali.

Kendala kegiatan budidaya rumput laut

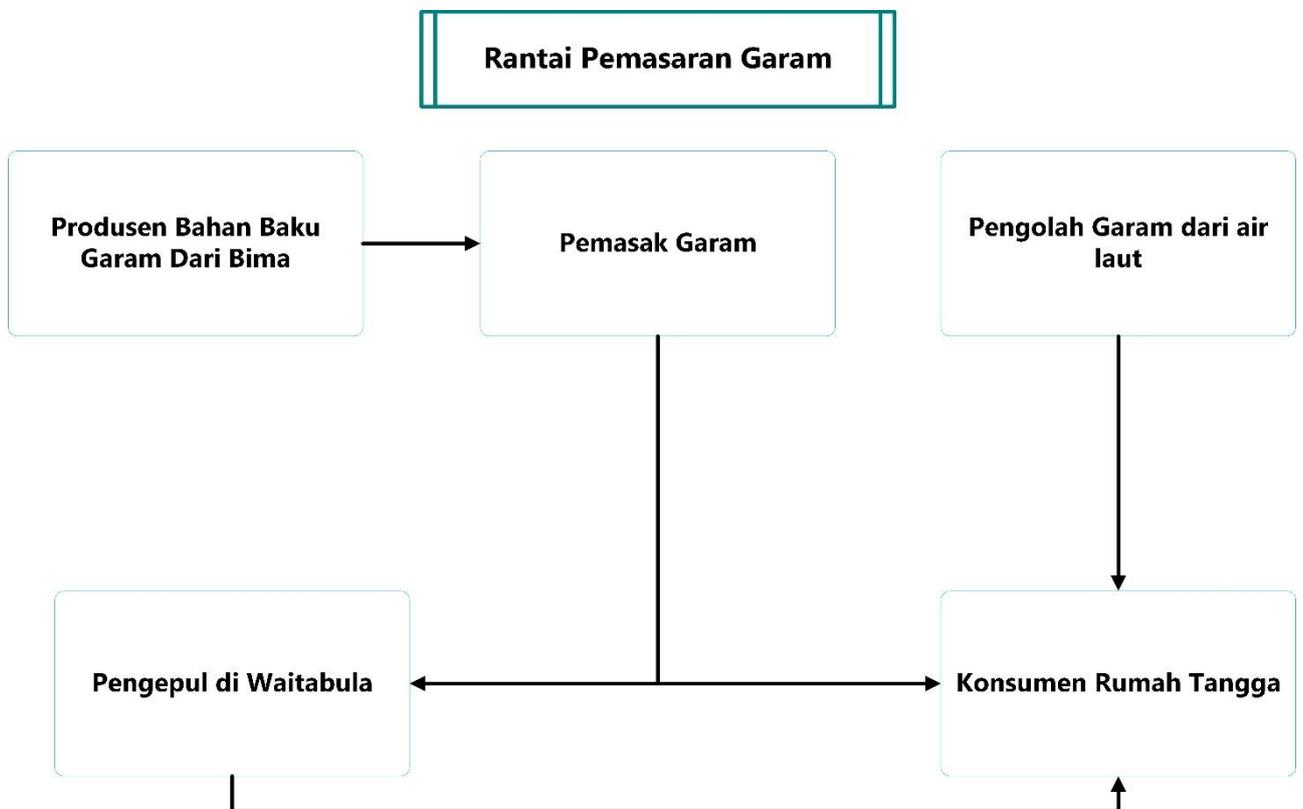
Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dari kegiatan budidaya rumput laut ini adalah permodalan yang terbatas, teknik dan modal untuk penjemuran rumput laut pasca panen, serangan hama penyakit, persaingan dengan penyu, serta area budidaya yang semakin sempit.

PENGOLAHAN GARAM

Kegiatan pengolahan garam juga menjadi salah satu mata pencaharian sebagian kecil masyarakat di masing-masing desa studi. Pengolahan garam ditemukan di Desa Lete Konda, Wainyapu, dan Tana Mete. Pengolahan garam ini ditekuni oleh sebagian kecil masyarakat <10% rumah tangga pesisir. Kendatipun hanya sebagian kecil, namun pengolahan garam ini telah dianggap sebagai pekerjaan turun temurun yang ditekuni oleh masyarakat di desa ini, khususnya kaum perempuan istri nelayan.



Gambar 6. Rantai pemasaran rumput laut hasil budidaya di Desa Lete Konda



Gambar 7. Rantai pemasaran garam

Pengolahan garam dilakukan di rumah garam khusus. Peralatan dan perlengkapan utama rumah/kemah garam ini adalah tungku pemasak garam, alat penyaring garam, dan tempat garam yang dihasilkan. Secara umum teknik pengolahan garam di seluruh desa adalah sama, yaitu berupa pemasakan garam menjadi garam dapur (tanpa yodium). Hanya saja terdapat sedikit perbedaan antara pengolahan garam di Lete Konda dengan di Wainyapu dan Tana Mete. Perbedaan ini terletak pada sumber bahan baku garam. Pada pengolahan garam di Desa Lete Konda, bahan baku garam berupa garam kasar yang berasal dari Bima yang kemudian diolah kembali dengan cara penyaringan dan pemasakan sehingga menjadi garam dapur (tanpa yodium).

Sementara itu, pada pengolahan garam yang dilakukan di Desa Wainyapu dan Tana Mete bahan baku garam adalah dari hasil laut setempat. Air laut diambil dan dimasak selama beberapa jam sehingga kemudian diperoleh garam. Garam yang dihasilkan berupa garam dapur tanpa yodium. Garam ini dipasarkan di kampung dan pasar lokal. Produktivitas ekonomi dari pengolahan garam ini relatif tidak banyak, namun pekerjaan ini telah menjadi sumber pendapatan utama kedua setelah penangkapan ikan. Pada umumnya pekerjaan pengolahan garam merupakan pekerjaan sambilan tetap kaum perempuan istri nelayan. Menurut informan, 1 karung garam kasar (bahan baku seharga 70 ribu) setelah proses pengolahan dapat menghasilkan 1,5 karung garam dapur dengan harga 160-180 ribu rupiah. Nilai ini masih harus dikurangi biaya kayu bakar dan transportasi yang dikeluarkan.

Kendala Kegiatan Pengolahan Garam

Menurut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, beberapa kendala kegiatan pengolahan garam yang saat ini dihadapi oleh masyarakat. Kendala tersebut meliputi permodalan, dan kendala teknis terutama ketika musim hujan, meliputi kesulitan memperoleh kayu bakar, harga garam bahan baku yang lebih mahal, kesulitan menaikkan air laut ke tungku masak karena saat ini seluruh kegiatan ini dilakukan secara manual, kendala lainnya adalah terkait dengan teknik pemberian yodium pada garam yang belum dikuasai oleh para pengolah.

PENGEPUL HASIL LAUT

Mata pencaharian lainnya yang berkaitan dengan pesisir dan sumber daya laut yang ditekuni oleh masyarakat di desa studi adalah pekerjaan sebagai pengepul hasil laut. Pengepul hasil laut ditemukan di Desa Pero Konda yaitu pengepul ikan, abalone, dan cumi, sementara di Desa Lete Konda yaitu pengepul ikan dan rumput laut. Sedangkan di Desa Pero Batang, Wainyapu, dan Tana Mete tidak ditemukan adanya pengepul hasil laut. Kendala yang dihadapi oleh pengepul ikan, abalone, dan cumi adalah terkait dengan transportasi hasil laut yang relatif jauh namun tidak didukung oleh penyimpanan beku yang dapat mempertahankan kualitas produk. Berbeda lagi dengan pengepul rumput laut, yang mengeluhkan tingkat kadar air rumput laut kering yang diterima dari nelayan. Menurut pengepul, terkadang kadar air masih tinggi serta rumput laut yang tidak terlalu bersih menjadi kendala dari usaha perdagangan rumput laut.

KEGIATAN PARIWISATA

Di desa studi sarana pendukung pariwisata hanya terdapat di Desa Pero Konda. Sarana pendukung pariwisata di Desa Pero Konda berupa sarana akomodasi homestay. Terdapat dua buah *homestay* di Desa Pero. Tamu *homestay* di Desa Pero Konda ini berasal dari wisatawan dalam negeri dan

wisatawan mancanegara. Berdasarkan observasi lapangan, saat ini sedang dibangun dua buah vila (rumah sewa) dekat Pantai Pero oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Pero Konda. Pengelolaan pariwisata di Desa Pero Konda sudah mulai baik. Objek wisata Pantai Pero dikelola oleh Bumdes. Sudah ada redistribusi wisata bagi wisatawan dan kendaraan (roda 4 dan roda 2) yang masuk ke Pantai Pero.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kunjungan wisatawan ke Pantai Pero pada Hari Sabtu dan Minggu sudah dikenakan biaya retribusi. Sarana pendukung pariwisata seperti warung makan belum tersedia di wilayah studi. Menurut penuturan dari salah seorang *guide* wisata di kabupaten Sumba Barat Daya, biasanya untuk konsumsi tamu wisatawan disiapkan dengan membawa makanan dari Tambolaka. Ada kerjasama antara pemandu wisata dari Tambolaka dengan pemuda/penduduk lokal (desa studi) untuk mengantar tamu ke Kampung Adat, menemani ke pantai-pantai atau tempat wisata lainnya.

PARTISIPASI DAN ADAPTASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PERIKANAN

Secara umum, masyarakat pesisir Sumba Barat Daya memiliki tingkat antusias, partisipasi, dan adaptasi yang sangat baik, namun masih terkendala dengan kapasitas diri termasuk rasa percaya diri. Antusias yang baik ditunjukkan oleh keingintahuan dan motivasi yang besar yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan rencana pengembangan pesisir baik itu perikanan tangkap, budidaya laut, maupun pariwisata bahari. Misalnya ketertarikan nelayan untuk mempelajari teknik penangkapan dengan rumpon. Nelayan mempelajari sendiri melalui internet, maupun bertanya kepada pihak lain, lalu mencoba mempraktikkan penangkapan ikan dengan rumpon, meskipun terbilang belum berhasil namun nelayan tetap berusaha mencari informasi sebisa mungkin untuk dapat memperbaikinya. Partisipasi yang tinggi ditunjukkan oleh keinginan masyarakat melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pesisir, misalnya mengikuti program pemberdayaan yang pernah diselenggarakan, maupun pertemuan-pertemuan yang dikhususkan untuk membahas pengembangan pesisir. Adaptasi yang baik ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam melakukan adaptasi sosial termasuk dalam mengadopsi teknologi penangkapan yang pernah dilihat, contohnya pada nelayan Pero Konda yang dengan antusias dan inisiatif mandiri ingin mempelajari teknik penangkapan cumi, dan mampu beradaptasi serta mengadopsi teknik tersebut dengan baik. Keberhasilan adopsi teknik ini kemudian disertai dengan kemampuan adaptasi sosial masyarakat dalam implementasi berbagai atribut terkait dengan usaha penangkapan cumi terbukti mampu menjadikan penangkapan cumi sebagai usaha ekonomi andalan dan berlanjut hingga saat ini.

Penguasaan Aset Penghidupan

Penguasaan aset alam di desa studi telah dimanfaatkan sebagai modal penghidupan oleh masyarakat pesisir setempat, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan aset manusia khususnya terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam teknik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan laut. Pengembangan aset alam pesisir dan laut juga dihadapkan pada lemahnya penguasaan aset finansial. Penguasaan aset fisik menunjukkan kondisi yang relatif baik, namun secara spesifik belum tersedia sarana produksi perikanan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola aset alam pesisir yang dimiliki. Masyarakat memiliki modal sosial yang cukup kuat dan dapat dijadikan sebagai solusi terkait dengan persoalan tertentu yang terjadi di masyarakat. Hanya saja, modal sosial yang dimiliki belum dapat mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk menjadi lebih optimal mengingat tidak adanya tata kelola adat, kelompok masyarakat, maupun organisasi yang secara khusus terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di desa studi.

PENGUASAAN ASET PENGHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR

Penguasaan aset penghidupan masyarakat menggambarkan kemampuan/akses/ kepemilikan masyarakat atas aset/modal penghidupan hingga saat ini. Penguasaan aset diukur dari lima aset dasar dan penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan penghidupan lestari. Kelima aset tersebut meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, fisik, dan sosial.

Aset Alam mencakup segala kekayaan sumber daya alam pesisir dan laut yang terdapat di pesisir desa studi. Modal ini dapat berupa panorama pantai, keberadaan ekologi penting, biota laut (ikan dan jenis biota lainnya), dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat baik secara langsung berkontribusi pada pendapatan rumah tangga maupun manfaat dalam bentuk nilai sosial lainnya (rekreasi, pangan dan kesehatan), maupun manfaat perlindungan alami.

Aset Manusia mencakup sumber daya manusia termasuk dalam kategori ini adalah pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan manusia yang sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan. Modal manusia memegang peran yang sangat penting dan menentukan kemampuan manusia dalam upaya memanfaatkan dan mengelola modal kehidupan lainnya (alam, finansial, fisik, dan sosial) secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya.

Aset Finansial mencakup modal keuangan/dana yang dimiliki masyarakat meliputi penghasilan, tabungan, dan hutang piutang. Penghasilan merupakan modal dana yang dimiliki dalam bentuk pendapatan rutin, pendapatan sampingan, termasuk juga dana pensiun, maupun pemberian dari pihak lain (pemberian dari keluarga maupun santunan dari pihak lain). Tabungan merupakan persediaan dana yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat digunakan pada waktu tertentu sehingga tidak tergantung pada pihak lain. Tabungan ini dapat dalam bentuk tabungan di bank, deposito, arisan, maupun tabungan di celengan. Selain penghasilan dan tabungan, modal dana lainnya adalah hutang piutang yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupan.

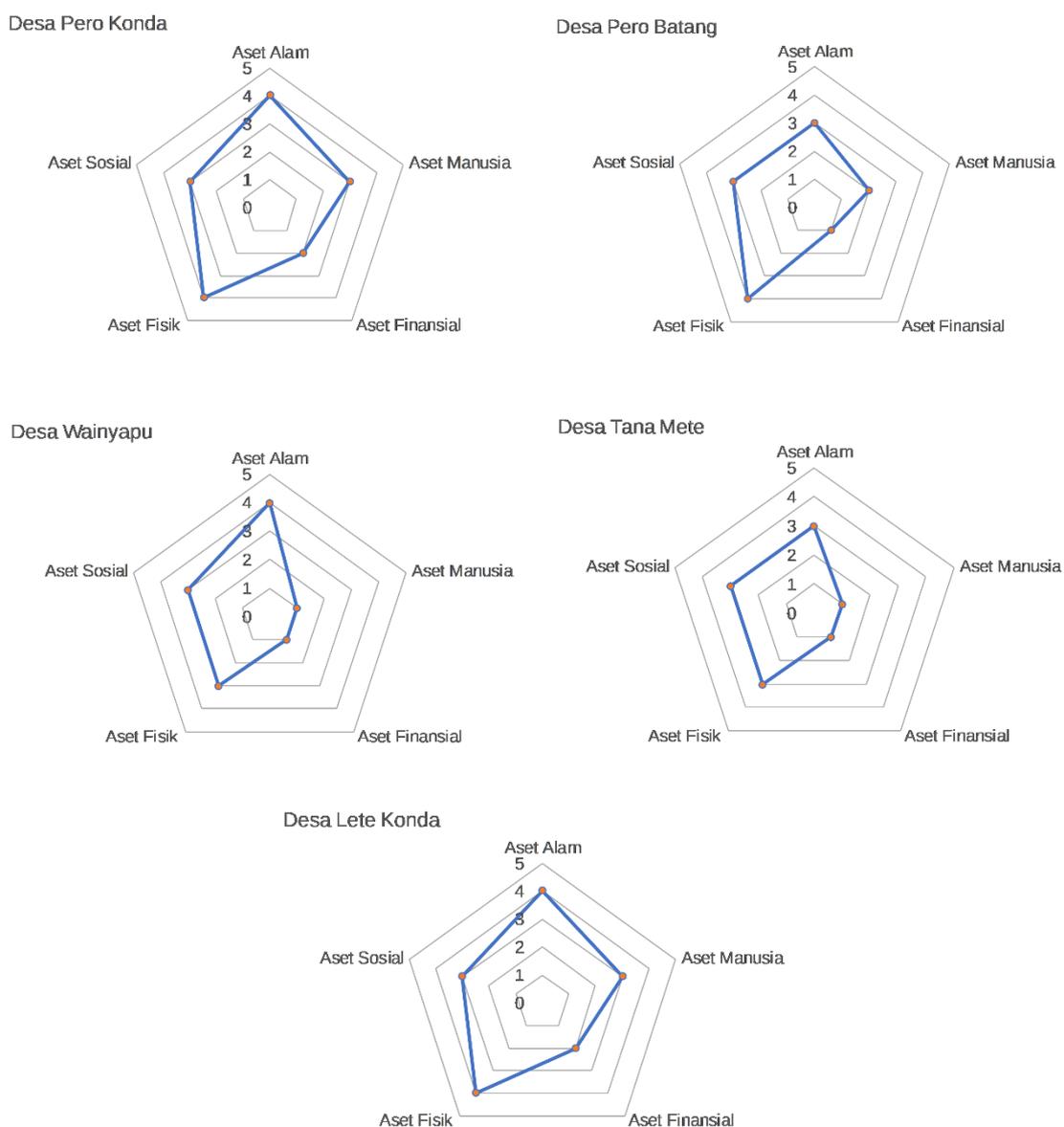
Aset Fisik mencakup modal dari kategori sarana fisik/infrastruktur yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Aset ini dapat berupa aksesibilitas masyarakat terhadap utilitas umum meliputi listrik, energi, air bersih, sanitasi, jalan dan akses transportasi umum, sarana produksi ekonomi. Penguasaan aset ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Aset Sosial merupakan modal sosial yang terkait dengan nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi kekuatan sosial masyarakat dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Modal sosial mencakup interaksi sosial, norma sosial, kelompok masyarakat/organisasi sosial, kelembagaan sosial, serta hubungan kepercayaan termasuk jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai pengaman sosial. Modal sosial yang kuat dan efektif dapat membantu masyarakat dalam pengurangan biaya transaksi dalam kehidupan masyarakat.

Kelima modal/aset penghidupan ini ditampilkan dalam bentuk segi lima (pentagon) untuk menunjukkan perbedaan akses masyarakat pada aset-aset (**Gambar 8**). Peta penguasaan aset penghidupan akan memberikan gambaran modal/aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir. Kelima aset ini harus dilihat secara menyeluruh karena saling terkait satu dengan yang lain. Pemetaan dilakukan dari nilai 0-5, yang merepresentasikan kondisi terburuk hingga terbaik, dimana:

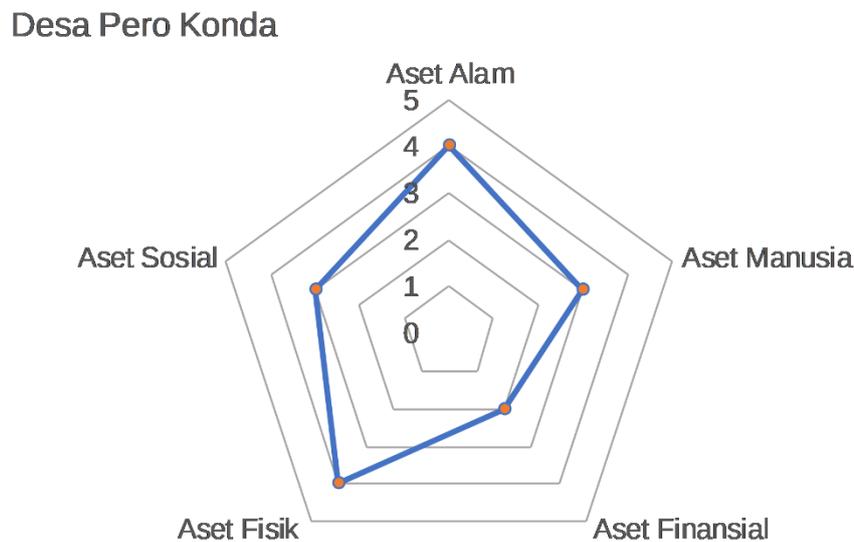
0: merepresentasikan tidak adanya aset yang dikuasai/dimiliki/diakses.

- 1: menunjukkan penguasaan aset yang sangat kurang/sangat terbatas/sangat tidak memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
- 2: merepresentasikan penguasaan aset yang relatif kurang/terbatas/kurang memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
- 3: merepresentasikan penguasaan aset yang cukup untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
- 4: merepresentasikan penguasaan aset yang memadai/relatif baik untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
- 5: merepresentasikan penguasaan aset yang sangat baik/sangat memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.



Gambar 8. Ringkasan lima aset dasar (*pentagon asset*) untuk mendukung penghidupan lestari di Desa Pero Konda, Pero Batang, Wainyapu, Tana Mete dan Lete Konda

PENGUASAAN ASET MASYARAKAT PESISIR DI DESA PERO KONDA



Gambar 9. Penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir di Desa Pero Konda

Pero Konda memiliki aset alam yang memadai untuk dapat dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir. Kondisi aset manusia secara umum terbilang cukup memadai untuk mengelola aset alam yang dimiliki, penguasaan keterampilan dan pengalaman pemberdayaan dapat menjadi pertimbangan untuk pemberdayaan lebih lanjut. Perhatian khusus diperlukan pada aset finansial yaitu terkait dengan kelembagaan keuangan formal dan akses permodalan, aset fisik terutama terkait dengan sarana produksi perikanan, dan aset sosial terkait dengan kelembagaan keprofesian.

Aset alam yang dimiliki masyarakat Pesisir Desa Pero Konda relatif memadai (skor 4). Desa Pero Konda berada di area pesisir dengan berbagai ekosistem dan biota penting yang telah dimanfaatkan secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Keberadaan hutan mangrove di wilayah ini memberikan manfaat ekologi untuk masyarakat, demikian pula dengan ekosistem terumbu karang dan padang lamun yang ada. Selain ekosistem, area pesisir di Pero Konda juga memiliki biota laut yang juga telah dimanfaatkan secara sosial ekonomi oleh penduduk setempat. Keberadaan biota khas (nyale) dan biota laut lainnya yang dilindungi (lumba-lumba, dugong) turut menambah kekayaan alam di pesisir Pero Konda. Selain itu, di pesisir Pero Konda juga terdapat cacing nyale yang muncul setiap 1 tahun sekali bertepatan dengan rangkaian pasola. Kemunculan cacing ini memberi berkah bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak hanya biodiversitas, pesisir Pero konda juga memiliki panorama pantai yang indah yang kini telah dikembangkan menjadi objek wisata berbayar resmi.

Seluruh sumber daya ini memiliki nilai penting secara ekologi (menjaga keamanan lingkungan missal dari abrasi), sosial (sumber pangan, rekreasi, dan arena sosial), ekonomi (sebagai sumber

pendapatan), dan budaya (pelaksanaan tradisi budaya yang memanfaatkan area pesisir beserta sumber daya yang dimiliki). Pemanfaatan yang dilakukan sebagian besar telah berupa pemanfaatan ekonomi (menghasilkan uang). Peta pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Desa Pero Konda disampaikan pada **Gambar 10**.

Aset manusia dari masyarakat pesisir Desa Pero Konda berada pada kategori cukup memadai (skor 3) untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir yang ada. Hal ini dilihat dari adanya penguasaan beberapa keterampilan teknis yang dapat mendukung pengelolaan pesisir dan laut yaitu penguasaan keterampilan penangkapan ikan dan penguasaan keterampilan wira usaha yang diperoleh secara otodidak dan turun-temurun. Kedua keterampilan ini terbukti mampu membantu masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya melalui penangkapan cumi yang menjadi primadona, dan kemampuan wirausaha yang mampu menghadirkan alternatif sumber nafkah.

Selain penguasaan keterampilan, aset manusia juga dilihat dari sisi pengalaman pemberdayaan yang pernah diterima. Masyarakat Pero Konda telah memiliki pengalaman pemberdayaan terkait dengan bidang perikanan, meliputi pengolahan cumi, pelatihan mekanik mesin perahu, dan pelatihan pemandu wisata lokal. Hanya saja pemberdayaan ini belum dikembangkan sebagai sumber penghidupan.

Dari aspek kesehatan, masyarakat pesisir Pero Konda menunjukkan kondisi yang relatif baik meliputi pemenuhan gizi yang relatif seimbang. Setidaknya tidak terdapat catatan kasus gizi buruk untuk satu tahun terakhir, namun demikian adanya kasus stunting yang dialami oleh 2 orang Balita masih menjadi catatan penting terkait dengan pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh anak. Selain aspek gizi, masyarakat Pero Konda juga telah terbiasa menerapkan pola PHBS yang relatif baik. Salah satunya ditunjukkan oleh kebiasaan MCK dengan memanfaatkan jamban pribadi di dalam rumah. Menurut informasi yang diperoleh, sebanyak 90% rumah tangga telah memiliki dan memanfaatkan jamban pribadi untuk kebutuhan MCK, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang hajat di pantai. Kondisi ini memberikan kontribusi baik pada kebersihan dan kesehatan lingkungan pesisir.

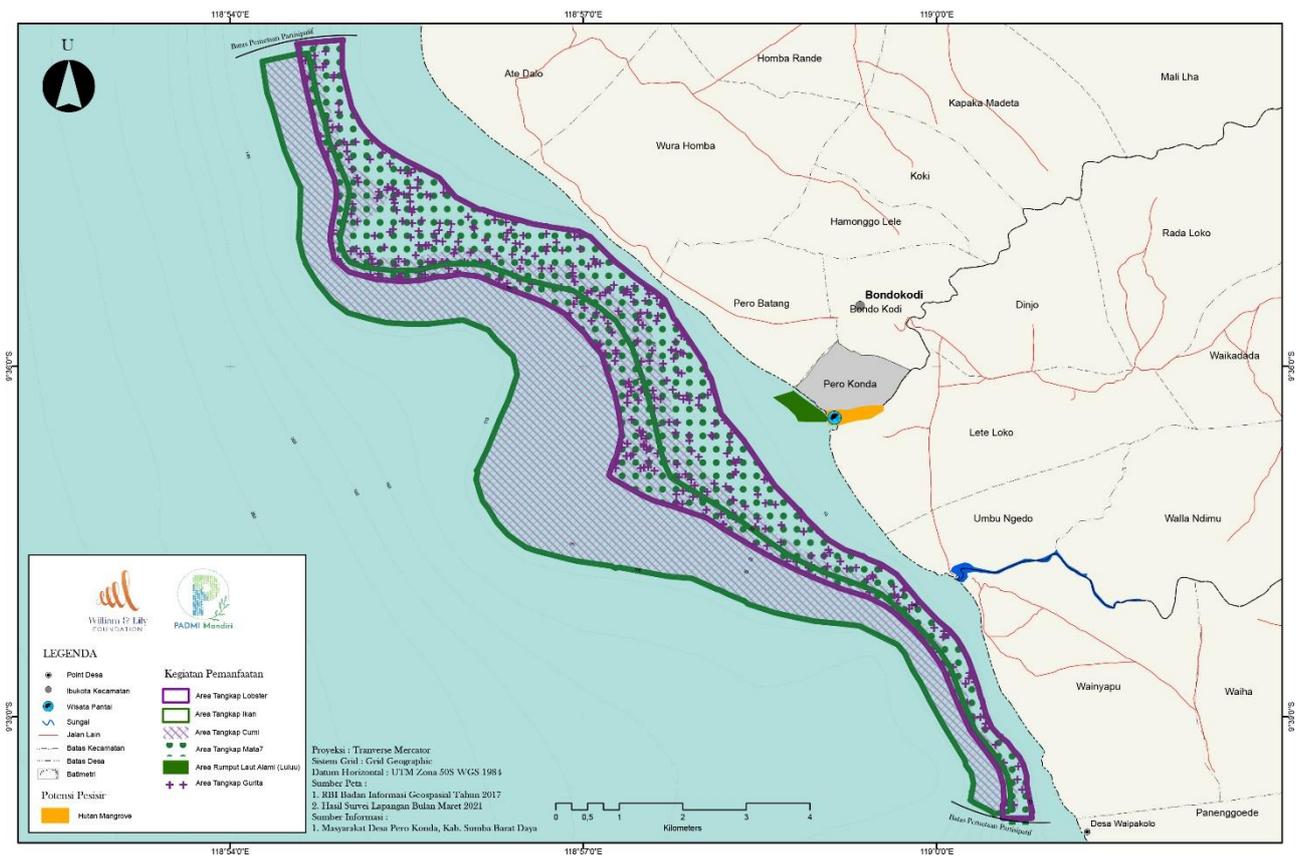
Pada aset finansial, secara umum menunjukkan bahwa masyarakat di Pesisir Desa Pero Konda memiliki aset finansial yang relatif terbatas (skor 2). Ketiadaan lembaga keuangan yang dapat diakses masyarakat untuk kebutuhan permodalan usaha maupun dana darurat menyulitkan ruang gerak masyarakat dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi yang diharapkan. Namun demikian, keberadaan para pengepul dan keterampilan wirausaha yang dimiliki umumnya dapat membantu perekonomian masyarakat yang sebagian besar sangat tergantung pada pesisir dan laut. Hanya saja akses permodalan dari pengepul masih sangat terbatas dan baru bisa mengakomodir sebagian kecil nelayan. Sebagian besar lainnya masih sangat mengandalkan permodalan pribadi yang sangat terbatas. Penguasaan keterampilan wirausaha yang dimiliki juga secara tidak langsung melatih beberapa masyarakat di Pesisir Pero konda untuk terbiasa melakukan pengelolaan keuangan dasar. Dari sisi ketersediaan dana (tabungan), dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Pero Konda terbiasa menghimpun dana dalam bentuk arisan adat dan arisan pasar. Arisan ini diselenggarakan secara rutin dan dalam frekuensi sering. Tabungan lainnya adalah dalam bentuk tabungan di bank, yang hanya dimiliki oleh sebagian kecil rumah tangga.

Sebaliknya, dari sisi hutang piutang masyarakat di Desa Pero Konda umumnya melakukan hutang untuk kebutuhan bulanan, tahunan, maupun kondisi darurat. Dengan kata lain, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat dapat memenuhinya dengan mandiri (tidak tergantung pada pihak lain). Sementara itu, dari sisi asuransi, pada umumnya masyarakat tercatat dalam asuransi

kesehatan BPJS (KIS). Terdapat pula asuransi kecelakaan laut, tetapi hanya sebagian kecil (<10%) nelayan yang memilikinya.

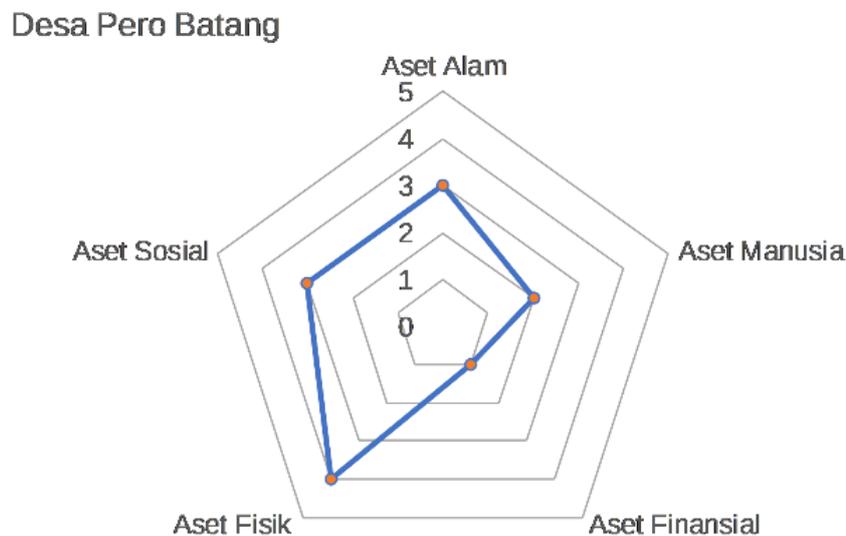
Aset fisik yang dimiliki masyarakat pesisir di Desa Pero Konda termasuk dalam kondisi yang memadai (skor 4), yang merepresentasikan bahwa secara umum aset fisik dapat diakses dengan baik. Meskipun tidak tersedia di tingkat desa, namun akses masih dapat dilakukan dengan baik. Akses sarana fisik yang dirasakan paling sulit adalah akses air bersih terutama pada saat musim kemarau. Serta ketiadaan sarana produksi perikanan, dan keterbatasan akses pasar baik pasar hasil maupun pasar kebutuhan harian, dimana masyarakat hanya dapat mengakses pasar pada Hari Rabu dan Sabtu.

Aset sosial menunjukkan kondisi yang cukup memadai (skor 3), yang merepresentasikan modal sosial yang cukup kuat dan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja belum terdapat organisasi sosial yang secara aktif mewadahi kegiatan ekonomi terkait dengan pesisir dan laut di desa ini. Organisasi sosial yang aktif meliputi organisasi kepemudaan, keagamaan, dan perempuan.



Gambar 10. Peta pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Pero Konda

PENGUASAAN ASET MASYARAKAT PESISIR DI DESA PERO BATANG



Gambar 11. Penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir di Desa Pero Batang

Pero Batang memiliki aset alam yang memadai, namun aset manusia masih relatif terbatas untuk dapat mengelola aset alam tersebut. Minimnya keterampilan, pengalaman pemberdayaan, dan kesehatan membutuhkan perhatian awal dan khusus. Aset fisik dan sosial relatif memadai untuk mendukung pengelolaan, dengan catatan perlu mempertimbangkan sarana produksi perikanan dan kelembagaan sosial masyarakat nelayan agar pengelolaan dapat dilakukan secara efektif.

Aset alam yang dimiliki oleh pesisir Pero Batang terbilang cukup memadai (skor 3) untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan lestari. Kondisi ini tampak berbeda dengan Pero Konda kendatipun Pero Batang berada dalam satu garis pantai. Perbedaan ini dikontribusikan oleh indikator mangrove dan pariwisata pantai. Selain itu, perbedaan lainnya terkait dengan minimnya pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir oleh masyarakat. Masyarakat di Desa Pero Batang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Hanya sebagian kecil yang menggunakan sumber daya pesisir dan laut di desa ini, dan hanya sebagian kecil dari pengguna tersebut yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan rumah tangga. Ini pun merupakan pekerjaan/penghasilan sampingan dan musiman. Pekerjaan sebagai nelayan ABK (dengan manfaat ekonomi) hanya ditekuni oleh sekitar 20 orang KK, yaitu nelayan ABK yang menumpang pada nelayan Pero Konda. Peta pemanfaatan SDA pesisir dan laut di Desa Pero Batang disampaikan pada **Gambar 12**.

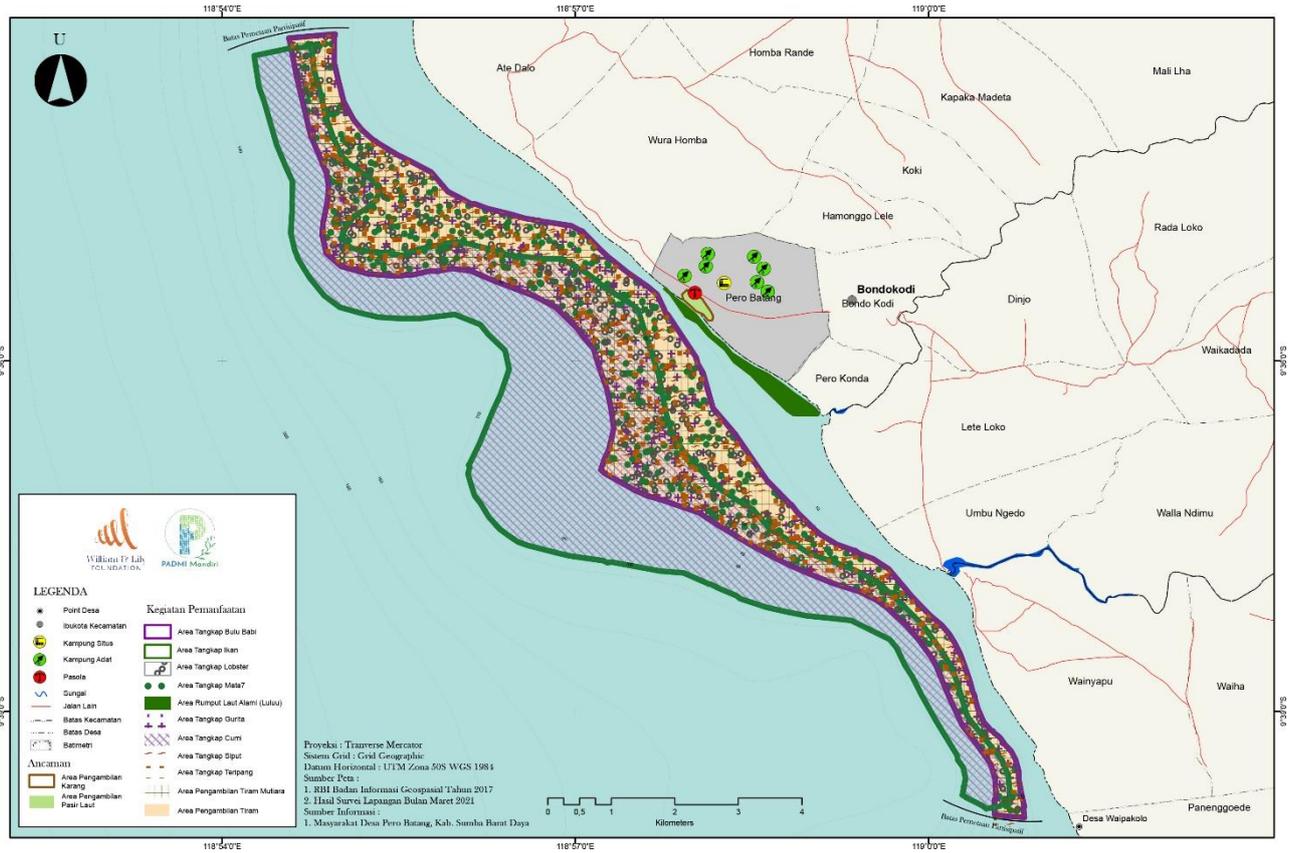
Demikian pula pada aset manusia yang berada pada skor 2, yang merepresentasikan kondisi penguasaan keterampilan dasar hidup dan ekonomi, kesehatan, dan pemberdayaan yang masih relatif terbatas. Secara umum, nelayan di Desa Pero Batang hanya menguasai 2 teknik penangkapan ikan yaitu operasional jaring cumi dan pancing.

Sementara pemanfaatan hasil laut lainnya cenderung dilakukan dengan cara yang sangat manual, dan hanya memanfaatkan biota yang dapat diambil dengan tangan secara mudah, misalnya pengambilan rumput laut alami (luluu), bulu babi, maupun jenis siput. Dari sisi pemberdayaan, masyarakat di Desa Pero Batang belum pernah memperoleh pemberdayaan khusus terkait dengan perikanan, kecuali pemberdayaan pengolahan cumi yang diikuti bersamaan dengan program di Pero Konda. Namun terdapat pemberdayaan aspek lain yang diterima oleh kaum perempuan yang berhasil meningkatkan kapasitas perempuan untuk membuat olahan panganan. Selain pemberdayaan, aset manusia juga diukur dari kondisi kesehatan yang difokuskan pada PHBS dan kondisi gizi. Secara umum, PHBS di Pero Batang masing sangat terbatas, kepemilikan jamban pribadi oleh rumah tangga masih terbatas (baru mencapai 70%). Pada aspek pola gizi juga masih relatif terbatas, dimana masih terjadi gizi buruk dan stunting sebanyak 10 orang balita yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang gizi dan pola asuh anak serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Aset finansial yang dimiliki terbilang sangat terbatas (skor 1). Sumber penghasilan masyarakat di Desa Pero Batang mengandalkan pada 2 kegiatan ekonomi utama yaitu pertanian dan perikanan tangkap (hanya sekitar 20 KK), sehingga ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pesisir pun umumnya tidak tinggi. Akses permodalan, lembaga keuangan, dan sarana produksi di Desa Pero Batang sangat sulit. Kemampuan manajemen keuangan dasar yang dimiliki rumah tangga juga sangat terbatas. Minimnya kemampuan manajemen keuangan dan terbatasnya alternatif sumber nafkah kerap menyebabkan masyarakat harus berhutang baik untuk kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan rutin bulanan, tahunan, kebutuhan tertentu yang terencana, maupun kebutuhan darurat. Hutang biasanya diperoleh dari tetangga dekat atau kerabat. Pada umumnya hutang ini diperoleh dengan mekanisme "bunga lipat". Sarana lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dana adalah melalui pemanfaatan modal sosial seperti kumpul tangan dan arisan adat. Menurut masyarakat cara ini sangat membantu, walaupun pada masa yang akan datang uang yang diperoleh dengan cara yang sama.

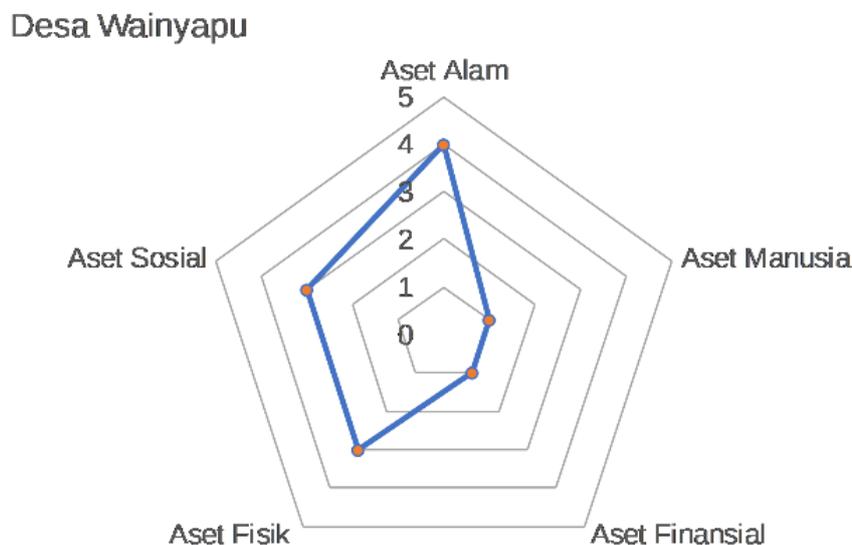
Aset fisik yang dimiliki masyarakat di Desa Pero Batang secara umum memadai (skor 4). Aset fisik untuk utilitas umum dapat dikatakan dapat di akses dengan baik, walaupun tidak tersedia di desa namun akses dapat dilakukan dengan mudah. Kesulitan akses terbesar yang dirasakan oleh masyarakat adalah akses air bersih, terutama pada saat musim kemarau. Aset fisik lainnya yang juga belum tersedia adalah aset terkait dengan sarana produksi perikanan.

Aset sosial yang dimiliki Desa Pero Batang relatif memadai (skor 3). Terdapat beberapa modal sosial yang telah berhasil menjadi media masyarakat untuk meringankan kehidupan sehari-hari, hanya saja belum ada organisasi profesi yang mewadahi kegiatan perikanan di desa ini.



Gambar 12. Peta pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Pero Batang

PENGUASAAN ASET MASYARAKAT PESISIR DI DESA WAINYAPU



Gambar 13. Penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir di Desa Wainyapu

Pesisir Wainyapu memiliki aset alam yang memadai untuk dikembangkan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Aset tersebut meliputi keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang beragam dan telah dimanfaatkan secara sosial ekonomi oleh masyarakat, potensi pariwisata yang prospektif untuk dikembangkan, garam yang sudah dikelola tapi belum berkembang, dan potensi budidaya laut. Aset manusia dan finansial di desa ini sangat terbatas dan perlu mendapat intervensi untuk peningkatan kapasitas diri melalui pemberdayaan ekonomi agar dapat mengelola aset alam yang dimiliki. Aset fisik cukup, namun perlu perhatian terkait dengan akses listrik, air bersih, dan jalan yang masih agak rusak di beberapa ruas menuju desa. Aset sosial cukup memadai namun masih perlu pengorganisasian masyarakat untuk memudahkan proses pemberdayaan yang akan dilakukan.

Pesisir Wainyapu memiliki aset alam pesisir yang memadai (skor 4) untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai pundi perekonomian masyarakat. Keberadaan sumber daya alam yang beragam dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara sosial ekonomi menjadikan aset alam di desa ini memiliki peran penting dan prospektif untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aset alam yang dimiliki berupa hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan biota laut meliputi ikan, cumi, gurita, penyu, teripang, kepiting, siput, rumput laut alami (luluu), dan air laut yang dapat diolah menjadi garam. Pemanfaatan yang dilakukan meliputi penangkapan ikan dan biota laut lainnya, pengambilan luluu, dan pengolahan garam dari air laut setempat. Pantai Wainyapu juga memiliki panorama yang indah dan sangat potensial untuk menjadi objek wisata. Selain panorama, keberadaan kampung adat di dekat area pantai juga potensial menjadi

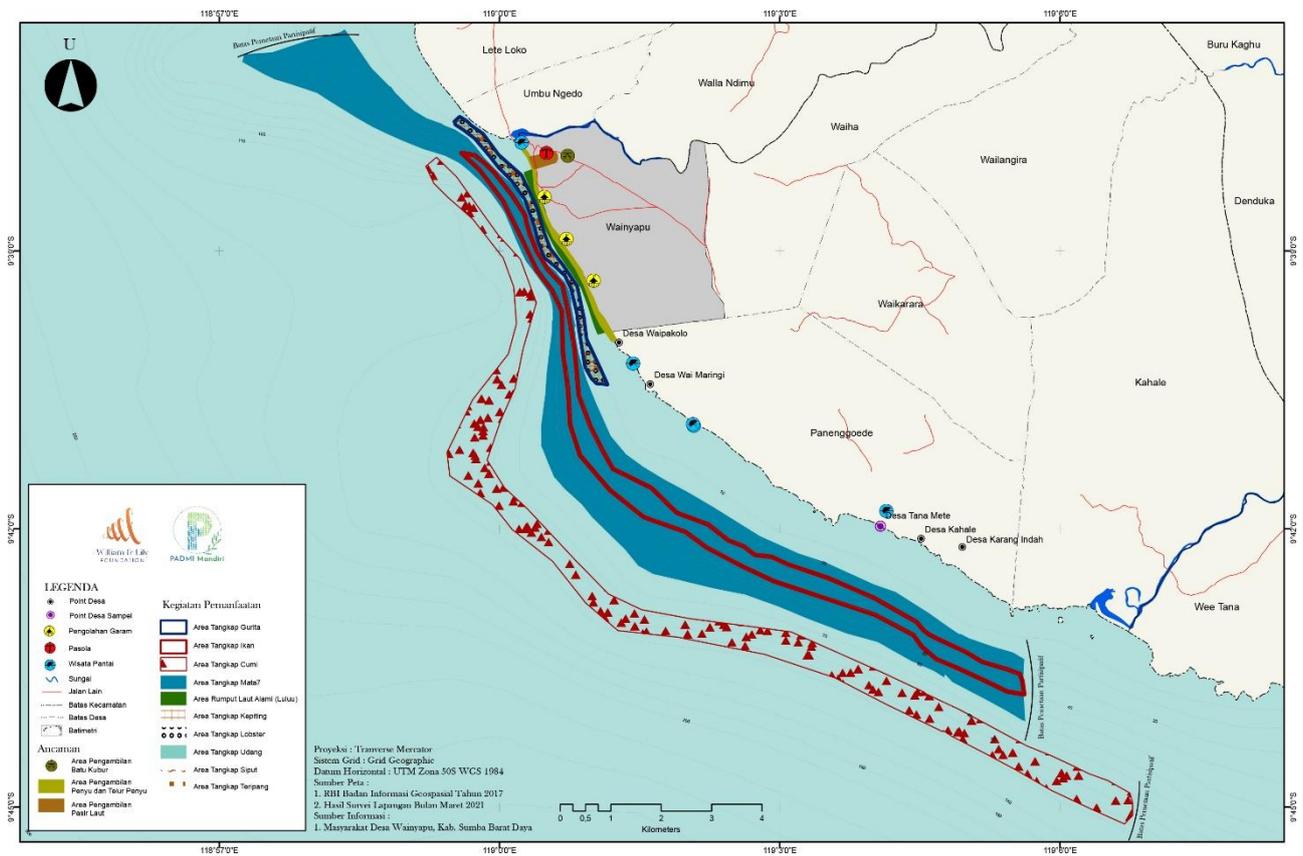
aset alam untuk mendukung wisata budaya. Tidak hanya potensi wisata, perairan di pantai Wainyapu juga potensial untuk area budidaya rumput laut (**Gambar 14**).

Aset manusia yang dimiliki masyarakat pesisir di Desa Wainyapu terbilang sangat terbatas (skor 1), yang menunjukkan masih terdapat banyak keterbatasan kemampuan SDM untuk mengelola aset alam yang dimiliki. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh minimnya penguasaan keterampilan teknis yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain penguasaan teknis yang minim, masyarakat di pesisir Wainyapu juga belum pernah memiliki pengalaman pemberdayaan terkait dengan pesisir dan perikanan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya bertumpu pada kapasitas diri dan penguasaan keterampilan yang dimiliki secara turun-temurun dari para tetua sebelumnya. Dari aspek kesehatan juga diperoleh informasi bahwa penerapan PHBS masih terbatas dengan kepemilikan jamban pribadi yang relatif sedikit (<50%). Selain PHBS, di desa ini juga teridentifikasi adanya kasus gizi buruk dan stunting sebanyak 3 orang balita. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya pemenuhan kebutuhan pangan yang belum memadai pada balita yang disebabkan oleh ketidakpahaman tentang pola gizi seimbang maupun keadaan ekonomi rumah tangga.

Kondisi yang sangat terbatas juga ditemukan pada aset finansial yang berada pada skor 1. Kondisi ini merepresentasikan bahwa modal keuangan yang dimiliki masyarakat pesisir di Desa Wainyapu masih sangat terbatas. Keterbatasan ini diindikasikan oleh keterbatasan alternatif mata pencaharian yang digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan rumah tangga. Demikian pula dengan sulitnya sumber permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat melakukan peningkatan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Ketiadaan pihak yang dapat berperan sebagai pemodal kegiatan, menyebabkan kegiatan pemanfaatan pesisir dan laut yang dilakukan masyarakat saat ini masih sangat terbatas, bahkan sebagian besar hanya memanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Ketiadaan aset produksi yang memadai menyebabkan keterbatasan produktivitas masyarakat nelayan. Kondisi keuangan lainnya adalah terkait dengan tidak banyak masyarakat yang memiliki persediaan dana dalam bentuk tabungan (uang, hewan, perhiasan, lainnya).

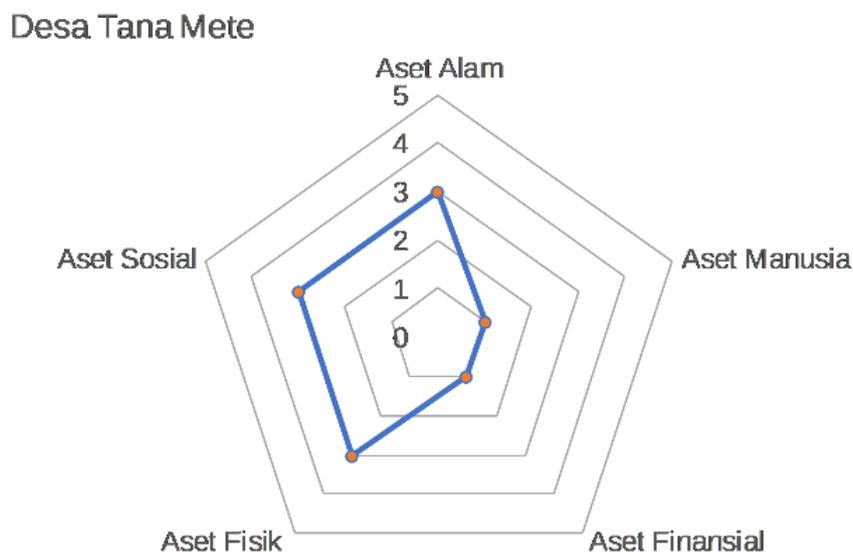
Sebaliknya dengan kondisi hutang piutang yang umumnya masih cukup tinggi, dimana beberapa masyarakat mengatakan masih harus berhutang untuk pemenuhan kebutuhan bulanan, tahunan, kegiatan tertentu terencana, maupun kebutuhan dana darurat. Pada aset fisik, terlihat bahwa masyarakat pesisir di Desa Wainyapu memiliki keterbatasan akses sarana fisik yaitu akses listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dan ruas jalan yang masih rusak. Modal fisik berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari maupun kondisi perekonomian masyarakat. Keterbatasan yang ada turut membatasi kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara lebih baik.

Aset sosial yang dimiliki masyarakat pesisir Desa Wainyapu cukup kuat. Sama halnya dengan desa studi lainnya di wilayah Kodi, modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat menjadi solusi beberapa persoalan yang dihadapi. Termasuk juga persoalan terkait dengan keuangan, yang umumnya diatasi dengan memanfaatkan modal sosial berupa arisan adat dan kumpul tangan. Hanya saja, di Desa Wainyapu juga belum terdapat kelompok masyarakat berdasarkan profesi di bidang perikanan pesisir.



Gambar 14. Peta pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Wainyapu

PENGUASAAN ASET MASYARAKAT PESISIR DI DESA TANA METE



Gambar 15. Penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir di Desa Tana Mete

Pesisir Tana Mete memiliki aset alam yang cukup memadai yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Aset tersebut meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, biota laut dan pesisir yang telah dimanfaatkan secara sosial ekonomi. Aset manusia sangat terbatas karena minimnya keterampilan, serta pengalaman pemberdayaan yang pernah diterima untuk meningkatkan kapasitas diri terutama terkait dengan pengelolaan pesisir dan laut. Di Desa Tana Mete tidak ada kasus stunting yang dilaporkan selama setahun terakhir. Aset finansial sangat terbatas dan butuh intervensi terutama terkait dengan akses permodalan. Aset fisik juga cukup, dengan keterbatasan pada akses komunikasi jarak jauh. Aset sosial memadai, terutama dengan sudah dibentuknya kelompok nelayan yang akan dapat memudahkan pengelolaan pesisir dan laut pada masa mendatang.

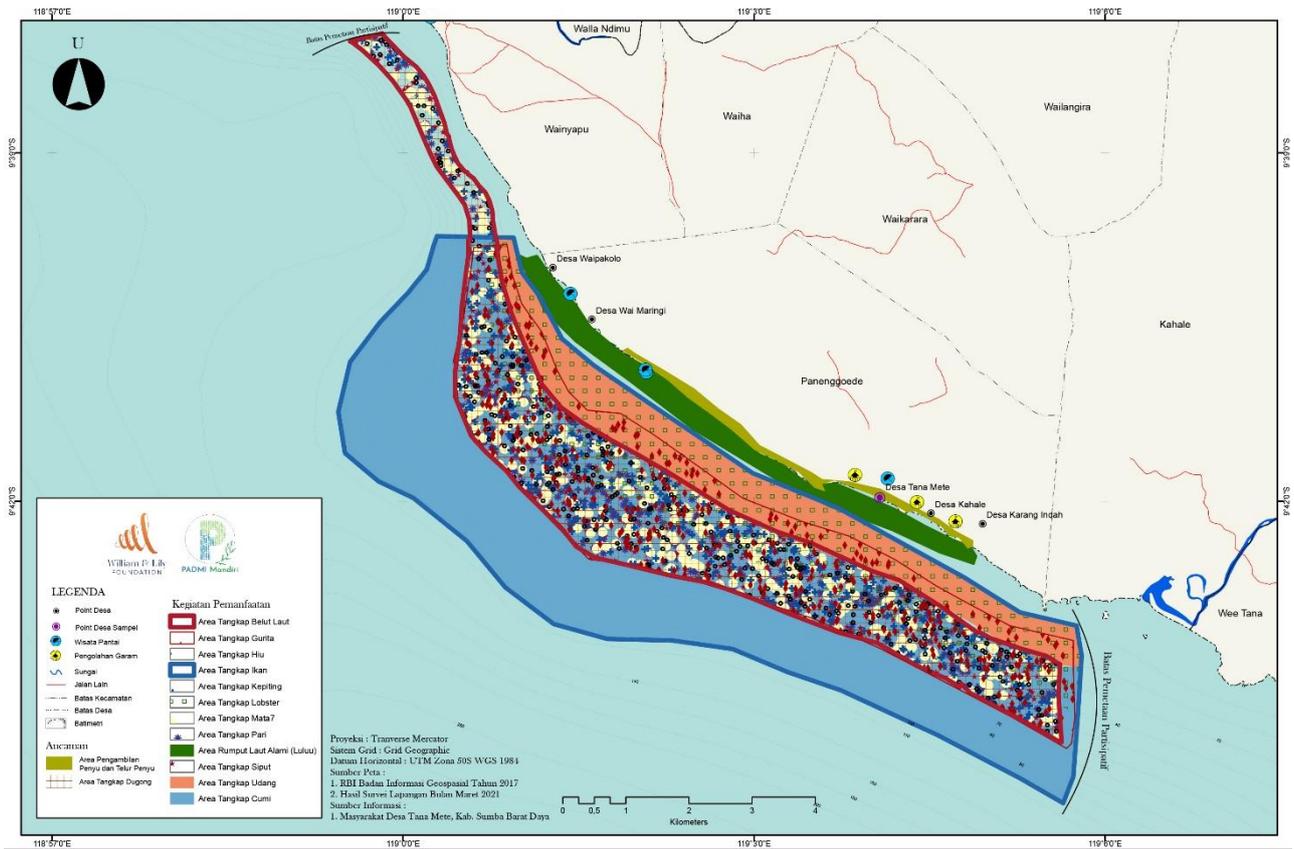
Masyarakat pesisir di Desa Tana Mete memiliki modal alam meliputi terumbu karang, padang lamun, area penangkapan ikan dan biota laut lainnya, pengolahan garam, dan potensi wisata pantai. Di desa ini tidak ditemukan adanya hutan mangrove, dan area perairan di pesisir pantai ini tidak menunjukkan adanya potensi budidaya laut. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemanfaatan sosial (bahan pangan, tempat rekreasi) dan pemanfaatan ekonomi (dijual untuk mendapatkan pendapatan) (**Gambar 16**).

Aset manusia yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Desa Tana Mete masih sangat terbatas. Keterampilan penangkapan ikan yang dimiliki umumnya bersifat turunan dan dikuasai secara otodidak. Demikian pula dengan keterampilan lainnya, misalnya membuat tenun atau pun kerajinan lainnya. Secara umum, masyarakat belum pernah menerima program pemberdayaan untuk

meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki khususnya terkait dengan perikanan dan pesisir laut. Keterbatasan juga tampak dari sisi kesehatan, terkait dengan penerapan pola PHBS dimana kepemilikan jamban pribadi baru mencapai 40% rumah tangga. Keterbatasan terkait dengan kondisi gizi yang menunjukkan adanya kondisi gizi buruk. Sedikit lebih baik dibandingkan desa lainnya karena di desa ini tidak ada catatan kasus stunting setidaknya 1 tahun terakhir.

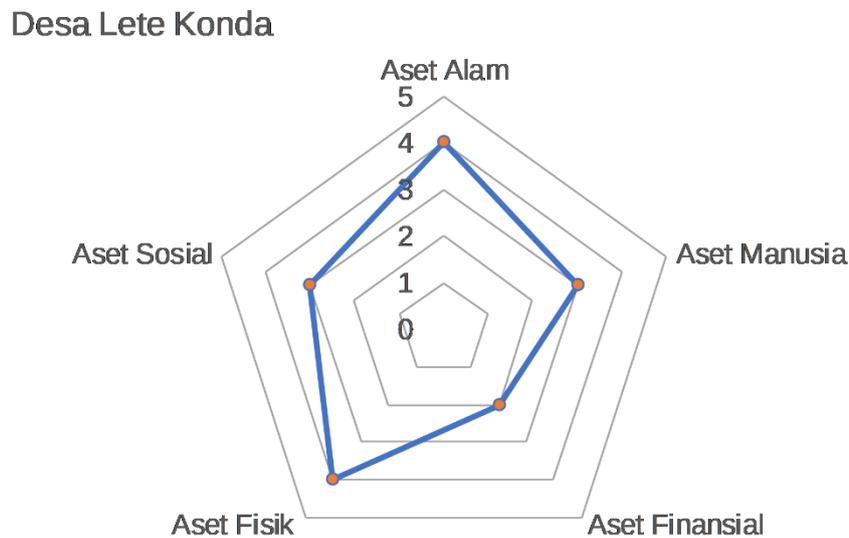
Keterbatasan juga ditemukan pada aset finansial, belum adanya sumber permodalan kegiatan ekonomi serta lembaga keuangan formal yang dapat dituju masyarakat, menyebabkan terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat khususnya untuk mengeloa sumber daya pesisir dan laut. Selain terkait dengan aktivitas ekonomi, keterbatasan finansial juga tampak dari minimnya persediaan keuangan yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan terutama pada saat kondisi darurat. Sebaliknya dengan kondisi hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat, yang relatif masih sangat tinggi. Kecenderungan hutang terjadi untuk pemenuhan kebutuhan bulanan, tahunan, untuk kegiatan tertentu yang terencana, maupun untuk dana darurat. Pihak yang dituju untuk memperoleh pinjaman adalah keluarga dan tetangga. Masyarakat juga masih belum melakukan penataan keuangan, pada umumnya pengeluaran terjadi sesuai dengan kondisi yang berlaku, dengan kata lain belum ada perencanaan keuangan.

Sementara itu, masyarakat pesisir Desa Tana Mete memiliki modal sosial yang cukup memadai. Sama halnya dengan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di desa studi lainnya (wilayah Kodi), modal sosial yang tampak di desa ini adalah kegotongroyongan dan kebersamaan yang tinggi, adanya kegiatan adat yang rutin yang dapat memupuk rasa kekeluargaan di antara masyarakat, serta adanya kegiatan yang ditujukan khusus untuk “mengumpulkan dana dalam jumlah tertentu” jika ada yang masyarakat yang membutuhkan, yaitu arisan adat dan kumpul tangan. Modal sosial ini sangat dapat diandalkan untuk membantu dan meringankan masyarakat. Menurut informasi yang diperoleh dari aparat desa, bahwa saat ini sedang mulai dibentuk kelompok nelayan sebanyak 8 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang per kelompok. Kondisi ini mengindikasikan mulai adanya pengorganisasian nelayan yang tentunya akan memudahkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut yang dimiliki.



Gambar 16. Peta pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Tana Mete

PENGUASAAN ASET MASYARAKAT PESISIR DI DESA LETE KONDA



Gambar 17. Penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir di Desa Lete Konda

Pesisir Lete Konda memiliki aset alam berupa ekosistem mangrove, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut yang telah dimanfaatkan secara sosial ekonomi. Aset alam ini semakin prospektif untuk mendukung perekonomian masyarakat setempat dengan adanya potensi budidaya rumput laut yang juga telah dikembangkan secara ekonomi. Aset manusia terbilang memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola aset alam yang ada, serta memiliki pengalaman dalam pemberdayaan. Kondisi ini sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan aset finansial yang kurang memadai, melalui strategi nafkah ganda yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat. Aset fisik memadai, dengan perhatian khusus pada sarana produksi perikanan agar dapat menunjang kegiatan pesisir yang cukup kompleks. Aset sosial cukup memadai, dan masih membutuhkan intervensi untuk pengorganisasian masyarakat berdasarkan profesi terkait dengan pesisir, misal kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, atau kelompok pengolah garam.

Sedikit berbeda dengan penguasaan aset masyarakat di desa studi lainnya, masyarakat pesisir Lete Konda memiliki aset alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, area penangkapan ikan dan biota laut lainnya, pengolahan garam, serta budidaya laut berupa rumput laut. Kelebihan pesisir ini dibanding pesisir di desa studi lainnya adalah terkait dengan keberadaan area budidaya rumput laut. Pesisir ini memiliki area perairan yang sangat mendukung untuk kegiatan budidaya rumput laut, dan telah dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Seluruh sumber daya laut dan pesisir ini dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat (**Gambar 18**), dengan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi.

Aset manusia di pesisir Desa Lete Konda cukup memadai, dimana masyarakat telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk mengelola aset alam yang dimiliki. Beberapa pemberdayaan yang pernah diterima adalah budidaya rumput laut, pengolahan rumput laut, serta pengolahan garam berupa pemberian yodium. Pemberdayaan budidaya rumput laut terbilang berhasil dan sukses membuat masyarakat mampu melakukan kegiatan budidaya secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Masyarakat memiliki motivasi dan upaya kuat untuk maju, yang terlihat dari semangat masyarakat untuk menerapkan pola nafkah ganda dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Motivasi ini sangat terlihat dari aktifnya kaum perempuan untuk berperan dalam perekonomian rumah tangga melalui upaya diversifikasi kegiatan ekonomi pesisir. Sementara itu, dari indikator kesehatan, sebagian besar (70% rumah tangga) pesisir di Desa Lete Konda telah memiliki jamban pribadi di rumah yang dimanfaatkan untuk kebutuhan MCK. Terkait dengan kondisi gizi, ditemukan informasi bahwa masih terdapat kasus gizi buruk dan stunting sebanyak 5 orang di desa ini.

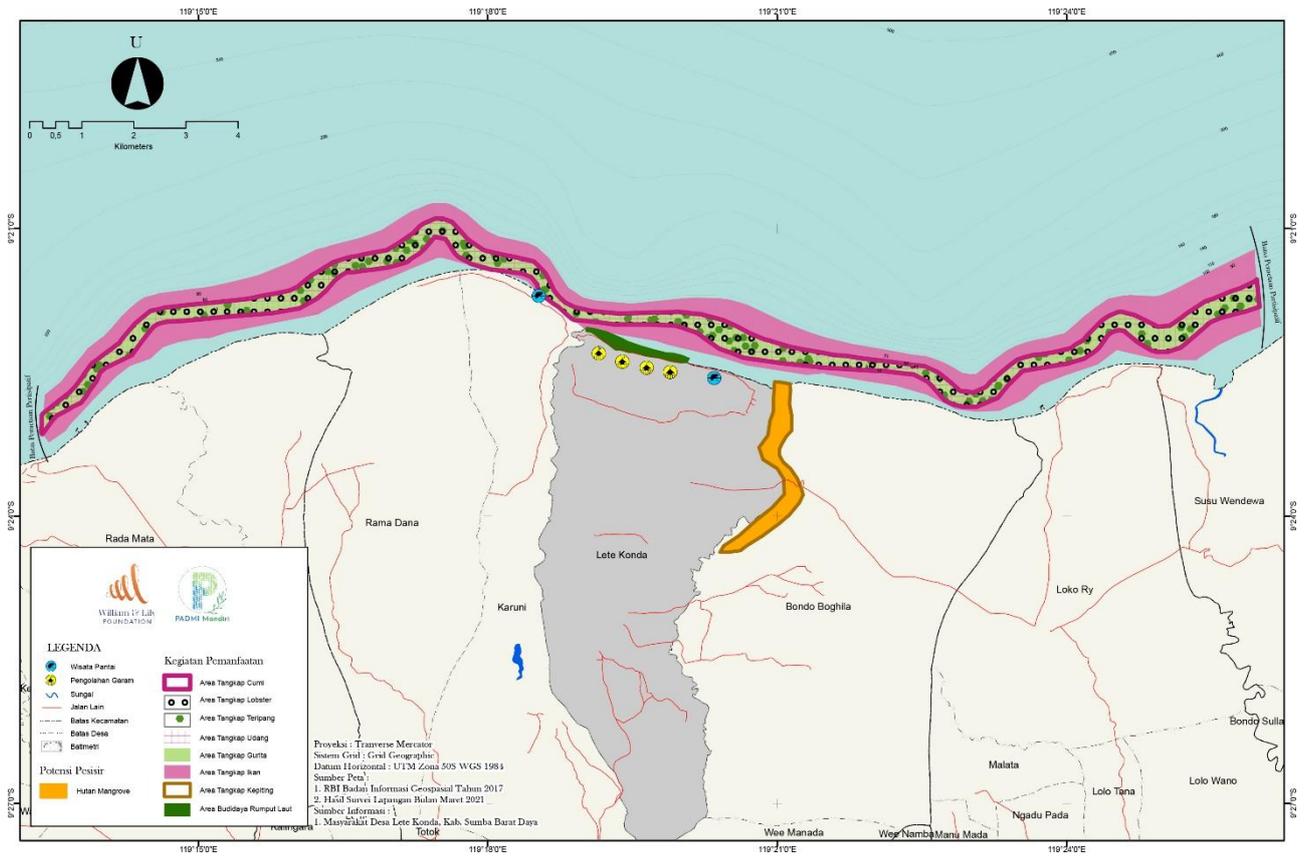
Aset finansial yang dimiliki oleh masyarakat pesisir di Desa Lete Konda menunjukkan kondisi yang kurang memadai (skor 2). Tidak adanya kelembagaan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, menyebabkan pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sangat terbatas. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya pesisir dan laut serta ketidakmampuan pengelolaan keuangan yang memadai memberikan kondisi sulit pada nelayan terutama pada saat musim angin dan gelombang besar. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki strategi nafkah ganda dari diversifikasi kegiatan perikanan dan laut.

Pada saat musim angin dan gelombang besar, masyarakat yang hanya memiliki pekerjaan sebagai nelayan cenderung memenuhi kebutuhan harian, bulanan, tahunan, dan dana darurat dengan cara berhutang kepada pihak lain (tetangga, rentenir, maupun warung sembako di desa). Hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki persediaan dana dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan pada saat darurat. Demikian pula dengan asuransi, akses asuransi yang dimiliki oleh masyarakat adalah BPJS KIS, dan beberapa nelayan memiliki asuransi kecelakaan laut.

Aset fisik secara umum adalah memadai (skor 4), yang mengindikasikan bahwa masyarakat dapat mengakses sarana fisik dengan baik.

Meskipun tidak tersedia di permukiman pesisir, namun masyarakat pesisir masih dapat mengakses sarana pendidikan, kesehatan (puskesmas), listrik, air bersih, pasar, transportasi, komunikasi-informasi, dan sarana olahraga. Akses sarana yang dirasakan relatif sulit adalah akses air bersih terutama pada saat kemarau dan sarana produksi perikanan yang belum tersedia, termasuk darmaga maupun pasar hasil produksi.

Aset sosial yang dimiliki oleh masyarakat cukup memadai (skor 3). Masyarakat memiliki modal sosial yang cukup melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat rutin. Hanya saja, sama dengan desa lainnya dimana masyarakat pesisir Lete Konda belum memiliki organisasi yang secara khusus berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.



Gambar 18. Peta pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Lete Konda

Ancaman, Kerentanan, dan Konflik Sosial

Terdapat ancaman abrasi akibat kondisi gelombang besar yang semakin dipicu oleh keberadaan kegiatan penambangan pasir laut, potensi kerusakan sumber daya laut akibat penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan penangkapan biota laut yang dilindungi, potensi tekanan perikanan di area terumbu karang dan pesisir. Di desa studi, balita, nelayan, dan perempuan merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Terdapat konflik sosial terkait dengan sengketa kepemilikan lahan di area pesisir dengan status konflik belum selesai dan potensial akan muncul kembali pada masa mendatang.

ANCAMAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

Abrasi

Sebagai daerah pesisir, potensial abrasi tidak dapat dihindari. Terlebih dengan adanya beberapa kegiatan yang bersifat merusak dan meningkatkan proses abrasi seperti penambangan batu karang maupun pasir laut. Kondisi ini juga terjadi di desa studi terutama di wilayah klaster Kodi. Menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat, dikatakan bahwa pantai di Desa Pero Konda, Pero Batang, Wainyapu, dan Tana Mete secara umum telah mengalami abrasi. Abrasi yang dirasakan sangat mengancam disebutkan oleh masyarakat di Desa Pero Batang dan Pero Konda. Penambangan pasir laut yang sempat marak dan masih dilakukan hingga saat ini diduga menjadi salah satu faktor pemicu kondisi abrasi.

Kerusakan Terumbu Karang

Pesisir desa studi memiliki hamparan terumbu karang yang juga dijadikan area penangkapan ikan oleh nelayan. Dari survei yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terumbu karang di pesisir ini berada dalam kondisi rusak yang disebabkan oleh praktik kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh nelayan, baik nelayan lokal maupun luar daerah.

Kegiatan tersebut meliputi pemboman ikan dan penangkapan biota laut yang dilakukan dengan menginjak maupun mencongkel batu karang. Kajian yang dilakukan oleh TNC (2016), salah satunya di pesisir Karuni (Kecamatan Loura) menguatkan temuan ini. Pada kajian tersebut diperoleh persentase tutupan karang hidup adalah sebesar 34,7% dengan indeks mortalitas 0,7, sehingga terumbu karang berada dalam kategori sedang. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara, bahwa penangkapan ikan dengan bom dilakukan oleh nelayan dari luar daerah. Nelayan lokal menganggap ini sebagai sebuah ancaman yang belum dapat diatasi dan sangat merugikan nelayan lokal yang menggantungkan pendapatan rumah tangga dari ekosistem karang tersebut.

Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan

Penangkapan dengan teknik yang merusak karang. Kegiatan penangkapan ikan di pesisir desa studi dilakukan dengan cara tradisional. Beberapa diantaranya dapat merusak karang, seperti penangkapan dengan panah, tombak, dan jaring yang cenderung menginjak karang serta penangkapan siput dan abalone yang umumnya dilakukan dengan cara mencongkel karang dengan alat bantu berupa linggis.

Penangkapan dengan bom ikan. Kegiatan penangkapan ikan yang juga dapat merusak karang adalah kegiatan penangkapan ikan dengan teknik pemboman. Menurut hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pemboman ikan kerap dilakukan oleh nelayan dari luar daerah.

Penangkapan Biota Laut yang Dilindungi

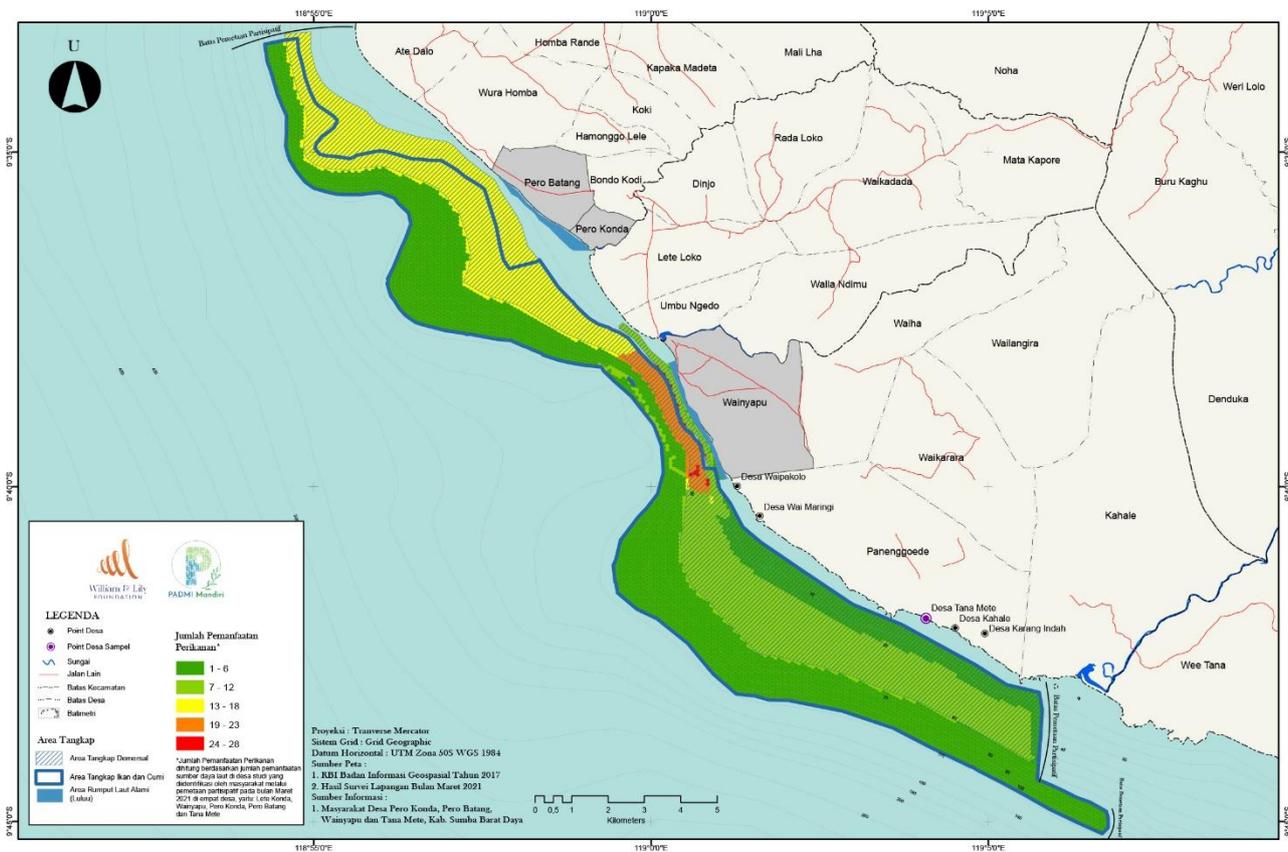
Dari survei ini diperoleh informasi adanya kegiatan penangkapan biota laut yang dilindungi, seperti dugong, penyu, serta pengambilan telur penyu. Masyarakat mengakui bahwa penyu dan telur penyu memang masih menjadi target dari kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Umumnya hasil tangkapan yang diperoleh adalah untuk dijual baik daging maupun cangkangnya. Cangkang

penyu dijual untuk bahan cenderamata yang selanjutnya dipasarkan di objek-objek wisata di dalam maupun luar Pulau Sumba. Sementara daging dan telur penyu dijual untuk konsumsi (dimakan).

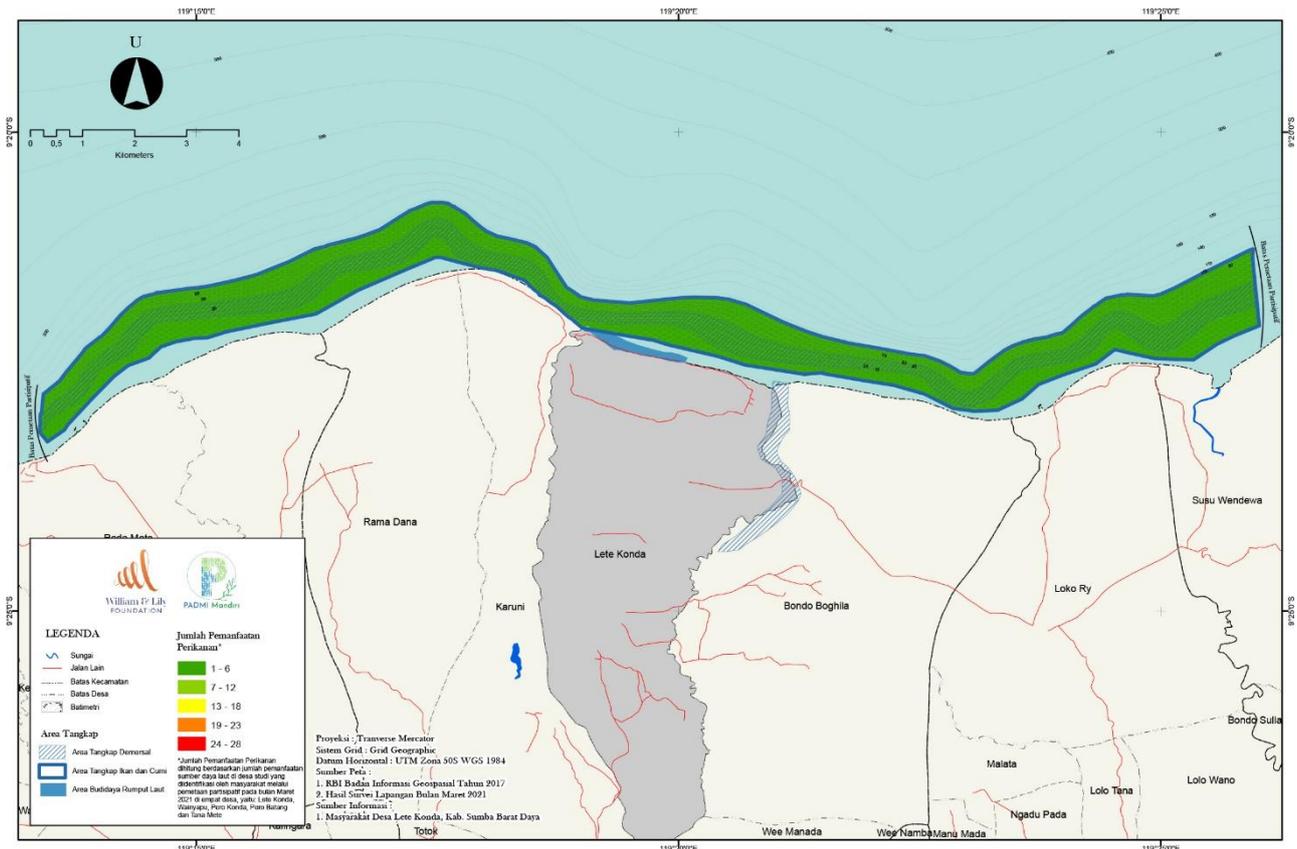
Kondisi berbeda pada hasil tangkapan dugong. Menurut nelayan, dugong kerap tertangkap dalam jaring meskipun bukan menjadi target utama. Namun demikian, dugong yang tertangkap umumnya diproses untuk dijual dagingnya maupun untuk dimasak. Pada umumnya, nelayan mengaku tidak mengetahui bahwa biota tersebut dilindungi dan dilarang untuk ditangkap.

Potensi Tekanan Perikanan di Area Pesisir

Seluruh kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan biota laut yang dilakukan oleh nelayan di pesisir desa studi terkonsentrasi di area pesisir dan terumbu karang. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan, permodalan, dan sarana penangkapan yang dikuasai oleh nelayan. Jika tidak tertangani kondisi ini akan potensial akan memberikan tekanan perikanan di area pesisir dan terumbu karang. Tekanan tersebut dapat berupa penurunan kualitas dan kuantitas biota target utama serta kerusakan ekosistem yang menjadi habitat biota tersebut. Terlebih kegiatan penangkapan yang bersifat tradisional tanpa menggunakan armada, yang menyebabkan nelayan melakukan penangkapan dengan cara berjalan dan menginjak karang secara terus-menerus. Peta tekanan perikanan disampaikan pada **Gambar 19** dan **Gambar 20**.



Gambar 19. Peta tekanan perikanan di area klaster Kodi



Gambar 20. Peta tekanan perikanan di area klaster Loura

Kegiatan Pengambilan Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan

Ancaman lainnya yang juga ditemukan di pesisir desa studi adalah adanya kegiatan pengambilan sumber daya alam yang tidak terbarukan, meliputi batu karang, pasir laut, dan batu kubur.

Informasi penambangan karang, pasir laut, dan batu kubur ditemukan di pesisir Pero Batang dan Wainyapu. Kegiatan ini dilakukan untuk tujuan pemanfaatan pribadi maupun penjualan. Kegiatan penambangan batu karang dilakukan untuk bahan pembangunan rumah maupun untuk ekstrak kapur. Sementara pasir laut ditujukan untuk bahan bangunan rumah, dan batu kubur untuk digunakan sebagai batu nisan/kubur. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan secara kolektif (pengangkut/ penambang terdiri atas sekitar 9 orang), pihak pembeli melakukan pembelian pasir laut dengan cara membayar upah tambang dan pengangkutan.

KERENTANAN MASYARAKAT PESISIR

Pada kajian ini dilakukan penelusuran tentang dimensi kerentanan dan kelompok rentan yang terdapat di desa studi. Dari penelusuran tersebut diperoleh bahwa terdapat beberapa dimensi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu hamil dan lansia, keselamatan nelayan, kerentanan ekonomi rumah tangga nelayan, kekerasan terhadap kaum perempuan, dan keamanan masyarakat terkait dengan kriminalitas.

Kesehatan Balita

Kerentanan pada dimensi kesehatan balita terkait dengan pemenuhan gizi pangan dan pola asuh anak. Dari survei ditemukan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting di seluruh desa studi. Menurut hasil wawancara, kondisi ini terjadi akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat khususnya orang tua tentang gizi dan pangan, penerapan pola asuh anak yang dianggap masih mengabaikan pola makan anak, serta kondisi perekonomian rumah tangga yang relatif terbatas.

Pola asuh anak yang kerap masih mengabaikan kebutuhan anak dikaitkan dengan kondisi kesibukan para ibu dalam kegiatan ekonomi (berladang, tenun) yang kerap melewatkan waktu makan anak. Dan kondisi ini terjadi secara terus-menerus (seolah menjadi kebiasaan), yang sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan balita yang masih dalam kategori usia rentan.

Kesehatan Ibu Hamil

Dimensi rentan berikutnya adalah kesehatan ibu hamil dan lansia. Menurut hasil wawancara, bahwa pada umumnya kaum ibu di desa ini menikah dalam usia muda dengan proses kehamilan yang cukup sering dengan jarak kehamilan yang sangat dekat. Pada sisi lain, kaum ibu hamil kerap mengabaikan kondisi kehamilan tersebut, sehingga terjadi malnutrisi pada janin maupun ibu yang mengandung. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi kualitas anak yang dilahirkan, dan diduga berkaitan dengan kondisi bayi garis merah yang berlanjut pada gizi buruk dan stunting. Kondisi serupa terjadi pada lansia, akibat minimnya pemahaman tentang kebutuhan khusus para lansia terutama dalam hal pemenuhan gizi.

Keselamatan Nelayan

Di desa studi, keselamatan nelayan juga menjadi kondisi rentan yang dapat mengancam jiwa nelayan. Hal ini dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang memaksa beberapa nelayan melakukan penangkapan ikan di laut pada saat musim angin besar. Pada sisi lain, kegiatan penangkapan tersebut tidak disertai dengan kapasitas armada, mesin, dan peralatan keselamatan yang memadai. Tidak jarang nelayan yang melaut tidak memiliki kemampuan berenang. Sehingga ketika terjadi kecelakaan laut akibat gelombang, nelayan sulit untuk menyelamatkan diri dan sering berujung pada kehilangan jiwa nelayan.

Kondisi ini dikuatkan oleh temuan informasi tentang kecelakaan laut yang terjadi pada Bulan Januari 2021, berupa terbaliknya 1 unit perahu dengan 3 orang ABK, yang menyebabkan 1 orang ABK meninggal, 1 orang selamat, dan 1 orang hilang. Kecelakaan terjadi kembali pada Bulan Februari-Maret (tepat pada saat survei ini dilaksanakan), yang melibatkan 3 unit perahu, dengan masing-masing 3 ABK dan ditemukan dalam kondisi selamat. Kecelakaan yang terjadi pada Bulan Maret berupa hanyutnya 3 perahu dengan masing-masing 3 ABK juga. Kondisi ini menguatkan betapa tingginya potensi kecelakaan laut yang dapat dihadapi oleh nelayan di Desa Pero Konda. Tidak hanya di Pero Konda, keluhan tentang keselamatan melaut juga ditemukan di Desa Lete Konda.

Pendapatan Nelayan saat Musim Angin Besar

Selain keselamatan, pendapatan nelayan juga masuk dalam kategori rentan lainnya. Kerentanan pendapatan nelayan ini terjadi terutama pada nelayan yang tidak memiliki alternatif pencaharian lainnya. Kerentanan terjadi terutama ketika musim angin besar/cuaca/gelombang, ketika musim

kosong ikan, maupun ketika terjadi kondisi COVID-19 yang terjadi tepat saat survei ini dilaksanakan. Nelayan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga akibat tidak adanya kegiatan penangkapan ikan pada durasi tersebut. Kasus khusus terkait dengan COVID 19, kesulitan yang dialami oleh nelayan adalah berkurangnya permintaan pasar yang membeli hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan. Pengurangan permintaan ini menyebabkan tidak terjualnya hasil tangkapan yang diperoleh, jika pun terjual umumnya dengan harga yang sangat murah. Pada sisi lain, nelayan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan ikan demi menyelamatkan hasil tangkapan yang tidak terjual.

Keamanan Masyarakat terkait dengan Kriminalitas

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kasus kriminalitas di wilayah studi terutama di klaster wilayah Kodi masih sering terjadi dan sering membuat masyarakat khawatir serta merasa tidak aman. Kekhawatiran ini sangat dirasakan terutama oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak, memiliki pendapatan hasil panen maupun aset lain yang dianggap barang mudah dijual (misalnya motor). Bentuk kriminalitas yang terjadi umumnya adalah pencurian, untuk kemudian pencuri meminta tebusan kepada pemilik benda yang dicuri. Kondisi ini juga dirasakan kurang aman dan mengkhawatirkan bagi para pendatang yang ingin berwisata ke wilayah ini.

Kekerasan terhadap Kaum Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan menjadi dimensi rentan yang juga perlu diperhatikan. Kerentanan terjadi terkait dengan kekerasan yang kerap diterima pihak perempuan, meliputi tradisi kawin paksa (yang umumnya dikaitkan dengan "Belis"), maupun kekerasan fisik dan verbal dalam rumah tangga ketika terjadi konflik rumah tangga. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif sangat rendah. Selain kekerasan, kerentanan kaum perempuan juga terjadi terkait dengan kondisi pernikahan usia dini, yang berlanjut dengan kehamilan usia muda. Ketidapahaman dan ketidaksiapan perempuan secara langsung menempatkan perempuan pada kategori ibu hamil dengan resiko tinggi. Pada kondisi lebih lanjut, tidak jarang perempuan harus berhadapan dengan kondisi kehamilan usia muda dan sering dalam frekuensi kehamilan yang cenderung sering dan jarak kehamilan yang sangat dekat. Keprihatian perempuan makin diperburuk oleh keterbatasan yang dihadapi, baik itu keterbatasan pengetahuan, kesiapan fisik dan psikis, serta keterbatasan perekonomian rumah tangga. Kondisi ini kemudian berkaitan dengan kondisi gizi buruk dan stunting pada balita.

KONFLIK SOSIAL

Konflik Lahan

Secara umum konflik lahan merupakan masalah yang sering terjadi di wilayah studi. Hal ini terjadi karena adanya klaim kepemilikan lahan dari sesama anggota keluarga atau anggota suku (fam). Di wilayah studi terdapat tanah adat atau tanah ulayat yang kepemilikannya dimiliki oleh adat.

Kehadiran investor/makelar tanah menambah runyam masalah lahan di wilayah studi. Di wilayah studi terdapat lahan yang telah dijual oleh anggota masyarakat kepada makelar, namun belakangan muncul klaim dari anggota keluarga lain terhadap lahan tersebut. Penjualan lahan tersebut diklaim

baru merupakan uang sirih pinang, bukan penjualan secara penuh karena pihak yang mengklaim merasa belum menerima pembayaran.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya mendorong Pemerintah Daerah untuk segera membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang pengaturan wilayah pesisir terkait 80 persen lahan pesisir sudah dikuasai oleh investor (<https://makassar.antaraneews.com/berita/72402/bpn-sbd-dorong-ranperda-pengaturan-wilayah-pesisir> diakses 15 Mei 2020 jam 23.59 WIB). Sebagian lahan pesisir dikuasai oleh kepemilikan investor baik lokal maupun asing. Perubahan kepemilikan lahan ini kedepannya bisa menjadi masalah besar.

Konflik lahan ditemui di semua wilayah studi. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir terjadi konflik lahan di wilayah studi. Paling baru adalah sengketa lahan di antar keluarga di Desa Pero Batang yang berbatasan dengan Desa Wura Homba (2020). Ketika survei lapangan dilakukan, masih belum ada penyelesaian terkait sengketa lahan ini.

Penyelesaian sengketa lahan biasanya secara adat, jika ada tindakan kekerasan maka penyelesaiannya menempuh jalur hukum. Pada umumnya sengketa lahan di wilayah studi biasanya diikuti dengan tindakan anarkis/chaos sehingga penyelesaiannya melibatkan aparat penegak hukum. Sampai saat ini beberapa kasus sengketa lahan di wilayah studi masih terjadi dan belum ada penyelesaian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konflik lahan ini berpotensi muncul kembali pada masa mendatang. Apalagi saat investor mulai melakukan pembangunan pada lahan yang telah dikuasai. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam penggunaan lahan di wilayah studi terutama saat melakukan program yang memakai lahan masyarakat.

Konflik Terkait dengan Kegiatan Adat

Kegiatan adat di wilayah studi terkadang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Eskalasi konflik ini sampai kepada tindakan anarkis/*chaos*. Permasalahan utama dari konflik ini adalah perselisihan antar pribadi, pengaruh minuman keras atau hutang adat yang jumlah pembayarannya kurang.

Berdasarkan informasi, terdapat mekanisme denda adat bagi penyelenggara (tuan pesta) jika ada keributan dalam kegiatan pesta/acara adat berlangsung. Konflik karena kegiatan adat ini bisa berpotensi menjadi konflik sosial antar masyarakat di wilayah studi.

Konflik Rumah Tangga

Secara umum konflik lainnya yang disebutkan oleh masyarakat adalah konflik rumah tangga yang umum terjadi. Penyelesaian konflik kategori ini umumnya dilakukan secara kekeluargaan dengan pihak yang terlibat adalah keluarga internal.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas diri, keterampilan, kesehatan, dan peningkatan akses finansial dapat menjadi jawaban dari keterbatasan aset manusia dan finansial yang ada untuk dapat mendukung penghidupan masyarakat berbasis sumber daya pesisir lokal.

GAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT

Berdasarkan persepsi masyarakat terdapat beberapa usulan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat. Secara garis besar, kebutuhan masyarakat dikelompokkan menjadi empat dimensi besar, yaitu kebutuhan pemberdayaan bidang perikanan beserta diversifikasinya; pemberdayaan bidang pariwisata dan budaya; pemberdayaan peningkatan kapasitas diri; dan kebutuhan penyediaan sarana-prasarana. Rincian usulan kebutuhan masyarakat secara spesifik disampaikan pada subbab di bawah.

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan

Mekanik mesin perahu

Alasan penting: Saat ini nelayan kesulitan ketika mesin mengalami kerusakan, karena perbaikan hanya bisa dilakukan dengan membawa mesin ke bengkel khusus yang ada di luar desa, bahkan ke Lombok/Bima.

Sasaran/target: (1) Nelayan, terutama pemuda; (2) Nelayan peserta pelatihan sebelumnya (20 orang) dapat dilibatkan sebagai tim pelatih untuk meningkatkan rasa percaya diri yang dimiliki.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Beberapa nelayan sudah pernah memperoleh pelatihan serupa sebelumnya. Diharapkan keterlibatan nelayan tersebut akan dapat mengefektifkan program dengan cara belajar & berlatih bersama (menularkan pengalaman dan keterampilan yang telah dimiliki).

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Kegiatan ini akan membutuhkan pendampingan dalam waktu cukup lama (3-5 tahun), hingga nelayan benar-benar percaya diri; (2) Perlu untuk menghimpun nelayan ke dalam sebuah kelompok profesi "teknisi mesin perahu" yang berlanjut; (3) Untuk dapat menjadikannya sebagai usaha ekonomi, selain keterampilan dan rasa percaya diri maka akan diperlukan pemodal awal untuk pembelian peralatan, serta tempat kerja yang dapat diakses oleh nelayan dengan mudah.

Introduksi alat penangkapan ikan yang efektif dan ramah lingkungan

Alasan penting: Terdapat ketergantungan nelayan terhadap penangkapan ikan. Aset alam di bidang perikanan tangkap memadai dan prospektif dikembangkan. Penguasaan teknik penangkapan ikan yang masih sangat terbatas dan mengandalkan kemampuan otodidak yang diperoleh secara turun-temurun. Masih terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan teknik yang tidak ramah lingkungan.

Sasaran/target: Nelayan di seluruh desa studi

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Nelayan telah terbiasa melakukan penangkapan ikan ke laut; (2) Nelayan memiliki keingintahuan dan semangat untuk menguatkan kegiatan perikanan tangkap sebagai kegiatan ekonomi; (3) Nelayan belum memiliki preferensi yang sangat kuat terhadap alat tertentu, sehingga introduksi penangkapan ramah lingkungan akan lebih mudah diterima; (4) Nelayan memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik terhadap teknik penangkapan baru.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Introduksi yang dilakukan benar-benar dari tahap awal (pengenalan, pengetahuan, sosialisasi, praktik); (2) Perlu dilakukan pengelolaan nelayan berupa pelatihan pengelompokan diri sesuai dengan kebutuhan operasional alat tangkap yang dikenalkan dan yang akan digunakan; (3) Kendala permodalan kegiatan menjadi hal yang perlu diatasi, misal melalui aktivasi peran BUMDES yang ada.

Teknik budidaya rumput laut

Alasan penting: Usulan ini disampaikan oleh nelayan di Desa Wainyapu dan Pero Batang, dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi pesisir di desa ini.

Sasaran/target: Masyarakat pesisir di Desa Pero Batang dan Wainyapu.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Menurut masyarakat, area pesisir Pero Batang dan Wainyapu cukup mendukung untuk kegiatan budidaya rumput laut. Penjelasan ini merujuk pada pengalaman pelatihan budidaya yang pernah diselenggarakan di Pero Batang dan pengalaman keberadaan kegiatan budidaya rumput laut yang pernah dilakukan oleh perusahaan di Wainyapu.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Kegiatan ini perlu didahului kajian spesifik terkait dengan kesesuaian perairan untuk mendukung budidaya rumput laut; (2) Akan membutuhkan pengenalan teknik mulai dari awal "0" termasuk penanganan hama dan penyakit mengingat masyarakat belum memiliki pengalaman secara langsung; (3) Akan berhadapan dengan siklus penyediaan bibit untuk keberlanjutan usaha budidaya; (4) Akan berhadapan dengan persoalan permodalan, mengingat di desa ini belum ditemukan pihak pemodal yang dapat berperan untuk ini; (5) Perlu memastikan dukungan dari sarana lain meliputi lahan dan alat untuk penjemuran, gudang penyimpanan, dan pasar yang akan bersedia membeli hasil budidaya secara kontinyu.

Pengolahan cumi

Alasan penting: Pemberdayaan ini dirasakan sangat penting oleh masyarakat di Desa Pero Konda dan Pero Batang. Keberadaan pengolahan cumi akan dapat membantu nelayan mempertahankan nilai ekonomi cumi ketika menghadapi musim banjir cumi. Pengolahan cumi juga diharapkan mampu memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat karena dapat menciptakan efek bisnis yang cukup luas (dari penyedia es, pengangkut cumi, pembersih cumi, pengolah cumi, pengemas cumi, dan pemasaran). Terdapat rencana pengembangan wisata yang membutuhkan produk khas sebagai oleh-oleh wisata. Hasil olahan cumi dipandang akan dapat menjadi produk khas Pero Konda.

Sasaran/target: Masyarakat pesisir di Pero Konda dan Pero Batang, terutama kaum perempuan yang telah pernah mendapatkan pelatihan serupa.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat telah memiliki kemampuan pengolahan yang diperoleh dari program pemberdayaan sebelumnya. Hanya saja belum dikembangkan menjadi usaha perikanan yang bernilai ekonomi.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Pengelompokan masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha; (2) Proses label halal termasuk pengemasan; (3) Penyediaan pasar hasil olahan; (4) Permodalan usaha yang terbatas.

Pengolahan rumput laut

Alasan penting: Ingin menciptakan perluasan kegiatan ekonomi berbasis rumput laut hasil budidaya setempat sebagai sumber pendapatan alternatif.

Sasaran/target: Masyarakat pesisir di Lete Konda, terutama kaum perempuan.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat telah memiliki pengalaman pemberdayaan serupa. Hanya saja masih belum berhasil menghasilkan produk olahan yang dapat menembus pasar.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Akan berhadapan dengan persoalan inovasi yang mungkin tidak mudah diserap dalam durasi waktu pelatihan yang singkat. Sehingga perlu dipertimbangkan sebuah pendampingan; (2) Akan berhadapan dengan proses perolehan label halal dan penyediaan pasar untuk dapat mengembangkan kegiatan ini menjadi kegiatan/usaha ekonomi; (3) Akan berhadapan dengan persoalan permodalan, mengingat belum adanya pihak pemodal yang dapat berperan untuk hal ini. Saat ini nelayan masih mengupayakan permodalan secara individual; (4) Akan berhadapan dengan persoalan pengorganisasian masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan lebih mudah serta untuk meningkatkan peluang akses permodalan maupun bantuan dari pihak lain (termasuk pemerintah).

Pengolahan garam yodium dan ramah lingkungan

Alasan penting: Meningkatkan harga jual garam. Menghasilkan produk garam yang sehat karena garam yang dihasilkan umumnya langsung dikonsumsi oleh rumah tangga. Dapat mengatasi persoalan kayu bakar, asap, dan kesehatan masyarakat dari proses pemasakan garam. Mengatasi persoalan kesulitan mengambil air laut saat musim hujan, karena pengolahan garam harus mengambil dari laut yang agak ke tengah.

Sasaran/target: Masyarakat pesisir di Lete Konda, terutama kaum perempuan.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat sudah memiliki pengalaman pemberdayaan serupa, hanya saja belum berhasil.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Akan berhadapan dengan persoalan inovasi yang mungkin tidak mudah diserap dalam durasi waktu pelatihan yang singkat. Sehingga perlu dipertimbangkan sebuah pendampingan; (2) Akan berhadapan dengan permodalan penyediaan alat bantu kegiatan (pompa air untuk mengangkat air laut menuju rumah garam, serta tungku ramah lingkungan).

Pemberdayaan Bidang Pariwisata dan Budaya

Pelatihan pemandu wisata lokal

Alasan penting: Agar masyarakat dan desa memiliki kemampuan untuk mengelola potensi wisata yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata akan dapat berdampak secara ekonomi untuk masyarakat pesisir.

Potensi wisata pantai didukung oleh keberadaan wisata budaya.

Sasaran/target: Masyarakat dengan potensi wisata yang memadai, meliputi masyarakat di Pero Konda, Wainyapu, dan Tana Mete.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Masyarakat memiliki potensi wisata; (2) Masyarakat dan desa memiliki kemauan yang kuat mengembangkan kegiatan wisata; (3) Beberapa pemuda pemudi pernah memperoleh pelatihan pemandu wisata yang diselenggarakan oleh HPI.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Akan berhadapan dengan persoalan pengorganisasian masyarakat; (2) Membutuhkan pendampingan yang cukup panjang mengingat konteks wisata yang cukup kompleks; (3) Membutuhkan upaya ekstra untuk pembangunan karakter masyarakat agar dapat mendukung kegiatan wisata yang ramah, sehat, aman, asri, dan berkelas; (4) Untuk dapat mewujudkan program ini ke dalam sebuah kegiatan ekonomi yang berlanjut maka diperlukan sarana prasarana yang memadai, meliputi akses jalan, perbaikan PHBS dan tingkat keamanan masyarakat; (5) Perlu pengorganisasian masyarakat yang belum terbentuk.

Penguasaan bahasa asing

Alasan penting: Untuk mendukung rencana kegiatan wisata.

Sasaran/target: Pemuda pemudi di desa pesisir dengan potensi wisata (Pero Konda, Wainyapu, Tana Mete).

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Terdapat anak-anak lulusan SMA yang sudah mempelajari bahasa asing (Inggris); (2) Terdapat pemuda pemudi yang telah memiliki pengalaman bekerja di sektor pariwisata di Bali.

Tantangan yang akan dihadapi: Akan membutuhkan waktu pelatihan dan pendampingan jangka panjang.

Penguasaan ilmu komputer

Alasan penting: Untuk mendukung kegiatan wisata dan administrasi umum.

Sasaran/target: Pemuda pemudi di desa pesisir dengan potensi wisata (Pero Konda, Wainyapu, Tana Mete).

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Belum ada pengalaman.

Tantangan yang akan dihadapi: Akan berhadapan dengan kendala teknis (peralatan) dan penyesuaian diri peserta pelatihan.

Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas

Sosialisasi dan edukasi tentang perikanan ramah lingkungan

Alasan penting: Karena semua desa memiliki aset alam berupa perikanan tangkap yang memadai untuk dikembangkan. Pengetahuan dan pemahaman tentang penangkapan ramah lingkungan masih sangat terbatas. Terdapat beberapa kegiatan penangkapan yang bersifat merusak biodiversitas dan ekosistem (penangkapan biota dilindungi, pencongkelan karang, dan penangkapan dengan menginjak maupun menyangkutkan jaring pada karang).

Sasaran/target: Seluruh desa studi.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat sudah terbiasa melakukan penangkapan ikan di laut.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Tantangan pelaksanaan program ini adalah penyiapan materi agar mudah dipahami oleh masyarakat; (2) Akan dibutuhkan waktu untuk pelatihan disertai simulasi sehingga masyarakat memahami mengapa kegiatan A dikategorikan tidak ramah, dan mengapa kegiatan B dianjurkan untuk dilakukan.

Edukasi tentang pola gizi keluarga

Alasan penting: Masih buruknya pemenuhan gizi keluarga yang disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat dan kondisi perekonomian rumah tangga.

Sasaran/target: Seluruh masyarakat terutama kaum perempuan dan kaum ibu rumah tangga.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat belum memiliki pengalaman tentang ini.

Tantangan yang akan dihadapi: Edukasi ini akan berhadapan dengan penerimaan "mindset", karena melibatkan perubahan kebiasaan yang disertai dengan beberapa keterbatasan (ekonomi, waktu, dan pendidikan).

Edukasi tentang pola asuh anak usia balita

Alasan penting: Masih terdapat kasus stunting hampir di semua desa studi. Disebutkan bahwa penyebab utama dari kondisi ini adalah keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak, serta kondisi perekonomian rumah tangga yang menyebabkan kaum ibu lebih sibuk mengurus kegiatan di ladang sehingga kerap mengabaikan keteraturan pola makan anak.

Sasaran/target: Seluruh orang tua, terutama orang tua dengan anggota keluarga usia balita.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat belum memiliki pemahaman dan pengalaman tentang edukasi pola asuh anak.

Tantangan yang akan dihadapi: Edukasi ini akan berhadapan dengan penerimaan "mindset", karena melibatkan perubahan kebiasaan yang disertai dengan beberapa keterbatasan (ekonomi, waktu, dan pendidikan).

Pelatihan penyelamatan diri di laut

Alasan penting: Tingginya peluang kecelakaan laut di desa studi. Kemampuan nelayan untuk menyelamatkan diri di laut masih sangat rendah.

Sasaran/target: Seluruh nelayan, terutama nelayan di Pero Konda, Pero Batang, dan Lete Konda.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat terbiasa melaut namun belum memiliki modal apapun terkait dengan penyelamatan diri di laut.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah terkait dengan sarana prasarana penyelamatan diri.

Pelatihan pengawasan laut dan pesisir

Alasan penting: Masyarakat ingin memiliki kemampuan dan ketegasan untuk menghadapi dan mencegah para nelayan yang menggunakan bom di sekitar area penangkapan ikan terutama sekitar terumbu karang di pesisir. Masyarakat merasa tidak memiliki keberanian dan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan.

Sasaran/target: Nelayan terpilih di semua desa studi. Sebaiknya nelayan dipilih sesuai dengan kemampuan untuk melakukan pengawasan.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Belum memiliki modal apapun untuk hal ini.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah terkait dengan sarana prasarana dan kapasitas SDM.

Penyediaan Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendukung PAUD

Alasan penting: Untuk meningkatkan kualitas belajar anak PAUD, dengan memperbanyak fasilitas bermain. Agar anak-anak tetap bahagia ketika para ibu sedang mengupayakan kegiatan ekonominya.

Sasaran/target: Desa Lete Konda

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Tidak ada.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah terkait dengan sarana-prasarana, area, dan keberlanjutan kegiatan.

Sarana produksi perikanan (es, cold storage untuk penyimpanan dan pembekuan ikan)

Alasan penting: Penanganan pasca tangkap ikan masih sangat terbatas. Kondisi ini juga membatasi rencana pemasaran hasil tangkapan. Nelayan harus buru-buru menjual hasil tangkapan ke rumah tangga sebelum ikan mengalami penurunan kualitas. Bagi nelayan yang memiliki alat penyimpanan dan pembekuan, pemasaran ikan dapat dilakukan dengan menunggu hari pasaran tiba, sehingga nilai jual lebih baik.

Sasaran/target: Semua desa studi, terutama di Pero Konda dan Lete Konda.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Nelayan belum memiliki modal apapun terkait dengan sarana prasarana produksi (baik sarana utama maupun pendukung).

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah permodalan, serta sarana fisik pendukung lainnya seperti listrik.

Penyediaan pasar hasil tangkapan (ikan dan biota laut lainnya)

Alasan penting: Karena pasar penampung hasil tangkapan masih sangat terbatas.

Sasaran/target: Semua desa studi.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat belum memiliki modal terkait dengan hal ini. Pengepul hanya terdapat di Pero Konda (ini pun hanya khusus cumi dan abalone), dan penyambang

hanya terdapat di Lete Konda. Di wilayah lain, hampir tidak ada sarana prasarana pasar hasil tangkapan.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah pembentukan jaringan pasar dan permodalan.

Penyediaan pasar untuk produk olahan hasil laut

Alasan penting: Belum tersedia pasar sehingga produk olahan belum diproduksi. Pero Konda memiliki potensi pengembangan wisata yang akan membuka peluang untuk penjualan produk olahan hasil laut sebagai oleh-oleh khas wisata.

Sasaran/target: Pero Konda dan Lete Konda.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat belum memiliki modal terkait dengan hal ini.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah pembentukan jaringan pasar dan permodalan, serta penentuan produk olahan khas yang akan dibuat.

Penyediaan pasar untuk ekonomi kreatif tenun

Alasan penting: di desa klaster Kodi memiliki produk ekonomi kreatif berupa tenun. Namun perkembangannya masih terkendala keterbatasan akses pasar dan permodalan.

Sasaran/target: Seluruh desa studi, terutama di klaster Kodi.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Masyarakat telah memiliki keterampilan memadai terkait dengan tenun. Bahkan di Desa Tana Mete telah memiliki pusat galeri tenun.

Tantangan yang akan dihadapi: Tantangan yang akan dihadapi adalah pengorganisasian kelompok penenun, serta pengemasan pasar yang akan dilakukan untuk produk tersebut.

GAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR LAINNYA BERDASARKAN HASIL KAJIAN TERHADAP PENGUASAAN ASET DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI BUDAYA

Selain kebutuhan yang menjadi usulan dari masyarakat, berdasarkan dari pengkajian terhadap penguasaan aset dan kondisi sosial ekonomi budaya terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar namun belum menjadi usulan. Secara garis besar kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pengorganisasian masyarakat berdasarkan profesi (yang terkait dengan pesisir dan laut), pembentukan lembaga keuangan yang dapat diakses masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan permodalan kegiatan ekonomi maupun kebutuhan dana kebutuhan rutin; serta beberapa kebutuhan yang berifat teknis untuk meningkatkan kualitas produk hasil tangkapan maupun produk budidaya rumput laut.

Pengorganisasian Masyarakat

Pembentukan kelompok profesi perikanan

Alasan penting: Saat ini belum tersedia kelompok profesi terkait dengan pesisir dan laut yang mewadahi masyarakat. Memudahkan komunikasi, koordinasi, dan pengelolaan. Memudahkan masyarakat ketika hendak mengusulkan bantuan program ke instansi pemerintah.

Sasaran/target: Masyarakat pesisir.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Masyarakat memiliki nilai sosial yang cukup kuat; (2) Masyarakat sudah terbiasa melakukan kegiatan secara bersama (dalam kelompok); (3) Partisipasi sosial dalam kegiatan bersama relatif baik.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Menentukan kelompok agar merata secara kapasitas SDM, mengingat nilai kekeluargaan di area studi yang relatif kuat, yang potensial akan menghasilkan kelompok berdasarkan hubungan keluarga yang mungkin tidak berimbang secara kapasitas SDM; (2) Potensi kecemburuan sosial yang dimiliki membutuhkan pemetaan target program yang lebih detail.

Pembentukan kelembagaan keuangan

Pembentukan koperasi nelayan

Alasan penting: Saat ini belum tersedia kelembagaan ekonomi yang dapat diakses oleh nelayan terkait dengan kebutuhan permodalan kegiatan, maupun kebutuhan dana darurat. Kapasitas permodalan pribadi yang dimiliki nelayan sangat terbatas. Keberadaan pengepul sebagai pemodal masih sangat terbatas dan hanya terdapat di Desa Pero Konda dan Lete Konda. Masyarakat pesisir membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan.

Sasaran/target: Desa dan masyarakat.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Setiap desa memiliki BUMDES yang dapat diaktifkan dan disinergikan untuk mendukung kegiatan pesisir dan laut; (2) Keberadaan pengepul di Desa Pero Konda dan Lete Konda dapat dijadikan media penciptaan pemodal-pemodal baru.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Pengaktifan BUMDES ke sektor pesisir dan laut akan membutuhkan waktu dengan berbagai persiapan (modal dan pemahaman usaha ekonomi yang akan dijalankan); (2) Mensinergikan para pengepul aktif akan membutuhkan proses edukasi dan pemahaman sosial terkait dengan upaya memajukan masyarakat secara umum; (3) Masyarakat belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan dasar yang akan menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan lembaga yang akan dibentuk. Sehingga membutuhkan pelatihan secara khusus terhadap masyarakat, terutama pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan; (4) Hubungan kekeluargaan yang kuat juga akan menjadi tantangan profesionalisme dalam menjalankan pengelolaan finansial.

Perbaikan Teknik Penangkapan Pasca Panen Rumput Laut

Pelatihan dan pengadaan sarana pengeringan rumput laut

Alasan penting: Masyarakat masih terkendala dalam pengeringan rumput laut yang memadai. Pemahaman masyarakat terkait dengan teknik pengeringan rumput laut masih sangat terbatas. Masyarakat tidak memiliki sarana pengeringan yang memadai.

Sasaran/target: Masyarakat pembudidaya rumput laut.

Modal yang telah dimiliki masyarakat: (1) Produksi rumput laut yang berkesinambungan sepanjang tahun; (2) Area kegiatan memiliki intensitas sinar matahari yang memadai; (3) Area pesisir yang relatif luas dan dapat digunakan untuk lokasi penjemuran rumput laut.

Tantangan yang akan dihadapi: Permodalan untuk pengadaan sarana penjemuran (para-para/paranet dan sejenisnya).

Pengembangan Kegiatan Perikanan Tangkap

Pemberdayaan penanganan hasil tangkapan pasca tangkap

Alasan penting: Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sehingga tetap sehat, aman, dan memiliki harga yang stabil. Nelayan masih belum melakukan penanganan pasca tangkap secara memadai

Sasaran/target: Nelayan

Modal yang telah dimiliki masyarakat: Hasil tangkapan yang selalu ada sepanjang tahun.

Tantangan yang akan dihadapi: (1) Permodalan terkait dengan pengadaan sarana (penyimpanan beku), dan pabrik es; (2) Membangun pemahaman nelayan tentang kondisi ikan yang merupakan produk mudah rusak; (3) Memotivasi nelayan untuk menghasilkan produk tangkapan yang berkualitas baik (sehat dan aman untuk dikonsumsi).

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang dianggap penting dan berpengaruh terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir di tingkat desa. Tokoh ini dianggap penting karena kesiapan dan kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi persoalan di desa, beberapa tokoh merupakan pemilik modal finansial yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung, dan terdapat relasi sosial yang berbeda di setiap tokoh masing-masing desa. Hasil peta tokoh penting ini bersifat sangat dinamis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial.

PEMETAAN TOKOH KUNCI

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan bersama perwakilan responden, di wilayah studi belum ditemukan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (lokal, nasional, Internasional), kelompok masyarakat, Organisasi Massa (Ormas) maupun program *Coorporate Social Responsibility* perusahaan yang fokus pada wilayah pesisir dan laut. Secara umum di wilayah studi terlihat bahwa tokoh masyarakat/tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemerintahan menjadi panutan masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai pemangku kepentingan.

Penggunaan peta pemangku kepentingan dan peta jaringan sosial ini hanya berlaku sesaat (jangka waktu yang pendek) karena secara sosial sifatnya sangat dinamis. Di antara lima desa studi, terdapat tiga desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa pada Bulan Juli 2021. Hal ini dapat berpeluang mengubah posisi kuadran dan peta jaringan sosial. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan program, diperlukan pengecekan ulang posisi kuadran pemangku kepentingan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumba Barat Daya dikategorikan kedalam Kuadran I. pemangku kepentingan di kuadran I adalah pihak yang mempunyai kepentingan tinggi dan pengaruh yang tinggi.

Strategi yang bisa diterapkan adalah diikutsertakan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, dilibatkan dan tempat untuk konsultasi. SKPD yang dapat dikategorikan kedalam kuadran I dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut adalah Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan SKPD lainnya.

Selain itu, di wilayah studi terdapat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang merupakan kelembagaan di bawah pemerintahan desa. BUMDES yang telah melakukan pengelolaan daerah pesisir baru di Desa Pero Konda yang mulai mengelola pantai wisata. Di desa studi lainnya BUMDES yang ada unit usahanya masih bidang perdagangan dan jasa, misalnya usaha sembako atau bengkel seperti di Desa Wainyapu. Melihat potensi desa yang ada, kedepannya kerjasama dengan BUMDES dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, di tingkat desa tokoh masyarakat memegang peran penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menumpukan proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama kepada tokoh-tokoh masyarakat selain pemerintah desa. Gambaran tokoh penting di tingkat desa disampaikan secara rinci dalam subbab berikutnya.

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN JARINGAN SOSIAL DI DESA PERO KONDA

Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan di Desa Pero Konda (**Gambar 21**) ditemukan pemangku kepentingan pada Kuadran II (*Keep Satisfied*) yaitu Bapak H. Ali Puastrory. Pemangku kepentingan pada kuadran II merupakan pemangku kepentingan yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan terhadap program pesisir dan laut. Pemangku kepentingan ini bukan target utama pelaksanaan program pada di masa mendatang namun bisa berpeluang untuk menentang atau minimal mengintervensi rencana program. Pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat dan mampu menggerakkan massa untuk menentang kebijakan. Pelibatan H. Ali Puastory dapat sebagai tempat untuk konsultasi dan memberikan pertimbangan. Pihak eksternal perlu memastikan bahwa keberadaan

Beliau penting, dan selalu memberikan perkembangan dan informasi-informasi penting kepada tokoh di kuadran II ini.

Terdapat 5 orang pemangku kepentingan di kuadran III (*Keep Informed*) yaitu H. Koda Sanggore, Muhammad H Hada, Eldim H Abdullah, Abidin Hamid dan Sofyan Salman. Stakeholder pada kuadran ini adalah pihak yang sangat penting namun pengaruhnya rendah. Pemangku kepentingan ini harus terus diberikan informasi yang cukup mengenai rencana program yang akan dilakukan. Butuh upaya-upaya atau strategi-strategi khusus agar pemangku kepentingan pada kudran III ini yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka akan sejalan dengan tujuan program.

Pada kuadran IV (*Minimal effort*) terdapat beberapa pemangku kepentingan yaitu Topan Salman, Adnan Story, Hj. Khatijah Story, Muklis Lepo, Abdul Hamid Lepo, Lalu Erwin S, Sudarmono, Koda Sigore, Ikbal Abdullah dan Benyamin kaka. Pemangku kepentingan pada kuadran ini merupakan pihak yang berada prioritas rendah tetap tetap diperlukan monitoring dan evaluasi yang terbatas. Untuk pelaksanaan program di masa depan, pemangku kepentingan pada kuadran ini boleh untuk tidak dilibatkan namun akan lebih baik tetap dilibatkan dan terus diberi informasi dan dipantau.

Pemetaan pemangku kepentingan di Desa Pero Konda ini dalam kondisi dinamis karena pada tahun 2021 akan dilaksanakan pemilihan kepala desa. Sebelum pelaksanaan program, diperlukan pengecekan ulang terhadap posisi stakeholder di masing-masing kuadran. Biasanya setelah pemilihan kepala desa, kondisi tatanan sosial suatu desa akan mengalami perubahan sehingga posisi kuadran dapat berubah.

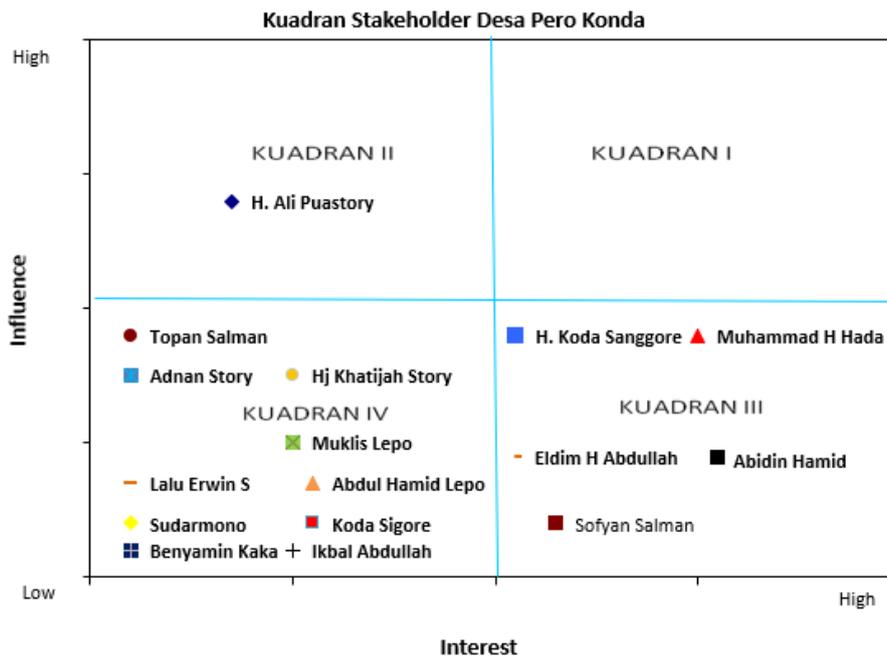
Pada **Gambar 22** dapat dilihat peta jaringan sosial pemangku kepentingan di Desa Pero Konda. Desa Pero Konda merupakan desa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dari hasil analisis, terdapat 3 tokoh masyarakat yang merupakan tokoh penting dan dianggap oleh masyarakat mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial di masyarakat. Tiga tokoh tersebut yaitu adalah H. Ali Puastory, H. Koda Sanggore dan Muhammad H. Hada. Pada gambar diatas juga dapat dilihat profil singkat ketokohan pemangku kepentingan.

Secara umum jaringan sosial pemangku kepentingan di Desa Pero Konda terbentuk dari hubungan kekeluargaan, hubungan pemerintahan dan jaringan ekonomi. Pemangku kepentingan di Desa Pero Konda memiliki beberapa identitas sosial misalnya bapak Sofyan Salman yang merupakan Sekretaris Desa Pero Konda juga merupakan bos/pengepul cumi. Contoh lainnya H. Ali Puastory yang merupakan Mantan Kades Perokonda beliau juga mantan anggota Dewan SBD dan beliau juga dulunya salah satu bos/pengepul cumi "senior" di Desa Pero Konda.

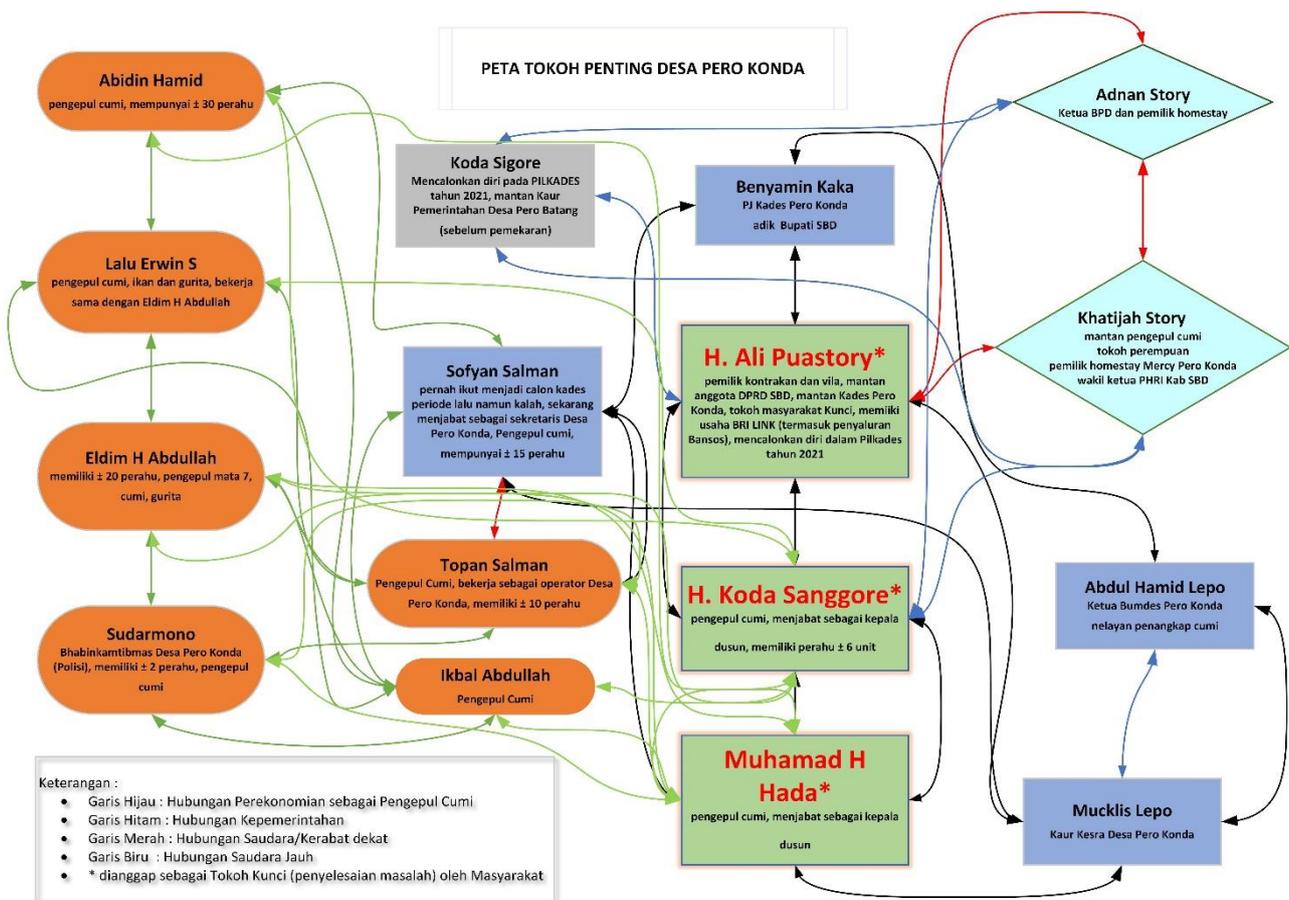
Berdasarkan hubungan kekeluargaan dapat dibedakan menjadi hubungan kekerabatan dekat dan hubungan kekerabatan jauh. Hubungan kekerabatan dekat misalnya terlihat pada gambar antara H. Ali Puastori, Adnan Story dan H. Khatijah Story merupakan kerabat dekat karena merupakan saudara kandung. Demikian pula antara Topan Salman dengan Sofyan Salman dan Muklis Lepo dengan Abdul Hamid Lepo, mereka masih ada hubungan kakak beradik.

Hubungan saudara jauh pada gambar ditandai dengan garis berwarna hijau. Ikatan kekeluargaan diantara pemangku kepentingan di Desa Pero Konda tinggi. Calon kepala desa akan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa Pero Konda Tahun 2021 yaitu H. Ali Puastory dan Koda Sigore. Kedua tokoh ini masih ada hubungan saudara jauh. Hubungan pemerintahan ditandai dengan garis hitam.

Di Desa Pero Konda terdapat jaringan pengepul cumi yang pada gambar di atas ditandai dengan garis berwarna hijau. Pengepul cumi yang cukup menonjol adalah Bapak Abidin Hamid, memiliki sekitar 30 perahu yang diusahakan oleh nelayan. Selain itu terdapat beberapa pengepul lainnya misalnya Sofyan Salman, Eldim H Abdullah dan beberapa pengepul/bos cumi lainnya.



Gambar 21. Peta pemangku kepentingan Desa Pero Konda



Gambar 22. Jaringan sosial pemangku kepentingan masyarakat pesisir di Desa Pero Konda

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN JARINGAN SOSIAL DI DESA PERO BATANG

Di Desa Pero Batang teridentifikasi satu orang pemangku kepentingan di Kuadran III (penerima informasi) yaitu Bapak Johannes R Kaka (**Gambar 23**). Pihak ini harus terus diberi informasi yang cukup mengenai program. Bapak Johannes R. Kaka adalah kepala desa definitif Desa Pero Batang tahun berjalan. Pengaruh dari pemangku kepentingan di kuadran ini rendah namun memiliki interest yang tinggi, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pero Batang.

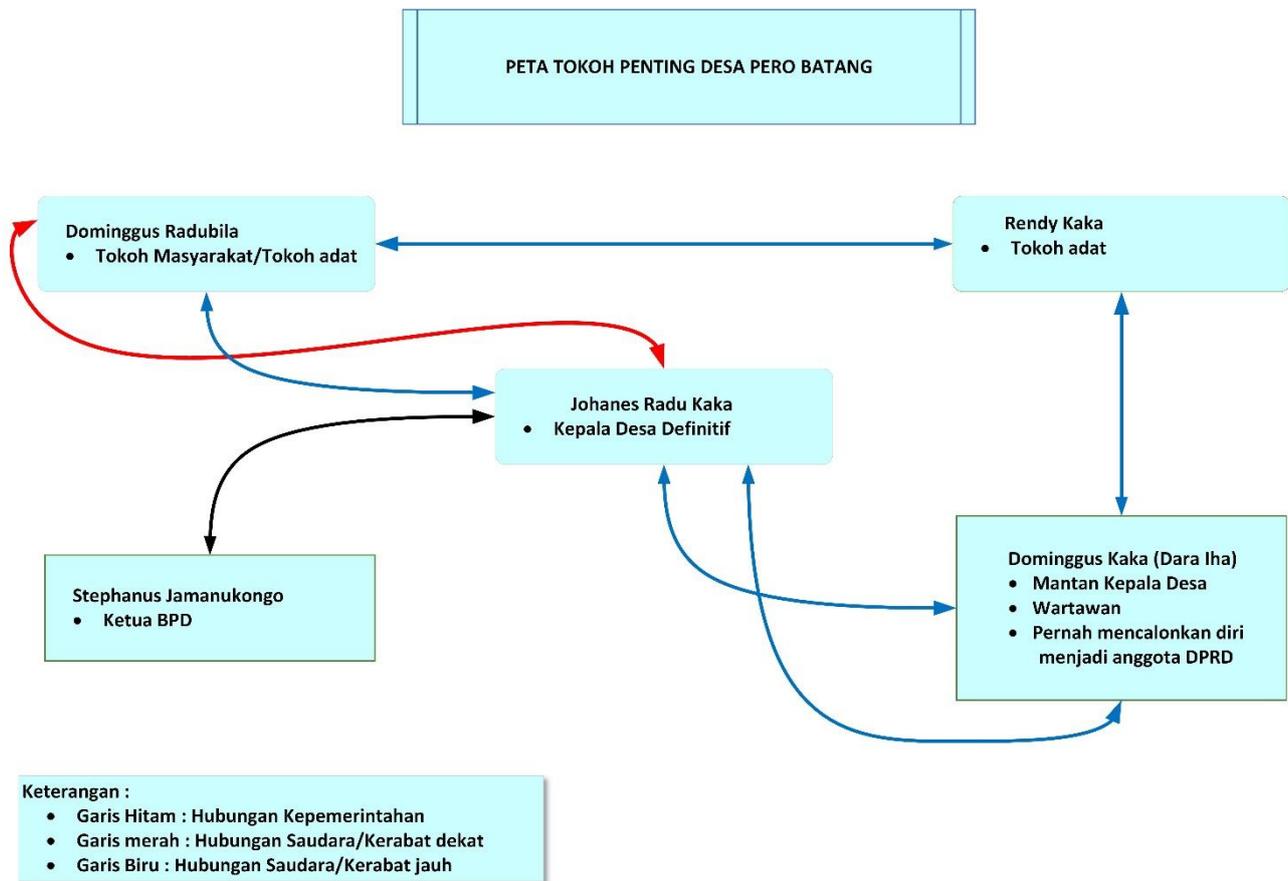
Pemangku kepentingan yang berada di Kuadran IV di Desa Pero Batang ada empat orang yaitu Dominggus Radubila, Stephanus Jamanukongo, Dominggus Kaka dan Randy Kaka. Pemangku kepentingan di kuadran ini adalah pengamat yaitu pihak yang berada di prioritas rendah. Pelibatan pemangku kepentingan di kuadran ini misalnya dengan tetap memberikan informasi mengenai perkembangan program. Pemberian informasi dapat berupa informasi-informasi umum, dapat melalui sosialisasi sosialisasi atau pertemuan informal.

Di Pero Batang jaringan sosial yang terbentuk adalah jaringan sosial kekerabatan dan hubungan pemerintahan formal (**Gambar 24**). Jaringan sosial kekerabatan yaitu kekerabatan dekat antara Dominggus Radubilla dengan Johannes Radu Kaka. Kekerabatan saudara jauh pada peta jaringan sosial diatas ditandai dengan garis berwarna biru. Secara umum, di Desa Pero Batang latar belakang pemangku kepentingan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemimpin formal pemerintahan.

Tokoh masyarakat yang cukup menonjol di Desa Pero Batang adalah Dominggus Kaka yang adalah mantan kepala desa, wartawan dan pernah mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Permasalahan-permasalahan sosial (misalnya terkait klaim/sengketa lahan) yang terjadi di Desa Pero Batang, sebelum menempuh jalur hukum (kepolisian) biasanya diselesaikan dulu oleh pemerintahan desa dengan dibantu oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat.



Gambar 23. Peta pemangku kepentingan Desa Pero Batang



Gambar 24. Jaringan sosial pemangku kepentingan masyarakat pesisir di Desa Pero Batang

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN JARINGAN SOSIAL DI DESA WAINYAPU

Di Desa Wainyapu pada tahun 2021 juga akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang akan bertarung dalam ajang demokrasi ini, yaitu Yakop Holo dan Yulius Wainigha. Berdasarkan informasi yang diperoleh pemilihan kepala desa di Desa Wainyapu akan dilakukan pada tanggal 30 Juni tahun 2021.

Kondisi sosial menjelang pemilihan kepala desa di Desa Wainyapu sudah mulai terlihat dan terasa. Masyarakat sudah mulai ada yang berkelompok sesuai dengan dukungan politiknya. Kondisi ini menyebabkan “ketegangan politik” di Desa Wainyapu sangat terasa, berbeda dengan kondisi sosial di Desa Pero Konda yang lebih tenang padahal tahun ini akan ada pemilihan kepala desa dan sama-sama dua calon kepala desa. Informan penelitian menyampaikan bahwa biasanya satu sampai dua tahun setelah pemilihan kepala desa, ketegangan antara dua kubu calon kepala desa akan masih terasa.

Di Desa Wainyapu potensi kecemburuan sosial, dendam dan konflik sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi nanti, pelaksana program harus bisa berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat dan keterwakilan dari kelompok-kelompok yang ada, misalnya keterwakilan dari semua dusun atau kelompok yang berseberangan/konflik (jika ada).

Berdasarkan analisis pemangku kepentingan (**Gambar 25**), di Desa Wainyapu teridentifikasi satu orang pemangku kepentingan pada Kuadran II yaitu Bapak Oktavianus Dari. Pemangku kepentingan

pada kuadran II ini mempunyai daya pengaruh yang tinggi tetapi tidak terlalu berkepentingan. Ada kemungkinan tokoh ini dapat sangat mendukung program atau bahkan dapat menjadi penentang. Oleh karena itu, karena pengaruhnya besar maka hubungan baik mesti dibangun dengan tokoh di kuadran II ini. Strategi yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan informasi mengenai program dan meminta pertimbangan terkait pandangan-pandangan mereka.

Pemangku kepentingan di Kuadran III terdapat 2 orang yaitu Yakop Holo dan Yulius Wainigha. Kedua pemangku kepentingan pada kuadran III ini adalah calon kepala desa yang akan ikut pemilihan kepala desa tahun 2021 ini. Bapak Yulius Wainigha merupakan kepala desa yang menjabat pada periode sebelumnya.

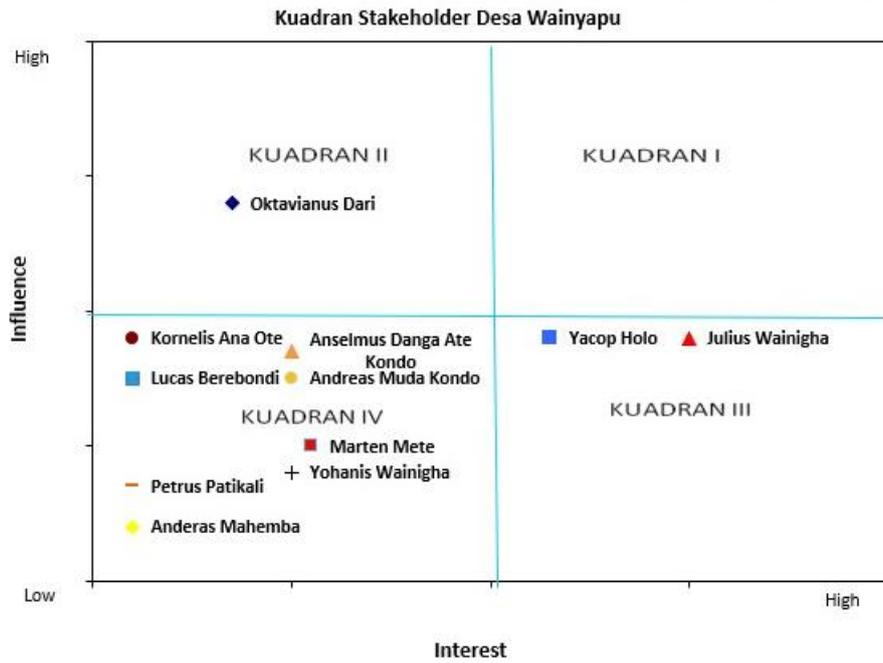
Pemangku kepentingan pada Kuadran II adalah tokoh yang mempunyai pengaruh kuat namun tidak terlalu berkepentingan terhadap program. Oleh karena itu, strategi yang bisa dilakukan adalah membangun komunikasi yang baik, meminta pertimbangan atau melakukan konsultasi tentang rencana program dan memberikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan tokoh di kuadran II ini. Bapak Oktavianus Dari adalah mantan kepala desa di Wainyapu dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Sumba Barat Daya, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Di Desa Wainyapu terdapat beberapa pemangku kepentingan pada kuadran IV yaitu tokoh yang memiliki pengaruh yang rendah. Tokoh pada kuadran IV ini bisa dilibatkan atau tidak dilibatkan. Tidak ada strategi yang sangat khusus kepada tokoh di kuadran IV ini.

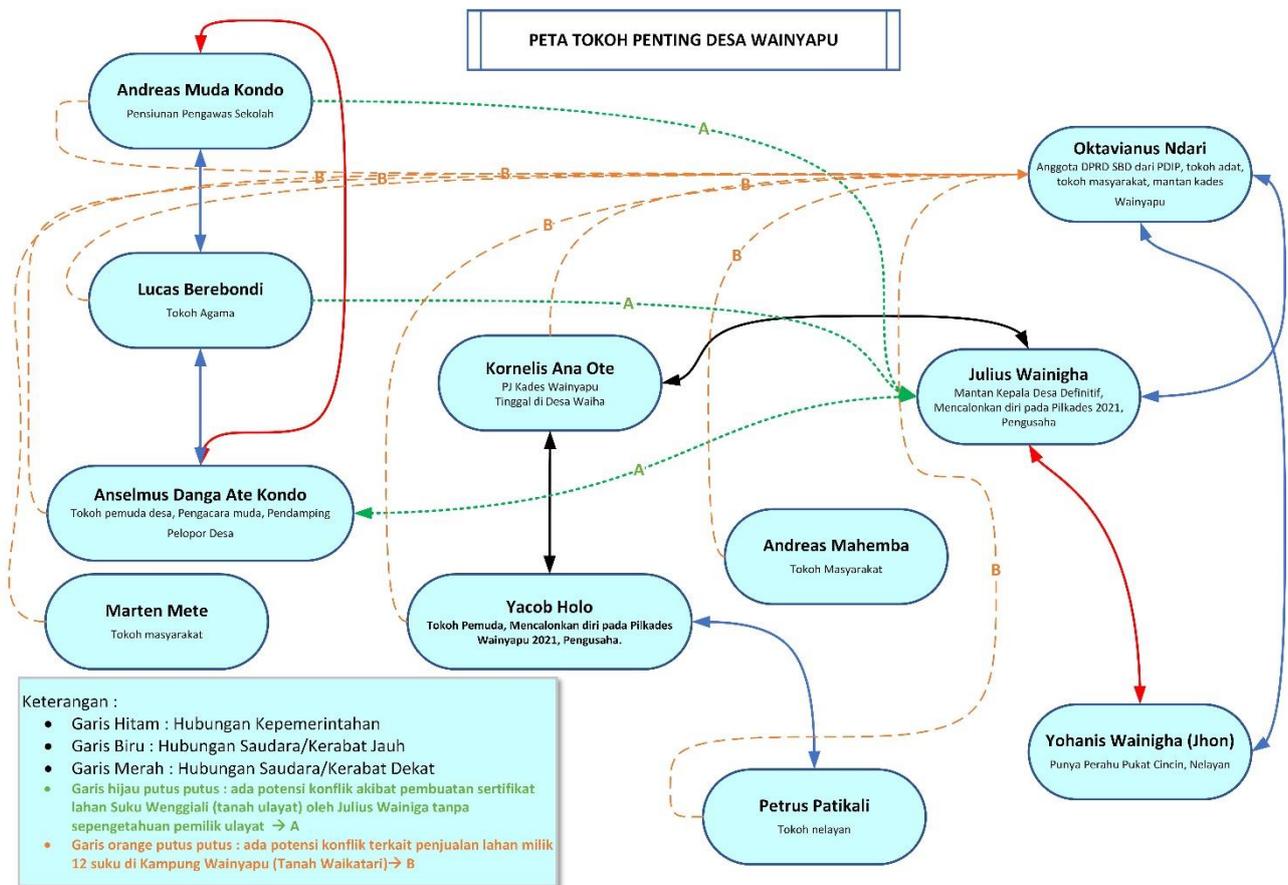
Di Desa Wainyapu jaringan sosial yang terbentuk diantara pemangku kepentingan yaitu hubungan pemerintahan, hubungan kekerabatan dan hubungan potensi konflik (**Gambar 26**). Hubungan pemerintahan yaitu ditandai dengan garis hitam. Hubungan pemerintahan ini secara formal antara Penanggung Jawab Kepala Desa dengan mantan kepala desa, calon kepala desa dan bahkan dengan tokoh masyarakat atau masyarakat biasa lainnya yang tidak dapat digambarkan secara utuh.

Hubungan kekerabatan dekat dari pemangku kepentingan di Desa Wainyapu ditandai dengan garis merah. Hubungan ini terlihat antara Andreas Muda Kondo dengan Anselmus Danga Ate Kondo yaitu hubungan Bapak dan Anak. Terlihat juga hubungan kakak beradik antara Julius Wainigha dengan Yohanis Wainigha. Hubungan kerabat jauh pada peta diatas terlihat ditandai dengan garis berwarna biru. Hubungan kerabat jauh ini misalnya masih terdapat hubungan keluarga yaitu sepupu, paman-keponakan atau lainnya.

Di Desa Wainyapu juga terdapat potensi konflik antara pemangku kepentingan. Potensi konflik ini terkait pembuatan sertifikat tanah dan penjualan lahan. Pemangku kepentingan yang kemungkinan berkonflik dengan dua pemangku kepentingan di Desa Wainyapu.



Gambar 25. Peta pemangku kepentingan Desa Wainyapu



Gambar 26. Jaringan sosial pemangku kepentingan masyarakat pesisir di Desa Wainyapu

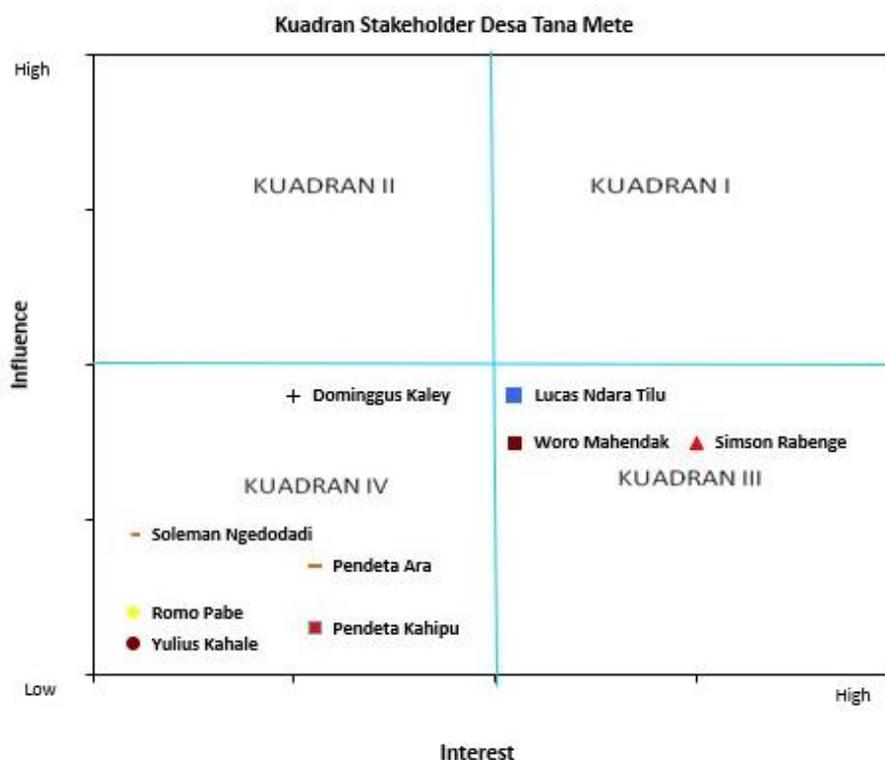
PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN JARINGAN SOSIAL DI DESA TANA METE

Berdasarkan hasil analisis, di Desa Tana Mete terdapat tiga pemangku kepentingan pada Kuadran III yaitu Lucas Ndara Tilu, Simson Rabenge dan Woro Mahendak (**Gambar 27**). Pemangku kepentingan pada kuadran III ini adalah pihak yang mempunyai pengaruh yang rendah tetapi penting bagi karena memiliki interest yang tinggi. Simson Rabenge dan Woro Mahendak merupakan calon kepala desa yang akan ikut pemilihan kepala desa di tahun 2021 ini. Woro Mahendak adalah mantan Kepala Desa Wainyapu pada periode sebelumnya. Pemangku kepentingan di kuadran III ini harus terus diberikan informasi yang cukup mengenai program.

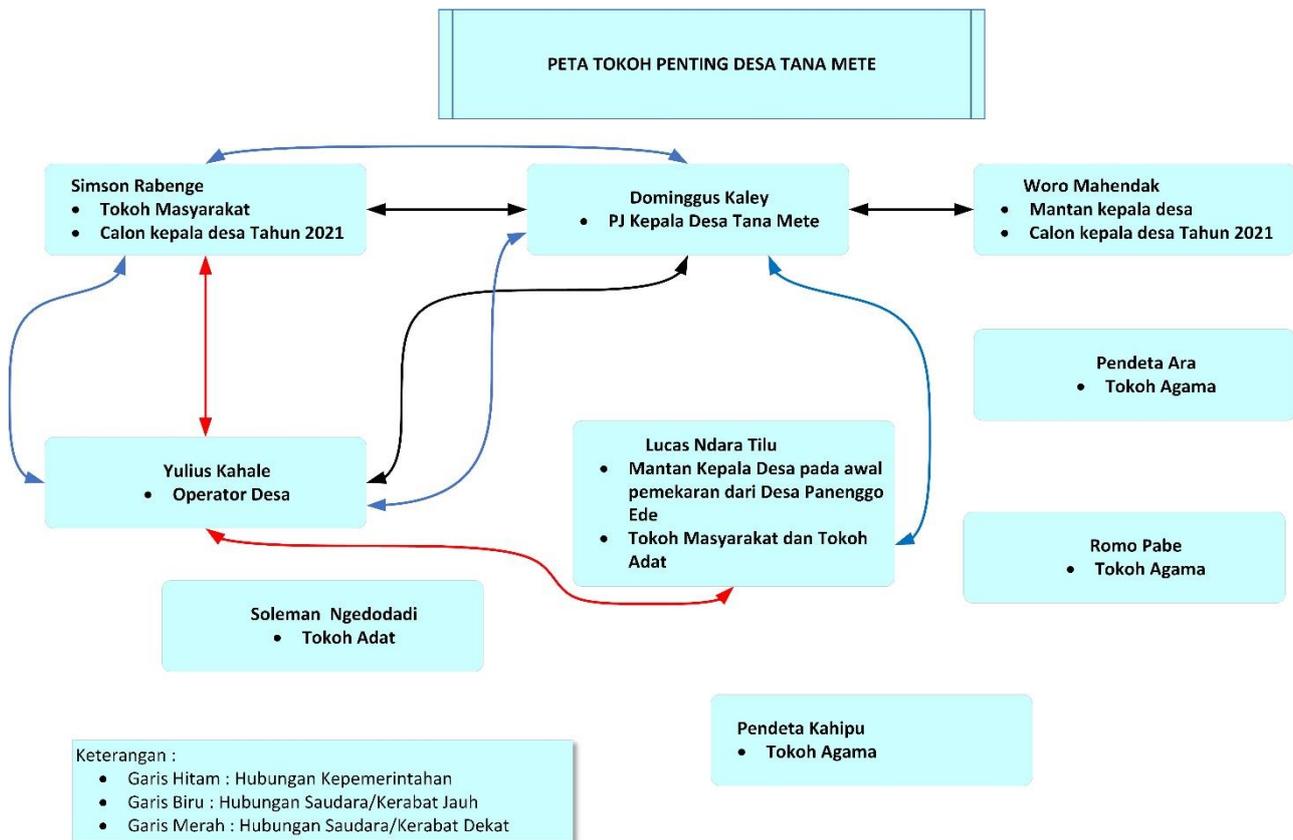
Pemangku kepentingan pada kuadran IV di Desa Tana Mete yaitu Dominggus Kaley, Pendeta Ara, Yulius Kahale, Pendeta Kahipu, Soleman Ngedodadi dan Romo Pabe. Pemangku kepentingan pada kuadran IV ini memiliki pengaruh yang rendah. Tidak ada strategi khusus mengenai pelibatan pemangku kepentingan pada kuadran ini. Meskipun pihak yang berada pada prioritas rendah, namun tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terbatas terhadap pemangku kepentingan pada kuadran ini. Hubungan baik dengan pemangku kepentingan ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi-informasi terkait program yang akan dilaksanakan.

Di Desa Tana Mete jaringan sosial yang terbentuk adalah jaringan sosial kekerabatan dan hubungan pemerintahan formal (**Gambar 28**). Jaringan sosial kekerabatan yaitu kekerabatan dekat antara Yulius Kahale, Simson Rabenge dan Lucas Ndara Tilu.

Hubungan keperintahan terlihat ditandai dengan garis hitam antara Dominggus Kaley dengan beberapa pemangku kepentingan di Desa Tana Mete. Latar belakang pemangku kepentingan di Desa Tana Mete yaitu tokoh adat dan tokoh agama selain pemerintahan formal.



Gambar 27. Peta pemangku kepentingan Desa Tana Mete



Gambar 28. Jaringan sosial pemangku kepentingan masyarakat pesisir di Desa Tana Mete

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN JARINGAN SOSIAL DI DESA LETE KONDA

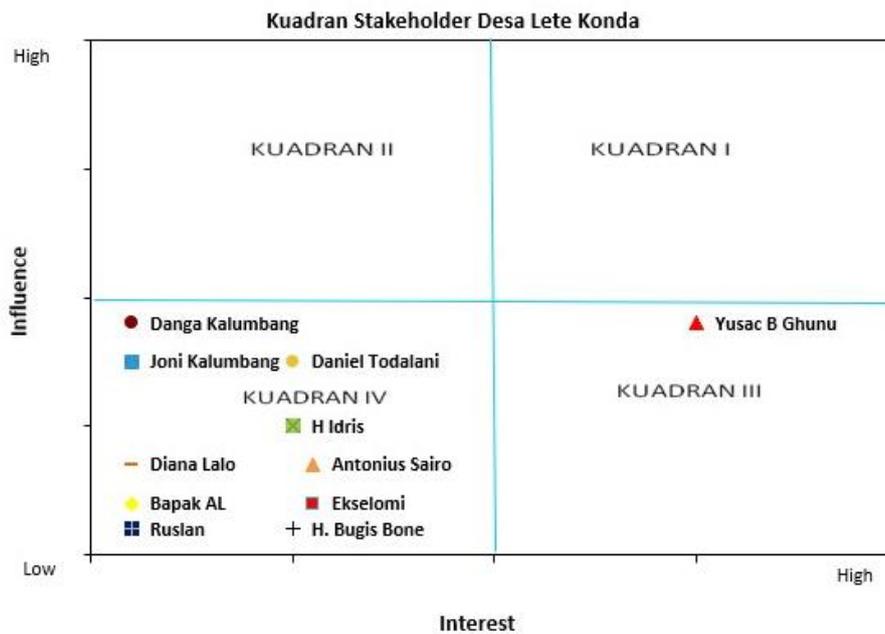
Berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan di Desa Lete Konda hanya terdapat pemangku kepentingan pada kuadran III dan Kuadran IV (**Gambar 29**). Pemangku kepentingan pada kuadran III yaitu Bapak Yusac B Ghunu. Beliau adalah kepala desa Definitif Desa Lete Konda. Pemangku kepentingan pada kuadran III ini merupakan pihak yang penting bagi program namun pengaruhnya rendah. Strategi yang dapat dilakukan adalah tetap memberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan program.

Pemangku kepentingan pada kuadran IV di Desa Letekonda cukup banyak yaitu Danga Kalumbang, Joni Kalumbang, Daniel Todalani, H. Idris, Diana Lalo, Antonius Sairo, Ekselomi, H. Bugis Bone, Bapak Al dan Ruslan. Pemangku kepentingan pada kuadran IV ini memiliki pengaruh yang rendah namun suatu saat interestnya bisa berubah menjadi tinggi. Pemangku kepentingan pada kuadran ini mau tidak mau harus dilibatkan dalam program namun tidak memerlukan strategi pelibatan secara sangat khusus. Informasi-informasi mengenai program dapat disampaikan pada media umum misalnya sosialisasi program.

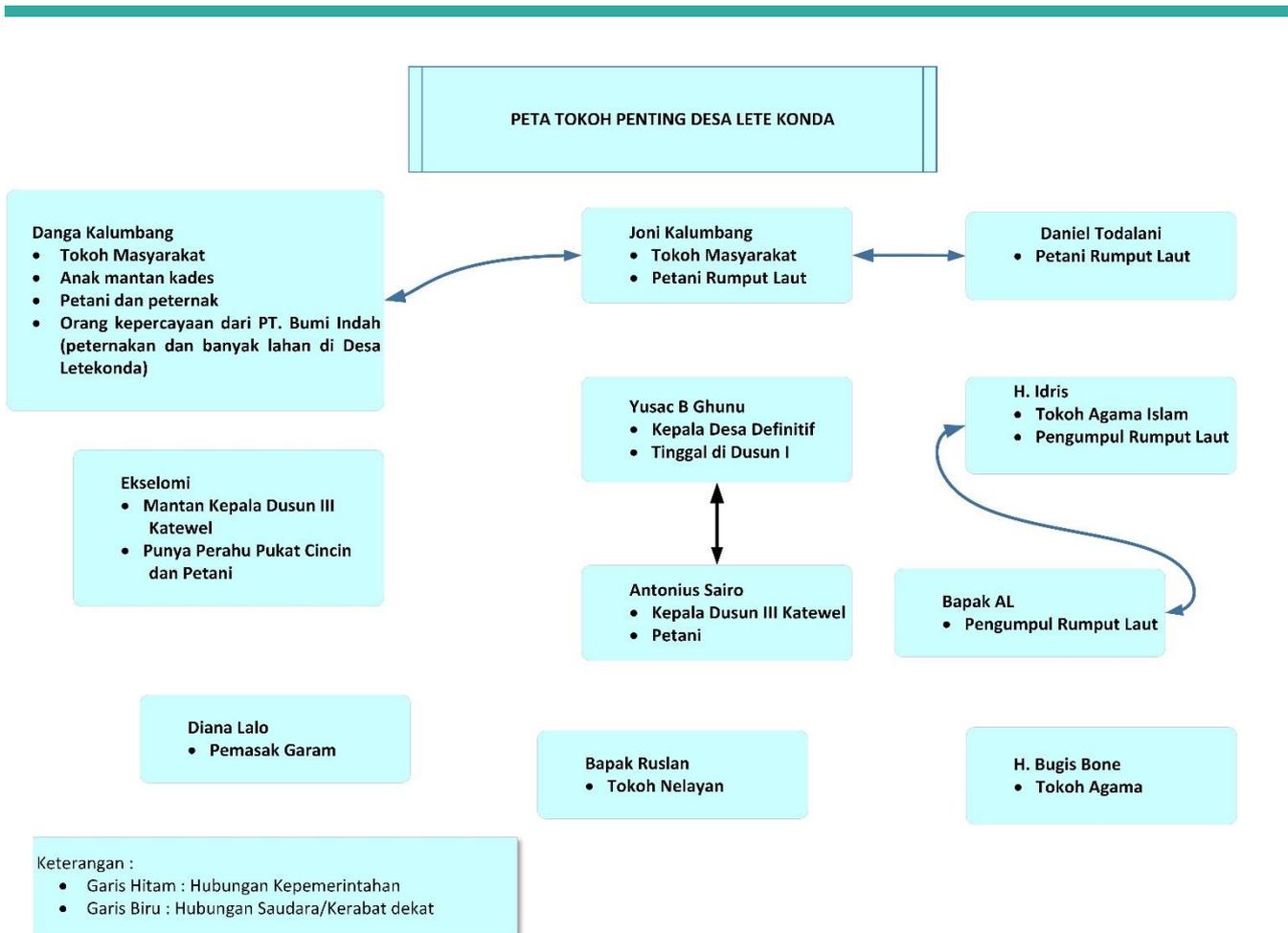
Berdasarkan peta jaringan sosial pemangku kepentingan di Desa Letekonda terlihat bahwa latar belakang pemangku kepentingan adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh di pemerintahan (**Gambar 30**). Pemangku kepentingan dengan latar belakang tokoh masyarakat misalnya Bapak Danga Kalumbang yang merupakan anak dari mantan kepala Desa Letekonda. Meskipun hanya anak mantan kepala desa namun pemangku kepentingan dengan Farm Kalumbang

ini masih menjadi panutan oleh sebagian masyarakat. Begitu juga dengan pemangku kepentingan Ekselomi, meskipun mantan kepala dusun namun masih memiliki pengaruh di Dusun Katewel.

Pemangku kepentingan tokoh agama di Dusun Katewel misalnya H. Bugis Bone dan H. Idris. Jika program nanti dilakukan untuk keseluruhan desa, maka dapat ditambahkan komunikasi dengan tokoh agama kristen protestan dan tokoh agama kristen katolik. Jaringan ekonomi di Desa Lete Konda tidak seperti Desa Pero Konda dimana banyak terdapat Bos/pengepul cumi. Di Desa Lete Konda hanya terdapat dua orang pengepul rumput laut.



Gambar 29. Peta pemangku kepentingan Desa Lete Konda



Gambar 30. Jaringan sosial pemangku kepentingan masyarakat pesisir di Desa Lete Konda

Kesimpulan dan Rekomendasi

KESIMPULAN

- Seluruh desa studi **memiliki potensi pesisir terutama untuk pengembangan perikanan dan pariwisata**, namun belum dikelola secara optimal, karena adanya keterbatasan pengetahuan dan penguasaan aset produksi termasuk modal dan pasar. Belum terdapat pengembangan/diversifikasi kegiatan ekonomi dari sektor penangkapan ikan maupun budidaya laut. Seluruh kegiatan masih merupakan kegiatan utama dan belum berkembang.
- **Sumber daya manusia memiliki tingkat antusias, partisipasi, dan adaptasi yang sangat baik**, namun masih terkendala dengan kapasitas diri termasuk rasa percaya diri.
- Sumber daya keuangan membutuhkan manajemen tingkat dasar hingga dukungan lembaga keuangan.
- **Sumber daya fisik secara umum dapat diakses dengan baik** kecuali akses listrik di Desa Wainyapu. Secara umum tingkat kesulitan akses tertinggi ada pada air bersih terutama pada musim kemarau. Keterbatasan sarana produksi perikanan juga bersifat krusial, mengingat belum adanya sarana prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung untuk pengelolaan aset alam pesisir yang ada.
- **Sumber daya sosial yang ada cukup kuat**, masyarakat memiliki nilai kebersamaan dan modal sosial yang dapat diandalkan untuk membantu beberapa kesulitan yang dialami oleh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat bersama dengan aparat pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Secara umum, masyarakat belum memiliki organisasi yang dapat mewadahi kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan pesisir dan laut.
- **Terdapat beberapa aktivitas yang dapat mengancam keberlanjutan pesisir laut** yang perlu dikendalikan dan dikelola secara efektif.
- **Aspek kerentanan memiliki beberapa dimensi**, meliputi kesehatan gizi & pola asuh balita, perhatian terhadap kondisi ibu hamil & lansia, lemahnya posisi perempuan dalam konflik rumah tangga, kerentanan ekonomi nelayan saat musim angin besar, serta kerentanan masyarakat dari kasus kriminalitas (pencurian).
- **Sudah ada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir** di semua desa, kecuali Desa Wainyapu. Program pemberdayaan masyarakat berkontribusi dalam peningkatan aset manusia. Namun beberapa program yang berjalan umumnya hanya fokus pada satu hal dan berlangsung dalam durasi yang pendek. **Sebagian besar program dinilai berhasil membuat masyarakat mampu melakukan hal baru, namun keberlanjutannya belum efektif terkait dengan kendala lain yang dihadapi**. Masyarakat mengusulkan kelanjutan program lama yang telah berhasil tetapi tidak berlanjut serta mengusulkan beberapa program baru yang dinilai sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
- **Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang dianggap penting dan berpengaruh** terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir di tingkat desa. Tokoh ini dianggap penting karena kesiapan dan kemampuan yang dimiliki dalam mengatasi

persoalan di desa, beberapa tokoh merupakan pemilik modal finansial yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang berlangsung, dan terdapat relasi sosial yang berbeda di setiap tokoh masing-masing desa. **Hasil peta tokoh penting bersifat dinamis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial.**

- Hampir di seluruh desa studi, aset finansial dan aset manusia merupakan aset paling lemah dan aset fisik merupakan aset yang paling kuat, hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan desa selama ini masih berfokus pada penyediaan sarana fisik/infrastruktur.
- **Terdapat potensi tekanan perikanan di masa mendatang**, khususnya di wilayah pesisir (ekosistem lamun dan terumbu karang) karena tumpang tindih pemanfaatan perikanan (beragam jenis pemanfaatan di lokasi yang sama) dan pemanfaatan pariwisata. Hal ini juga berpotensi dalam menimbulkan konflik tata ruang antar masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu potensi tekanan perikanan lainnya adalah potensi terjadinya penangkapan ikan yang berlebih dan tidak ramah lingkungan. Hal ini bisa terjadi jika terjadi peningkatan permintaan terhadap hasil laut, perbaikan sarana/prasarana perikanan, pembukaan akses pasar, dan penyediaan modal.

Ringkasan peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Sumba Barat Daya.

KEKUATAN

- Aset alam: mangrove, padang lamun, terumbu karang, ikan dan biota laut ekonomis lainnya, biota dilindungi, panorama pantai yang indah, potensi area budidaya laut, pengolahan garam yang berkembang.
- Aset sosial: modal sosial kuat, budaya yang menarik dan unik, ketokohan yang memegang peran penting
- Wisata budaya sudah berkembang
- Jaringan sosial: memiliki aksesibilitas dan hubungan sosial yang baik dengan Bali, Bima, Lombok
- Aset fisik: fasilitas utilitas umum dapat diakses dengan baik

KELEMAHAN

- Aset manusia: pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang masih terbatas
- Aset finansial: belum tersedia lembaga keuangan, akses permodalan yang terbatas, strategi nafkah ganda yang belum tertata dengan baik, lemahnya kemampuan pengelolaan keuangan
- Kelompok profesi belum tersedia
- Kepemilikan aset produksi perikanan (aset utama) terbatas, dan belum tersedia aset pendukung produksi perikanan
- Pemberdayaan masyarakat pesisir relatif masih minim

-
- Pemahaman tentang gizi dan pola asuh masih minim

PELUANG

- Pengembangan perikanan tangkap
- Pengembangan budidaya laut (rumput laut)
- Pengembangan pengolahan garam sehat dan ramah lingkungan
- Pengembangan industri pengolahan hasil laut
- Pengembangan pariwisata bahari berbasis desa
- Mengkombinasikan wisata budaya dan pesisir
- Peningkatan kapasitas nelayan
- Peningkatan kapasitas masyarakat

ANCAMAN

- Abrasi
- Kerusakan SDA pesisir dan laut serta lingkungan
- Kriminalitas
- Konflik lahan
- Hama dan penyakit dalam budidaya
- Kekerasan terhadap perempuan
- Kecemburuan sosial

REKOMENDASI

- Perlu sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait dengan potensi sumber daya pesisir dan laut yang ada serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang ramah lingkungan.
- Memperkuat tata kelola perikanan dan tata ruang laut baik di tingkat pemerintah dan desa. Termasuk di antaranya adalah mensinergiskan tata kelola ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), memperkuat pengelolaan perikanan dengan membuat, mensosialisasi, dan menegakkan peraturan-peraturan perikanan yang berlaku, dan melibatkan masyarakat dalam melakukan patroli dan pengelolaan laut.
- Untuk program yang sudah berjalan dan dinilai berhasil, proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat perlu dilanjutkan dan dikembangkan.

Inovasi/ perbaikan produk, penyediaan modal dan akses pasar merupakan aspek yang masih perlu dikembangkan.

- Perlu memperhatikan ancaman, kerentanan, dan konflik sosial yang ada saat ini maupun yang masih bersifat potensi.
- Memperkuat koordinasi antar mitra (termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, pihak swasta) untuk mendukung program-program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Sumba Barat Daya.
- Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa harus didesain secara hati-hati, disesuaikan dengan potensi aset yang dimiliki, dan kebutuhan dan kesanggupan masyarakat, serta sejalan dengan target pemerintah. Pada pelaksanaannya, perlu pendampingan secara inklusif dan jangka panjang.
- Perlu adanya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia termasuk edukasi pola asuh dan gizi serta peningkatan akses kesehatan, manajemen keuangan dasar rumah tangga, serta penguatan aset sosial dan finansial lokal yang dimiliki. Peran lembaga keuangan formal dan pengorganisasian masyarakat sangat dibutuhkan.
- Perlu untuk memperhatikan peran, bentuk pelibatan, dan relasi sosial para tokoh penting dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Mempertimbangkan kedinamisan sifat peta tokoh penting tersebut, maka perlu untuk melakukan review atau bahkan pemetaan tokoh ulang setiap akan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.
- Perlu pemutakhiran data pada tingkat desa terutama terkait dengan jumlah penduduk, data jumlah nelayan, jumlah pembudidaya laut, data jumlah pengolah garam, data penggiat pariwisata, data jumlah alat penangkapan ikan menurut jenis, data produksi hasil perikanan dan laut, serta informasi lainnya untuk melengkapi data potensi dan profil desa.

Daftar Pustaka

- Abdrabo, M.A., dan M. A. Hassan. 2005. Stakeholder Analysis. [https://www.bio.unifi.it/p226.html/stakeholder_Analysis_Cedare .pdf](https://www.bio.unifi.it/p226.html/stakeholder_Analysis_Cedare.pdf). Cairo.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Angka Tahun 2021. Tambolaka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Kodi dalam Angka Tahun 2020. Tambolaka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Kodi Balaghar dalam Angka Tahun 2020. Tambolaka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Loura dalam Angka Tahun 2020. Tambolaka.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo Persada :Jakarta
- Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya. 2020. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Sumba Barat Daya. Tambolaka.
- DFID. (1999, 2000, 2001). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London: Department for International Development.
- Ostrom, E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge University Press
- Pusparini, N.K.S., Claborn, K., Le, D., Estradivari., Lazuardi, M.E., Dharmajaya, I.M., Maheswari, A., Atapada, Z., Peny, A.A., Gill, D. & Glew, L. (2020). Status, Tren, dan Dampak pada Kesejahteraan Manusia di Suaka Alam Perairan (SAP) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, Indonesia (2014-2017). World Wildlife Fund and Duke University, Jakarta, Indonesia, Washington D.C., dan Durham N.C., United States.
- Scoones, I. 1998. 'Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis'. IDS Working Paper No.72. Brighton: IDS.
- Setyawan, E., Estradivari, Andradi-Brown, D. A., Amkieltiela, Anggraeni, D., Claborn, K., Damora, A., De-Nardo, M., Dyahapsari, I., Firmansyah, F., Glew, L., Handayani, C.N.N., Tarigan, S.A., Welly, M., Campbell, S., Cox, C, Mustofa, I. Z., Nanlohy, H., Pardede, S., Santiadji, V., Timisela, N., Wisesa, N., Wijonarno, A., Wirasanjaya, Yusuf, M., and Ahmadia, G. N. 2018. State of the Sunda Banda Seascape Marine Protected Area Network - 2017. World Wildlife Fund, University of Pattimura, Wildlife Conservation Society, Coral Triangle Centre, RARE. Washington D.C., United States, Jakarta and Bali, Indonesia. DOI: 10.6084/m9.figshare.6397286
- World Bank Publications, 1998. Participation and Social Assessment, Tools and Techniques, compiled by Jennifer Rietbergen-McCracken, Deepa Narayan-Parker, Word Bank Publications, 1998. USA.

Lampiran

LAMPIRAN 1

Metode Pengumpulan Data

Pengkajian ini dibatasi hanya di lima desa pesisir di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pembatasan dilakukan terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kajian baik sumber daya manusia, waktu, maupun finansial. Pemilihan desa sampel ini didasarkan pada hasil diskusi antara William and Lily Foundation dan Yayasan Padmi Mandiri dengan melihat 5 parameter sosial meliputi batas administrasi untuk memastikan setiap desa memiliki intervensi kebijakan yang sama, parameter ragam mata pencaharian penduduk untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan pesisir, keberagaman suku bangsa di setiap desa untuk memastikan desa sampel memiliki struktur sosial yang dapat merepresentasikan masyarakat Sumba Barat Daya secara umum, dan pasar untuk memastikan bahwa masyarakat di desa sampel dapat merepresentasikan akses perekonomian utama masyarakat pesisir secara umum.

Desa yang terpilih sebagai desa sampel adalah Desa Pero Konda dan Pero Batang yang berada di dalam wilayah administrasi Kecamatan Kodi; Desa Wainyapu dan Tana Mete yang berada di Kecamatan Kodi Balaghar, dan Desa Letekonda di Kecamatan Loura. Secara umum, diharapkan kelima desa sampel ini dapat mewakili 33 desa pesisir yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi studi literatur, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD), wawancara informan kunci dan pemetaan partisipatif. Studi literatur digunakan untuk menemukan informasi dan data terkait dengan masyarakat dan potensi pesisir desa studi, serta untuk memperoleh data terkini dari profil desa studi. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat lokasi kegiatan masyarakat pesisir meliputi lokasi fishing base, budidaya rumput laut, kemah/rumah garam, serta area mangrove di desa studi. Diskusi kelompok terfokus dilakukan di masing-masing desa untuk melihat pandangan umum masyarakat tentang penguasaan aset masyarakat pesisir (5 aset penting), tantangan ancaman dan konflik sosial, program pemberdayaan yang pernah diterima oleh masyarakat, serta kebutuhan masyarakat.

FGD dilakukan dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat meliputi kepala desa, nelayan, pembudidaya rumput laut, pengolah garam, pelaku kegiatan pariwisata, pengepul hasil laut, tokoh perempuan, kader kesehatan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan.

Selain menggali data dalam pandangan kolektif masyarakat desa, FGD juga ditujukan untuk mendorong pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang potensi dan kondisi yang dimiliki. Dari proses ini masyarakat turut melakukan penilaian secara partisipatif terhadap potensi sumber daya dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memetakan kegiatan pemanfaatan pesisir dan laut di desanya. Jumlah peserta FGD rata-rata adalah berkisar antara 14-25 orang.

Sementara itu, wawancara informan kunci dilakukan untuk mendalami informasi terkait dengan objek penelitian. Secara rinci jumlah informan dalam kajian ini disampaikan pada **Tabel 3**. Selain informan dari masing-masing desa studi, wawancara juga dilakukan dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian jumlah total informan yaitu 91 orang peserta FGD, dan 89 orang narasumber yaitu 87 orang perwakilan masyarakat, serta 2 orang perwakilan instansi pemerintah kabupaten yaitu

Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pariwisata, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 21 Maret 2021. Survei dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan terkait dengan Covid 19 yang sedang terjadi pada saat kegiatan survei lapangan ini dilaksanakan. Prosedur tersebut diawali dengan langkah pelaporan kegiatan kepada pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tambolaka, serta penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci/membersihkan tangan setiap kali usai kegiatan wawancara dan FGD). Pelaksanaan survei juga mengakomodir tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti sirih pinang.

Tabel 3. Jumlah informan FGD dan KII

No.	Desa Studi	Kecamatan	Jumlah Informan (orang)	
			FGD	KII
1.	Pero Konda	Kodi	15	20
2.	Pero Batang	Kodi	14	13
3.	Wainyapu	Kodi Balaghar	22	15
4.	Tana Mete	Kodi Balaghar	25	14
5.	Lete Konda	Loura	15	25
Jumlah Total			91	89

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari literatur meliputi penelusuran data dari instansi BPS berupa Data Kecamatan dan Kabupaten dalam Angka tahun 2020, profil desa studi, data statistik perikanan laut, dan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya; hasil observasi lapangan; hasil diskusi kelompok terfokus; dan data hasil wawancara informan kunci selanjutnya divalidasi melalui proses triangulasi dan workshop secara khusus yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 29 April 2021 bertempat di Aula Rapat Hotel Ella Tambolaka. Data yang telah divalidasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Profil Masyarakat Pesisir

Profil masyarakat pesisir ditampilkan dalam bentuk narasi dengan dukungan tabulasi data sekunder dari Kecamatan dalam Angka tahun 2020, Kabupaten dalam Angka Tahun 2020, data statistik perikanan dan kelautan tahun 2020, serta data profil desa. Sementara itu data primer dari hasil observasi, wawancara, dan FGD dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi wilayah, kependudukan, sosial ekonomi terutama tentang profil mata pencaharian masyarakat, dan sosial budaya.

Penguasaan Aset Masyarakat Pesisir

Pengkajian aset masyarakat pesisir dilakukan untuk melihat kondisi aset yang dimiliki oleh masyarakat di desa studi. Aset yang dikaji terdiri atas 5 aset penting, yaitu aset sumber daya alam,

aset manusia (Sumber Daya Manusia), aset keuangan (finansial), aset fisik (infrastruktur), dan aset sosial (modal sosial). Penguasaan 5 aset diukur melalui beberapa parameter pengukuran (**Tabel 4**).

Pada aset sumber daya alam, indikator yang diukur adalah keberadaan ekosistem dan biota pesisir dan laut (mangrove, lamun, terumbu karang), bentuk pemanfaatan sosial ekonomi, serta keberadaan pemanfaatan pesisir dan laut sebagai tempat pelaksanaan tradisi budaya.

Pada aset manusia (Sumber Daya Manusia), indikator yang diukur meliputi penguasaan pengetahuan tentang perikanan tangkap ramah lingkungan, penguasaan keterampilan yang terkait dengan kegiatan ekonomi pesisir dan laut, kondisi kesehatan (gizi buruk, stunting, kepemilikan MCK pribadi), pengalaman pemberdayaan terkait dengan kemampuan dalam kegiatan perekonomian pesisir dan laut, peningkatan kapasitas diri lainnya (pengelolaan keuangan, penyelamatan diri, pengawasan pesisir).

Pada aset finansial, indikator yang diukur meliputi ragam sumber penghasilan utama, ketergantungan terhadap pesisir dan laut, sumber permodalan kegiatan ekonomi pesisir dan laut, kepemilikan aset produksi, lembaga keuangan, modal sosial terkait dengan keuangan, kebiasaan pengaturan keuangan rumah tangga, kebiasaan berhutang (dari kebutuhan harian hingga kebutuhan dana darurat), kebiasaan menabung, dan kebiasaan asuransi.

Pada aset fisik, indikator yang diukur meliputi akses listrik, akses air bersih, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pasar, akses sarana produksi perikanan, akses jalan, akses transportasi umum, akses komunikasi jarak jauh, akses informasi, dan sarana olah raga.

Pada aset sosial, indikator yang diukur meliputi semangat kebersamaan dan kegotongroyongan dalam masyarakat, keterbukaan masyarakat dalam menerima hal baru, partisipasi dalam kegiatan bersama, ketersediaan tata kelola adat terkait dengan pemanfaatan pesisir dan laut, organisasi sosial (kelompok profesi terkait dengan pemanfaatan pesisir dan laut, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, organisasi perempuan) dan ketokohan masyarakat.

Tabel 4. Indikator lima aset penghidupan masyarakat pesisir

Indikator	Kategori nilai	Skor Total
Indikator penguasaan aset sumber daya alam		
Keberadaan mangrove	0: Tidak	4
	1: Ada, namun tidak dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	
	2: Ada dan dimanfaatkan secara sosial	
	3: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi	
	4: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	
Keberadaan padang lamun	0: Tidak	4
	1: Ada, namun tidak dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	
	2: Ada dan dimanfaatkan secara sosial	
	3: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi	
	4: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	

Keberadaan terumbu karang	0: Tidak 1: Ada, namun tidak dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya 2: Ada dan dimanfaatkan secara sosial 3: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi 4: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	4
Keberadaan biota dilindungi	0: Tidak 1: Ya	1
Keberadaan biota khas daerah	0: Tidak 1: Ada, namun tidak dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya 2: Ada dan dimanfaatkan secara sosial 3: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi 4: Ada dan dimanfaatkan secara sosial ekonomi budaya	4
Penangkapan ikan	0: Tidak 1: Ada untuk konsumsi 2: Ada untuk konsumsi dan dijual	2
Penangkapan biota laut selain ikan	0: Tidak 1: Ada untuk konsumsi 2: Ada untuk konsumsi dan dijual	2
Budidaya laut	0: Tidak 1: Ada, hanya 1 komoditas dan berkembang 2: Ada >1 komoditas dan berkembang	2
Pengolahan garam	0: Tidak 1: Ada, bahan baku dari luar dan tidak berkembang 2: Ada bahan baku dari lokal dan tidak berkembang 3: Ada bahan baku dari luar dan berkembang 4: Ada bahan baku dari lokal dan berkembang	4
Pariwisata	0: Tidak 1: Ada tempat rekreasi tidak berbayar 2: Ada tempat rekreasi berbayar tidak resmi (pungli) 3: Ada tempat rekreasi berbayar resmi yang dikelola	3
Skor total penguasaan aset SDA		30
Indikator penguasaan aset manusia		
Penguasaan pengetahuan tentang penangkapan ikan ramah lingkungan	0: Tidak 1: Ada	1
Penguasaan keterampilan penangkapan ikan ramah lingkungan	0: Tidak 1: Ada terbatas 1 teknik 2: Ada, terbatas 2-3 teknik 3: Ada, >3 teknik	3
Penguasaan keterampilan budidaya laut	0: Tidak 1: Ada otodidak & belum berkembang 2: Ada, otodidak dan berkembang 3: Ada, melalui pemberdayaan namun belum berkembang 4: Ada, melalui pemberdayaan dan berkembang	4

Penguasaan keterampilan pariwisata	0: Tidak 1: Ada otodidak dan belum berkembang 2: Ada, otodidak dan berkembang 3: Ada, melalui pemberdayaan namun belum berkembang 4: Ada, melalui pemberdayaan dan berkembang	4
Penguasaan keterampilan pengolahan hasil laut	0: Tidak 1: Ada otodidak & belum berkembang 2: Ada, otodidak dan berkembang 3: Ada, melalui pemberdayaan namun belum berkembang 4: Ada, melalui pemberdayaan dan berkembang	4
Penguasaan keterampilan ekonomi lainnya	0: Tidak 1: Ada otodidak dan belum berkembang 2: Ada, otodidak dan berkembang 3: Ada, melalui pemberdayaan namun belum berkembang 4: Ada, melalui pemberdayaan dan berkembang	4
Keberadaan kasus gizi buruk	0: Ada 1: Tidak	1
Keberadaan kasus stunting	0: Ada 1: Tidak	1
Kepemilikan sarana MCK pribadi	0: <25% 1: 25-<50% 3: 50-75% 4: >75%	4
Pernah memperoleh pemberdayaan bidang perikanan	0: Tidak 1: Pernah	1
Pernah memperoleh pemberdayaan bidang pariwisata	0: Tidak 1: Pernah	1
Pernah memperoleh pemberdayaan bidang kesehatan (gizi keluarga dan pola asuh)	0: Tidak 1: Pernah	1
Pernah memperoleh pemberdayaan peningkatan kapasitas diri lainnya (penyelamatan diri, pengelolaan keuangan, pengawasan pesisir, dll)	0: Tidak 1: Pernah	1
Skor total penguasaan aset manusia		30
Indikator penguasaan aset finansial		
Sumber penghasilan rumah tangga	0: Hanya 1 kegiatan ekonomi utama 1: Ada 2 kegiatan ekonomi utama 2: Ada 3 kegiatan ekonomi utama 3: Ada lebih dari 3 kegiatan ekonomi utama	3
Ketergantungan pendapatan terhadap sumber daya pesisir dan laut	0: Tidak ada 1: <25% 2: 25%-50% 3: >50%-75% 4: 75%-100%	4
Sumber permodalan kegiatan ekonomi rumah tangga	0: Tidak ada 1: Bos/pengepul 2: Koperasi 3: Lembaga keuangan (perkreditan, BUMDES)	3

Kepemilikan aset produksi (sebagian besar:>50%)	0: Tidak ada (dimiliki pihak lain) 1: Milik bersama 2: Milik pribadi	2
Lembaga keuangan	0: Tidak ada 1: Ada, terbatas 2: Ada, mudah	2
Sarana adat terkait dengan keuangan	0: Tidak ada 1: Ada	1
Kebiasaan hutang untuk kebutuhan harian	0: Ada 1: Tidak ada	1
Kebiasaan hutang untuk kebutuhan bulanan	0: Ada 1: Tidak ada	1
Kebiasaan hutang untuk kebutuhan tahunan	0: Ada 1: Tidak ada	1
Kebiasaan hutang untuk acara terencana tertentu (pesta)	0: Ada 1: Tidak ada	1
Kebiasaan hutang untuk keperluan darurat	0: Ada 1: Tidak ada	1
Kebiasaan menabung	0: Tidak ada 1: Celengan 2: Arisan 3: Koperasi/bank	3
Kebiasaan asuransi	0: Tidak ada 1: Ada	1
Kebiasaan pengaturan keuangan rumah tangga	0: Tidak ada 1: Ada	1
Skor total penguasaan aset finansial		25
Indikator penguasaan aset fisik		
Akses listrik	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Akses air bersih	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Akses pendidikan	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Akses kesehatan	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Akses pasar kebutuhan harian	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Akses pasar hasil perikanan & laut	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Sarana produksi perikanan	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Jalan	0: Tidak ada 1: Ada berupa tanah 2: Ada berupa perkerasan	2

Transportasi umum	0: Sulit/tidak ada 1: Terbatas 2: Mudah	2
Komunikasi	0: Hanya komunikasi langsung 1: Komunikasi langsung dan komunikasi jarak jauh yang terbatas 2: Komunikasi langsung dan komunikasi jarak jauh mudah	2
Media informasi	0: Sulit/tidak ada 1: Hanya informasi langsung 2: Informasi langsung dan media radio atau TV 3: Informasi langsung, radio, dan TV	3
Sarana olah raga	0: Tidak ada 1: Ada	2
Skor total penguasaan aset fisik		25
Indikator penguasaan aset sosial		
Semangat kebersamaan antar masyarakat	0: Tidak 1: Hanya di kalangan keluarga 2: Seluruh lapisan masyarakat	2
Kebiasaan penerapan kegotongroyongan antar masyarakat	0: Tidak 1: Diimplementasikan hanya saat acara adat 2: Diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari	2
Keterbukaan masyarakat menerima hal baru	0: Tidak 1: Terbuka	1
Modal sosial dapat menjadi solusi kehidupan tertentu	0: Tidak 1: Ya hanya untuk masyarakat/pihak tertentu 2: Ya untuk semua masyarakat/pihak	2
Toleransi antar masyarakat	0: Tidak 1: Ya	1
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama	0: Tidak 1: Ya	1
Tersedia tata kelola pemanfaatan SDA pesisir secara adat	0: Tidak 1: Ada tetapi tidak ditaati 2: Ada dan ditaati	2
Terdapat organisasi/kelompok profesi terkait dengan pemanfaatan SDA laut & pesisir	0: Tidak 1: Dibentuk hanya untuk tujuan tertentu 2: Dibentuk secara formal tetapi pasif 3: Dibentuk secara formal dan aktif 4: Dibentuk secara formal, aktif, dan berperan ekonomi	4
Terdapat organisasi/kelompok kepemudaan	0: Tidak ada 1: Ada namun pasif 2: Ada dan aktif 3: Ada dan sangat aktif	3
Terdapat organisasi keagamaan	0: Tidak ada 1: Ada namun pasif 2: Ada dan aktif 3: Ada dan sangat aktif	3
Terdapat organisasi perempuan	0: Tidak ada 1: Ada namun pasif 2: Ada dan aktif 3: Ada dan sangat aktif	3

Terdapat lembaga/NGO khusus terkait dengan pesisir dan laut	0: Tidak ada 1: Ada namun pasif 2: Ada dan aktif 3: Ada dan sangat aktif	3
Ketokohan masyarakat	0: Tidak ada 1: Ada hanya berperan secara sosial-adat-budaya 2: Ada dengan peran sosial-adat-budaya-ekonomi 3: Ada dengan peran sosial-adat-budaya-ekonomi dan pengambil keputusan utama	3
Skor total penguasaan aset sosial		30

Nilai yang diperoleh dari hasil penghitungan selanjutnya dikategorikan pada selang 1-5, dimana 1 merepresentasikan kondisi yang paling buruk hingga 5 merepresentasikan kondisi yang paling baik (**Tabel 5**). Informasi dari masing-masing aset tersebut dideskripsikan secara kualitatif.

Tabel 5. Indikator lima aset penghidupan masyarakat pesisir

Rentang Skor	Keterangan	Plot Radar Chart
Indikator penguasaan aset SDA		
1-6	Potensi SDA pesisir dan laut relatif sangat kurang untuk dapat dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari	1
7-12	Potensi SDA pesisir dan laut relatif kurang untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari	2
13-18	Potensi SDA pesisir dan laut relatif cukup untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari	3
19-24	Potensi SDA pesisir dan laut relatif tinggi untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari	4
25-30	Potensi SDA pesisir dan laut relatif sangat tinggi untuk dimanfaatkan, dikelola, dan dikembangkan sebagai sumber penghidupan lestari	5
Indikator penguasaan aset manusia		
1-6	Penguasaan aset manusia relatif sangat kurang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut	1
7-12	Penguasaan aset manusia relatif kurang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut	2
13-18	Penguasaan aset manusia cukup untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut	3
19-24	Penguasaan aset manusia relatif baik untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut	4
25-30	Penguasaan aset manusia relatif sangat baik untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut	5
Indikator penguasaan aset finansial		
1-5	Penguasaan aset finansial relatif sangat kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	1
6-10	Penguasaan aset finansial relatif kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	2
11-15	Penguasaan aset finansial relatif cukup untuk mendukung kehidupan masyarakat	3
16-20	Penguasaan aset finansial relatif baik untuk mendukung kehidupan masyarakat	4
21-25	Penguasaan aset finansial relatif sangat baik untuk mendukung kehidupan masyarakat	5
Indikator penguasaan aset fisik		
1-5	Penguasaan aset fisik relatif sangat kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	1
6-10	Penguasaan aset fisik relatif kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	2
11-15	Penguasaan aset fisik relatif cukup untuk mendukung kehidupan masyarakat	3
16-20	Penguasaan aset fisik relatif baik untuk mendukung kehidupan masyarakat	4
21-25	Penguasaan aset fisik relatif sangat baik untuk mendukung kehidupan masyarakat	5
Indikator penguasaan aset sosial		

1-6	Penguasaan aset sosial relatif sangat kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	1
7-12	Penguasaan aset sosial relatif kurang untuk mendukung kehidupan masyarakat	2
13-18	Penguasaan aset sosial relatif cukup untuk mendukung kehidupan masyarakat	3
19-24	Penguasaan aset sosial relatif memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat	4
25-30	Penguasaan aset sosial relatif sangat memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat	5

Kelima modal/aset penghidupan ini ditampilkan dalam bentuk segi lima (pentagon) untuk menunjukkan perbedaan akses masyarakat pada aset-aset (**Gambar 31**). Peta penguasaan aset penghidupan akan memberikan gambaran modal/aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir. Kelima aset ini harus dilihat secara menyeluruh karena saling terkait satu dengan yang lain. Pemetaan dilakukan dari nilai 0-5, yang merepresentasikan kondisi terburuk hingga terbaik, dimana:

0: merepresentasikan tidak adanya aset yang dikuasai/dimiliki/diakses.

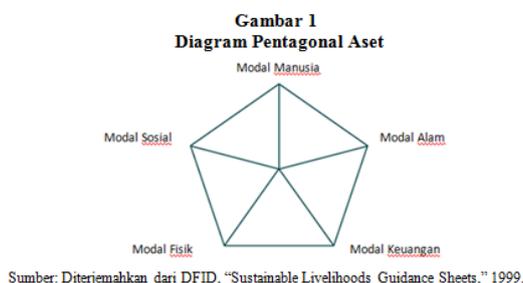
1: menunjukkan penguasaan aset yang sangat kurang/sangat terbatas/sangat tidak memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

2: merepresentasikan penguasaan aset yang relatif kurang/terbatas/kurang memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

3: merepresentasikan penguasaan aset yang cukup untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

4: merepresentasikan penguasaan aset yang memadai/relatif baik untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

5: merepresentasikan penguasaan aset yang sangat baik/sangat memadai untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir.



Gambar 31. Diagram Pentagonal Aset

Ancaman, Kerentanan, dan Konflik Sosial Masyarakat Pesisir

Pada kajian ini dilakukan penelusuran terhadap ancaman, kerentanan, dan konflik sosial yang terdapat di masyarakat pesisir desa studi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Pada konteks ancaman, kajian ini membahas berbagai bentuk ancaman yang dihadapi oleh masyarakat di desa pesisir studi misalnya abrasi, kegiatan yang bersifat merusak lingkungan (penangkapan tidak ramah lingkungan, penambangan pasir/batu, pengambilan karang, dan penangkapan biota yang dilindungi).

Pada konteks kerentanan kajian ini membahas tentang kelompok rentan dan konteks kerentanan yang dihadapi masyarakat pesisir di desa studi.

Pada konteks konflik sosial, kajian ini membahas tentang konflik sosial yang sedang terjadi serta konflik sosial yang potensial terjadi pada masa mendatang yang perlu menjadi perhatian.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

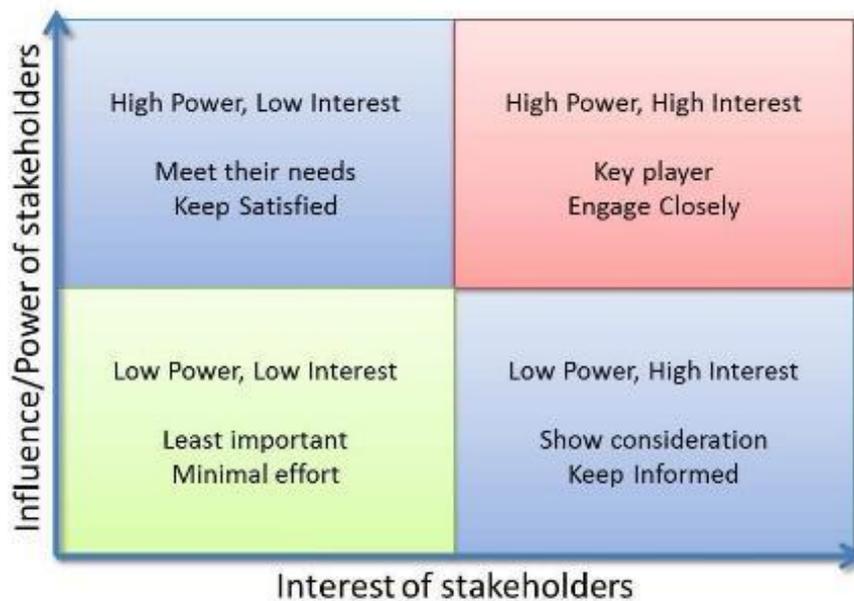
Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir pada kajian ini dibatasi pada pemberdayaan masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitas diri dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Telaah dilakukan terhadap program pemberdayaan atau pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang pernah diterima oleh masyarakat pesisir di desa studi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Gap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pada aspek gap pemberdayaan masyarakat pesisir, pengkajian dilakukan terhadap program pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mendukung dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Pemetaan Pemangku Kepentingan

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan melalui analisis dan identifikasi pemangku kepentingan yang diukur dari peran, tingkat kepentingan, dan kekuatan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan matrik pengukuran, yang meliputi pengukuran kekuatan manusia (cakupan skala manusia yang dapat dipengaruhi/digerakkan), kekuatan politik (keterlibatan tokoh dalam peran politik serta cakupan area politik), dan kekuatan finansial (kekuatan keuangan tokoh termasuk luasan jaringan finansial yang dimiliki) mengacu pada World Bank, 1998. Sementara pada tingkat kepentingan, setiap tokoh diberi penilaian yang mengindikasikan kepentingan murni (untuk mendukung program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir), atau kepentingan yang disertai dengan faktor kepentingan pribadi (adanya kepentingan lain secara pribadi yang ingin diperoleh/dicapai dari dukungan yang diberikan terhadap program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir, atau tanpa kepentingan apapun. Matrik pengukuran secara rinci disampaikan pada **Tabel 6 dan Tabel 7**.



Gambar 32. Kuadran pemetaan tokoh berdasarkan kekuatan pengaruh dan tingkat kepentingan, (sumber: World Bank Publications, 1998)

Penjelasan masing-masing kuadran adalah sebagai berikut (World Bank (1998):

Kuadran I (Manage Closely)

Pengambil Keputusan/Penentu kebijakan

Key player (pemain utama): tokoh fokus untuk program, dilibatkan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, digandeng dan diajak konsultasi secara regular. Pemangku kepentingan ini yang mempunyai daya pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi. Bisa dilibatkan sepenuhnya diseluruh tahapan program untuk memberikan keyakinan pada masyarakat lain bahwa keberhasilan program adalah atas dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Kuadran II (Keep Satisfied)

Penuhi Kebutuhan Kelompok

Pemangku kepentingan yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan. Kelompok ini bukan target utama program, namun sangat mungkin menjadi penentang/opposan atau minimal selalu mengintervensi. Dari sini, mereka perlu mendapatkan perlakuan bahwa keberadaan kelompok ini adalah penting, pihak ini perlu untuk selalu diberikan informasi, dan pengakuan terhadap pandangan-pandangan yang disampaikan, hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul keonaran dan konflik terbuka.

Kuadran III (To be Informed)

Penerima Informasi

Pihak ini merupakan pihak yang sangat penting bagi kebijakan, tetapi pengaruhnya rendah. Kelompok ini membutuhkan inisiatif khusus jika ingin melindungi kepentingannya. Pihak ini harus terus diberikan informasi yang cukup mengenai kebijakan serta meyakinkan mereka bahwa tidak ada masalah besar yang timbul. Pihak ini sering kali sangat berguna bagi proses penyusunan kebijakan secara terperinci. Membutuhkan upaya-upaya khusus dan strategi-strategi khusus, agar dapat menjadi yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan program dan keterlibatan mereka sungguh-sungguh sangat bermakna.

Kuadran VI (Monitor/Minimum Effort)

Pengamat

Pengamat boleh tidak dilibatkan. Pihak ini yang berada pada prioritas rendah, tetapi membutuhkan monitoring dan evaluasi yang terbatas. Pemangku kepentingan di kuadran ini mau tidak mau juga perlu dilibatkan dalam program namun tidak memerlukan strategi partisipasi/pelibatan mereka secara sangat khusus.

LAMPIRAN 2

Tabel 8. Metrik survei

Data	Parameter Data	Target Informan
Profil Desa	Wilayah	Kepala desa, sekdes
	Kependudukan	
	Perekonomian	
	Sosial budaya	
	Potensi desa	
	Peluang pengembangan desa	
	Tantangan & kendala pengembangan	
	Pentagon aset (SDA, SDM, Finansial, Fisik, Sosial)	
Profil Perikanan Tangkap,	Daerah penangkapan ikan meliputi daerah utama dan daerah alternative	Nelayan pemilik dan ABK
	Karakteristik teknis penangkapan (per jenis alat tangkap) meliputi ukuran armada, jumlah ABK, teknik operasional alat, waktu operasional, bulan musim puncak, bulan musim kosong	
	Produktivitas perikanan tangkap (per alat) meliputi biaya operasional per trip, jenis ikan hasil tangkapan per trip, volume tangkapan per trip, nilai ekonomi penjualan hasil tangkapan, mekanisme bagi hasil, pendapatan bersih per ABK	
	Pemasaran hasil tangkapan meliputi akses pasar, mekanisme pemasaran	
	Permodalan kegiatan penangkapan meliputi akses permodalan, kepemilikan aset produksi	
	Sarana produksi perikanan	
	Tantangan & Kendala perikanan tangkap	
	Peluang perikanan tangkap ke depan	
	Kondisi perikanan tangkap 5 tahun terakhir	
	Ketergantungan terhadap perikanan tangkap	
	Kelompok nelayan	
Profil Budidaya Laut	Komoditas budidaya	Pemilik dan buruh budidaya laut
	Area budidaya (lokasi, luasan, kepemilikan)	
	Karakteristik teknis budidaya meliputi teknik budidaya, pembibitan, periode budidaya, penanganan selama tanam, penanganan pasca panen	
	Produktivitas budidaya meliputi biaya pengadaan bibit dan alat, biaya operasional tenaga kerja, biaya perawatan rutin selama budidaya, hasil volume panen, nilai penjualan, bagi hasil antara pemilik dan buruh	
	Pemasaran hasil budidaya laut	
	Sarana produksi budidaya laut	
	Tantangan & kendala budidaya laut	

Data	Parameter Data	Target Informan
	Peluang kegiatan budidaya laut ke depan Kondisi budidaya laut 5tahun terakhir Ketergantungan terhadap budidaya laut Kelompok budidaya	
Profil usaha garam	Sumber bahan baku garam Area pengolahan Karakteristik teknis pengolahan garam Produktivitas pengolahan garam Permodalan untuk usaha pengolahan garam Pemasaran hasil pengolahan garam Sarana produksi usaha garam Tantangan & kendala pengolahan garam Peluang pengolahan garam ke depan Kondisi pengolahan garam 5 tahun terakhir Ketergantungan terhadap usaha pengolahan garam Kelompok usaha garam	Pengusaha dan pekerja garam
Profil Pariwisata	Objek wisata Kegiatan wisata yang ada Kegiatan wisata yang sudah dikembangkan dan dikelola secara memadai Produktivitas kegiatan ekonomi wisata Sarana prasarana pendukung wisata Kendala dan tantangan kegiatan wisata Peluang kegiatan wisata ke depan Kondisi kegiatan wisata 5 tahun terakhir Ketergantungan terhadap wisata Kelompok kegiatan wisata	Pemilik dan pekerja pariwisata
Profil pengolahan perikanan & hasil laut	Kegiatan pengolahan Sumber bahan baku Produktivitas Permodalan usaha Pemasaran hasil olahan Kendala & tantangan pengolahan Peluang kegiatan pengolahan ke depan Kondisi kegiatan pengolahan 5 tahun terakhir Ketergantungan terhadap kegiatan pengolahan Kelompok pengolah hasil laut	Pemilik dan pekerja pengolahan hasil perikanan dan laut
Profil Pemasaran	Profil pemasaran di tingkat pengepul untuk setiap produk hasil laut	Pedagang ikan skala kecil & skala besar
Profil Gender	Pendidikan perempuan	

Data	Parameter Data	Target Informan
	Keterampilan perempuan, terutama terkait dengan SDA pesisir dan laut	Tokoh perempuan (ketua PKK, Tokoh perempuan lainnya/kalangan profesi, ibu rumah tangga)
	Peran perempuan (peran sosial, peran ekonomi, peran dalam pengelolaan SDA pesisir laut)	
	Ketahanan pangan	
	Pengelolaan keuangan	
Profil Permodalan	Sumber modal	Pemilik modal
	Mekanisme pemberian modal kepada nelayan/budidaya/garam/wisata	
	Kendala & tantangan permodalan	
	Pandangan terkait dengan permodalan yang ada saat ini, dan saran untuk kondisi yang lebih baik	
	Pelibatan lembaga keuangan formal dalam permodalan	
Profil Kesehatan	Jenis penyakit	Tenaga kesehatan di desa (kader, bidan, petugas posyandu)
	PHBS	
	Kondisi gizi buruk & stunting	
	Akses terhadap fasilitas kesehatan	
	Pemahaman masyarakat tentang kesehatan, gizi, dan pola asuh keluarga	
	Kerentanan bidang kesehatan	
	Pengaruh kondisi covid-19 terhadap kesehatan	
	Kendala & tantangan bidang kesehatan masyarakat	
Profil & Persepsi Kelompok Pemuda	Organisasi kepemudaan	Tokoh pemuda
	Kegiatan kepemudaan	
	Persepsi pemuda tentang kehidupan sosial masyarakat	
	Persepsi pemuda tentang sumber daya pesisir dan laut	
	Peran/Keterlibatan pemuda dalam pemanfaatan dan pengelolaan SDA pesisir dan laut	
Profil & Persepsi Tokoh Keagamaan	Organisasi keagamaan	Tokoh agama
	Kegiatan keagamaan	
	Persepsi tokoh agama tentang kehidupan sosial masyarakat	
	Persepsi tokoh agama tentang sumber daya pesisir dan laut	
	Peran/Keterlibatan kelompok keagamaan dalam pengelolaan SDA pesisir dan laut	
Tata Kelola SDA Pesisir dan Laut	Kearifan Lokal	Seluruh informan dan peserta FGD
	Tata Kelola Adat	
	Pengawasan pesisir dan laut	
	Organisasi khusus terkait dengan pesisir dan laut	
	Kegiatan illegal terkait dengan pemanfaatan SDA pesisir dan laut	
	Sanksi yang berlaku	
Pentagon Aset	Aset alam	Seluruh informan dan peserta FGD
	Aset manusia	
	Aset finansial	

Data	Parameter Data	Target Informan
Ancaman	Aset fisik	Seluruh informan dan peserta FGD
	Aset sosial	
	Kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan pesisir dan laut	
Kerentanan Sosial	Kondisi yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat	Seluruh informan dan peserta FGD
	Pemicu ancaman	
	Aspek kerentanan	
	Kelompok rentan	
Konflik Sosial	Strategi yang dilakukan untuk menghadapi kerentanan	Seluruh informan dan peserta FGD
	Efektivitas strategi	
	Gap strategi	
	Jenis & detail konflik	
	Waktu konflik	
	Penyebab konflik	
	Pihak terlibat dalam konflik	
	Derajat eskalasi konflik	
	Penyelesaian konflik	
Pihak terlibat dalam penyelesaian konflik		
Program Pemberdayaan & kebutuhan Masyarakat	Status penyelesaian terkini	Seluruh informan dan peserta FGD
	Peluang konflik muncul kembali	
Peta Stakeholder	Detail program yang pernah diterima oleh masyarakat dalam kurun 10-20 tahun terakhir termasuk keberhasilan program	Informan KII
	Detail program yang diusulkan/dibutuhkan masyarakat untuk mendukung kehidupan	
	Stakeholder penting terkait dengan pesisir dan laut	
	Organisasi sosial khusus terkait dengan pesisir dan laut	
	Relasi sosial antar stakeholder	